

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB I
SEJARAH



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 1

SEJARAH

- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menguasai hakikat struktur keilmuan, ruang lingkup, dan objek Sejarah.
 - : Membedakan pendekatan-pendekatan Sejarah
 - : Menunjukkan manfaat mata pelajaran Sejarah
- C. KKD : -
- D. Materi

Kata sejarah sudah tidak asing lagi di telinga kita. Apabila kita menjumpai atau mendengar kata sejarah, maka yang terbayang di sebagian besar kita adalah masa lalu, kekunoan, barang-barang dari jaman dahulu serta semua hal yang berhubungan dengan masa lalu, kuno, dan lapuk. Meskipun sebagian besar dari masyarakat kita menganggap sejarah tidak penting, tidak dapat dipungkiri bahwa sejarah selalu menjadi hal yang paling disalahkan apabila terjadi tragedy pada perjalanan umat manusia.

Secara literasi sejarah berasal dari kata syajarah (bahasa Arab) yang berarti pohon, syajarah an-nasab yaitu pohon istilah. Sejarah dalam bahasa Inggris adalah history yang merupakan turunan dari kata historia (bahasa Latin) yang berarti orang pandai. Kata historia juga diartikan sebagai pengetahuan tentang gejala-gejala alam. Dalam perkembangannya sejarah lebih merujuk kepada aktivitas manusia di masa lampau.

Pada awalnya sejarah dimaknai sebagai cerita tentang peristiwa masa lalu. Sejarah dalam bentuk demikian bersifat naratif, artinya gambaran masa lalu disajikan secara lengkap meliputi urutan fakta beserta penjelasannya. Sejarah dalam bentuk tersebut pada umumnya bersifat rinci dan kronologis tentang suatu peristiwa. Sejarah demikian lebih bersifat cerita bukan merupakan sejarah ilmiah, karena tidak menuntut penggunaan metodologi dan teori.

1. Sejarah sebagai Ilmu

Sejarah sebagai cerita masa lalu sering mencampurkan antara kenyataan sejarah dengan hal-hal yang tidak nyata atau dongeng. Pencampuran ini membuat sejarah sering pula disamakan dengan mitos atau legenda. Dengan demikian peristiwa sejarah menjadi kabur, sementara yang berkembang menjadi populer dan kemudian dipercaya

sebagai suatu kebenaran sejarah oleh masyarakat sebenarnya hal yang bukan fakta sejarah.

Agar suatu peristiwa sejarah yang sebenarnya menjadi jelas dan tidak “digantikan” oleh kisah yang “ditambahkan” maka sejarah harus dapat dipercaya. Kepercayaan pada sejarah terletak pada kemampuan sejarah membuktikan kebenaran peristiwa sejarah yang dapat diuji secara ilmiah. Jadi sejarah harus membuktikan bahwa masa lalu itu benar-benar terjadi.

Sejarah sebagai ilmu harus membuktikan keobyektifan dan berlandaskan pada keberadaan serangkaian artefak, manuskrip, dokumen untuk membuktikan dan merekonstruksi peristiwa masa lalu. Dokumen, artefak, manuskrip adalah jejak yang ditinggalkan dari aktivitas manusia di masa lalu. Semua benda itu yang disebut sumber primer diteliti untuk dicari keterhubungan satu dengan yang lainnya sehingga menjadi fakta. Fakta-fakta kemudian diinterpretasi yang berakhir pada historiografi.

Sejarah sebagai ilmu adalah empiris, dalam kinerja sejarawan berdasarkan pada pengamatan, pengalaman dan penafsiran. Dalam hal ini peneliti sejarah harus mencari dan mengamati sumber, membandingkan keterangan dari satu sumber dengan sumber yang lain, melakukan klasifikasi informasi yang ada pada sumber, menarik fakta dan terakhir menyimpulkan. Semua kegiatan itu harus terekam dan dapat diuji berulang kali.

Salah syarat ilmu adalah memiliki obyek. Obyek ilmu sejarah adalah manusia, tetapi dalam hal ini yang dimaksud lebih pada aktivitas manusia di masa lampau. Dalam melakukan pengamatan atas obyek, sejarah tidak dapat melakukan pengamatan langsung selayaknya ilmu alam karena obyek kajiannya tidak dapat diamati secara langsung. Ilmu sejarah melakukan pengamatan atas obyek penelitian melalui “jejak” yang ditinggalkan oleh mereka berupa manuskrip, dokumen, atau artefak yang merepresentasikan kegiatan manusia di masa lalu. Jadi dalam hal ini obyek kajian sejarah adalah manusia yang dibatasi oleh ruang dan waktu.

Seperti halnya ilmu pengetahuan yang lain, ilmu sejarah juga mempunyai teori yang sering disebut filsafat sejarah kritis. Teori adalah hal-hal yang berkenaan dengan kaidah pokok keilmuan. Filsafat menyebutnya epistemology yang berarti pengetahuan tentang sesuatu atau obyek penelitian. Dalam hal ilmu sejarah obyek penelitiannya adalah manusia dalam waktu. Inilah yang membedakan sejarah dengan mitos. Dalam mitos tidak

jelas waktu dari kejadian, sedangkan pada sejarah waktu menjadi suatu hal yang penting sehingga jelas kapan suatu kejadian itu berlangsung.

Sebagai kajian ilmiah, sejarah juga melakukan generalisasi atau melakukan penarikan kesimpulan umum. Berbeda dengan ilmu social yang menarik kesimpulan pada satu penelitian dan diberlakukan juga untuk obyek yang sama tetapi tempat berbeda sehingga kesimpulan di satu tempat penelitian dapat berlaku sama untuk tempat lain asal dalam kondisi yang sama, generalisasi sejarah sering berupa koreksi atas kesimpulan ilmu lain. Contoh Marx menggeneralisasi bahwa semua revolusi adalah perjuangan kelas (kelas buruh terhadap kelas majikan), tetapi dalam hal revolusi Indonesia bukanlah perjuangan kelas tetapi digerakkan oleh nasionalisme.

Seperti halnya ilmu lain, sejarah juga memiliki metode. Metode adalah langkah-langkah yang harus ditempuh seorang peneliti agar dalam melakukan rekonstruksi terhindar dari bias subyektifitas. Metode akan menuntun dan membatasi gerak peneliti sehingga kebenaran penelitian dapat dipertanggungjawabkan. Keberadaan metode pada ilmu sejarah membuat sejarah terbuka untuk diuji sehingga kebenaran sejarah lebih dapat diterima.

2. Sejarah sebagai Seni

Ketika kita membaca sebuah karya sejarah, adakalanya kita merasa bosan karena redaksional karya yang kita baca tidak menarik. Tetapi di pihak lain kita mendapati karya sejarah yang sangat enak dibaca sehingga kita tidak merasa sedang membaca karya sejarah ilmiah, tetapi kita merasa seperti membaca novel. Menarik tidaknya suatu karya sejarah sangat tergantung pada penulis atau peneliti sejarah.

Karya sejarah ilmiah harus berupa rekonstruksi data sejarah yang terpercaya dan andal. Seorang peneliti sejarah memiliki keharusan menguasai tehnik menelusuri dan mengumpulkan data atau dalam bahasa sejarah lebih dikenal dengan istilah sumber sejarah. Kemampuan, kejelian dan ketelitian peneliti sangat menentukan ketersediaan sumber sejarah yang menjadi bahan dasar untuk rekonstruksi sejarah.

Seorang peneliti sejarah ketika akan menentukan topic kajian penelitian tidak dapat hanya mengandalkan ilmu sejarah. Peneliti sejarah memerlukan ilmu lain untuk melihat sisi lain dari dinamika manusia yang belum dikaji dari masa lalu. Ilmu social (sosiologi) dan

ilmu budaya (antropologi) sangat membantu dalam hal mencari kemungkinan topic penelitian sejarah. Melalui ilmu bantu pula memungkinkan keberagaman kajian sejarah sehingga memperkaya karya sejarah.

Namun tidak jarang peneliti sejarah juga menemui “jalan buntu” sehingga peneliti memerlukan ilham atau intuisi untuk mengatasi hal itu. Dalam ilmu sejarah hal tersebut dibenarkan, bahkan intuisi diperlukan terutama ketika peneliti sejarah harus berurusan dengan minimnya sumber. Dalam kondisi demikian diperlukan ketajaman intuisi untuk menentukan sumber yang hendak dicari atau untuk memperkirakan keberadaan sumber.

Sehingga dalam hal ini ilham atau intuisi yang harus dimiliki oleh sejarawan bukan ilham atau intuisi yang dimiliki seorang pengarang. Dalam hal ini intuisi peneliti sejarah dibutuhkan dalam upayanya menelusuri sumber lain yang diperlukan penelitiannya. Karena itu intuisi yang dimiliki peneliti sejarah berjalan berdasarkan data yang telah dimiliki terdahulu. Jadi intuisi tidak muncul tiba-tiba, tetapi terkondisi berdasar atas data yang telah dimiliki peneliti. Dalam hal ini intuisi peneliti akan muncul ketika peneliti mendapati data yang dimilikinya kurang memadai atau dia merasa masih kurang. Maka peneliti akan berusaha keras memikirkan beragam kemungkinan di mana dia dapat memperoleh data. Jadi dalam hal ini intuisi lebih pada pemahaman sejarawan atas apa yang ditelitinya dan instinktif yang dilakukan selama penelitian berlangsung.

Selain intuisi seorang peneliti sejarah juga harus dapat berimajinasi. Imajinasi sejarah penting dikuasai karena penelitian sejarah berhubungan dengan masa lalu yang hanya sedikit meninggalkan jejak. Meskipun dokumen dari masa lalu yang menjadi kajian penelitian cukup banyak tidak akan mungkin rekonstruksi yang dilakukan akan sama persis dengan peristiwa yang sudah berlalu tersebut. Semakin jauh jarak obyek penelitian dengan ruang hidup peneliti, semakin diperlukan imajinasi untuk “merangkai” masa lalu tersebut.

Imajinasi yang dimaksud dalam sejarah adalah kemampuan membayangkan apa yang sebelumnya, sedang, dan telah terjadi pada masa itu. Dalam berimajinasi sejarawan harus tetap berpedoman pada data yang dimilikinya. Karena itu data menjadi penting. Dalam hal itu sejarawan dituntut untuk dapat membayangkan tidak hanya peristiwa yang menjadi obyek kajiannya saja, tetapi termasuk juga bentang geografis, latar budaya, latar sosial, ekonomi, politik dari obyek, masyarakat, dan lingkungan yang ditelitinya.

Pemahaman akan ruang lingkup sosial budaya peristiwa yang menjadi obyek penelitiannya akan “menghidupkan” rekonstruksi sejarahnya. Melalui imajinasi yang dikendalikan tersebut seorang sejarawan akan dapat merangkai hubungan antar pelaku sejarah dengan lingkungan sosial, budaya, bahkan lingkungan alam. Melalui imajinasi pula sejarawan dapat menempatkan para pelaku sejarah pada panggung depan, tengah, atau belakang dalam sebuah peristiwa sejarah.

Selain imajinasi, sejarah juga memerlukan emosi untuk “melibatkan” pembaca dengan sejarah sehingga karya sejarah tidak lagi membosankan. Namun demikian banyak yang berpendapat bahwa apabila sejarah ditulis dengan gaya novel maka akan kehilangan obyektivitasnya. Karya sejarah dengan pelibatan emosi banyak dihasilkan sejarawan Eropa terutama kajian jaman Romantik (abad 18-19). Penaklukan benua baru Amerika terutama pertempuran orang kulit putih dengan orang Indian banyak disajikan dengan model penulisan yang “melibatkan” pembaca sehingga pembaca seolah-olah hadir pada kejadian tersebut. Kajian sejarah budaya tepat apabila disajikan dengan gaya demikian, karena kita dapat “merasakan” dan dapat “menjadi bagian” dari budaya tersebut. Penulisan sejarah dengan emosi tersebut terutama penting untuk keperluan pewarisan nilai. Tentu saja kaidah ilmiah sejarah yang menuntut rekonstruksi berdasar atas sumber tidak boleh ditinggalkan.

3. Guna Sejarah

Apakah sejarah berguna? Pertanyaan ini sering dilontarkan terutama oleh para siswa di kelas yang berpendapat sejarah tidak berguna karena tidak berhubungan dengan kehidupan mereka sekarang. Pendapat itu tidak salah. Namun demikian ada suatu realita yaitu banyaknya buku sejarah di toko buku, film sejarah yang dibuat baik untuk alasan komersial maupun dokumenter. Akhir-akhir ini dunia pariwisata dimarakkan dengan wisata sejarah yaitu wisata dengan mengunjungi tempat yang menjadi ikon atas suatu peristiwa atau peradaban. Contoh wisata perkebunan kopi yang banyak ditawarkan oleh PT Perkebunan. Wisata itu tidak hanya mengunjungi perkebunan kopi tetapi juga akan menelusuri industri kopi Indonesia yang sudah dimulai sejak era colonial Belanda. Pengunjung akan diajak melihat mesin pengolah kopi dari masa perkebunan masih dikuasai pengusaha Belanda, bahkan ada pula mesin dari masa colonial yang masih dipakai hingga sekarang. Dengan demikian kita mengetahui bahwa teknologi pengolahan

kopi yang kita kenal sekarang diperkenalkan oleh Belanda pada era 1900-an. Itulah guna sejarah, salah satunya adalah untuk mengetahui dari mana suatu hal itu berasal atau dimulai.

Dalam hal guna, sejarah memiliki dua guna yaitu guna intrinsik dan ekstrinsik. Guna intrinsik adalah sejarah sebagai ilmu, sejarah untuk mengetahui masa lalu, sejarah sebagai pernyataan dan sejarah sebagai profesi; sedangkan guna ekstrinsik adalah sejarah sebagai pendidikan. Guna ekstrinsik sejarah sangat jelas tertuang dalam kurikulum mata pelajaran sejarah sejak tingkat SD sampai SLTA. Bahkan pada masa Orde Baru masih ditambahkan dengan penataran P4 yang wajib diikuti oleh seluruh mahasiswa baru di universitas baik negeri maupun swasta, dan pegawai negeri. Dalam hal demikian sejarah dipakai sebagai media penanaman pendidikan moral dan politik.

Salah satu guna sejarah yang jarang dieksplorasi adalah sejarah sebagai pendidikan masa depan. Di Negara-negara maju seperti Amerika, Jepang, Cina, Inggris dan Eropa History of Future diajarkan di perguruan tinggi dan menjadi kajian penting. Keberadaan kajian sejarah masa mendatang dirasa penting demi kelangsungan peradaban dan bangsa. Kesadaran akan pentingnya sejarah telah membawa Negara-negara besar bertahan bahkan cenderung menjadi penentu dalam percaturan global. Pengalaman masa lalu dijadikan acuan untuk merancang masa depan yang lebih baik bagi umat manusia. Sejarah masa depan juga dipakai sebagai sarana untuk mengejar “mimpi”, contoh keberadaan NASA selain berhubungan dengan eksplorasi semesta juga dipakai sebagai wahana supremasi Amerika dalam bidang teknologi kedirgantaraan. Keberadaan mobil listrik di Eropa selain faktor kebersihan dan kesehatan lingkungan juga sebagai wahana supremasi Eropa sebagai bangsa yang mendorong perubahan seperti yang telah dilakukan pada masa lalu (renaissance, merkantilisme, imperialism, kolonialisme dll).

4. Pendekatan Sejarah

Pada tahun 1958 berlangsung Kongres Sejarah di Yogyakarta. Kongres ini bertujuan menulis sejarah Indonesia melalui sudut pandang Indonesia dengan pendekatan baru. Pandangan baru yang dimaksud adalah karya sejarah yang lebih menonjolkan peran orang kebanyakan dibanding berfokus pada orang-orang besar. Juga untuk mengganti sudut pandang sejarah Indonesia dari Nederlando centris kepada Indonesia centris. Sejarah Indonesia yang ada adalah “pembalikan” dari sejarah Hindia Belanda

(Geschiedenis van Nederland-Indie). Apabila dalam sejarah Hindia Belanda Diponegoro adalah penjahat maka dalam versi sejarah Indonesia era 1950-an Diponegoro adalah pahlawan dan VOC-Belanda penjahatnya. Pembalikan tanpa control dan analisa membuat sudut pandang tulisan menjadi satu arah. Perubahan sosial dan budaya masyarakat kebanyakan tidak terekam dan “tersisih” dari sejarah.

Karena itu dalam Kongres tersebut Sartono Kartodirjo sejarawan dari UGM mengusulkan penggunaan pendekatan ilmu-ilmu sosial untuk penulisan sejarah Indonesia agar lebih bisa menunjukkan kejadian yang mendekati kenyataan pada jamannya. Pendekatan ilmu sosial akan menawarkan dimensi baru yang dilewatkan oleh sejarah konvensional. Dengan penggunaan pendekatan ilmu sosial kelompok-kelompok marginal seperti buruh, petani, masyarakat desa, pedagang, mahasiswa/pelajar sampai bencana alam dan lingkungan akan menjadi perhatian dan dapat muncul pada panggung sejarah Indonesia.

Pemakaian pendekatan sosiologis dalam sejarah akan mengungkap segi-segi sosial dari peristiwa yang dikaji. Dalam kajian itu akan dieksplorasi hubungan sosial antar kelas dalam masyarakat, peran dan status, konflik-konflik sosial dan lain-lain. Secara metodologis pemakaian sosiologi untuk mengkaji sejarah bertujuan memahami subjektivitas perilaku sosial, memahami motivasi dan tindakan individu dalam peristiwa kolektif. Dalam hal ini teori sosial akan membimbing sejarawan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan suatu peristiwa terjadi. Contoh historiografi dengan pendekatan sosiologi adalah Pemberontakan Petani Banten 1888 karya Sartono Kartodirjo.

Pendekatan antropologi juga dapat dipakai sebagai alternatif lain untuk mengungkap sisi lain sejarah Indonesia. Dalam beberapa hal hampir tidak perbedaan pendekatan antropologi dengan pendekatan sosiologi, karena keduanya sama-sama mempelajari masyarakat terutama bentuk sosial dan strukturnya. Namun demikian yang membedakan dengan sosiologi adalah obyek kajian. Pendekatan antropologi dipakai untuk mengkaji masalah-masalah budaya. Dalam menjelaskan perubahan masyarakat dalam waktu otomatis kita juga akan menggambarkan kehidupan budaya dan perubahan yang terjadi dalam kurun waktu sejarah tersebut. Dengan penelusuran budaya suatu kelompok masyarakat kita akan mengetahui gerak perubahan yang terjadi.

Ada empat metode antropologi yang dapat dipakai dalam rekonstruksi sejarah. Pertama metode asimilasi yaitu menjelaskan bagaimana proses saling menghisap unsure-unsur budaya dalam kontak budaya. Kedua metode fungsional menjelaskan bagaimana suatu kebudayaan pada suatu entitas masyarakat di wilayah tertentu secara lengkap dan sistematis. Ketiga metode fungsional dalam analisa tentang mitologi mempelajari ide, pemikiran, pandangan hidup yang menjadi sumber motivasi bagi kegiatan fisik dan spiritual masyarakat pemilik mitologi tersebut. Metode silsilah digunakan untuk mengumpulkan terminology kekerabatan pada bahasa tertentu untuk menganalisa system kekerabatan. Metode ini juga dapat dipakai untuk mengumpulkan data tentang segala hal yang berada di sekitar individu, bahkan dapat dipakai untuk menyusun kembali sejarah suatu kelompok masyarakat.

Pendekatan paling tua dalam penulisan sejarah adalah pendekatan politik. Historiografi dengan pendekatan politik sering disebut dengan sejarah konvensional sehingga sejarah identik dengan politik. Namun demikian apabila kita merujuk pada konsep politik modern maka penulisan sejarah dengan pendekatan politik tidak akan terjebak seperti karya sejarah politik konvensional. Apabila konsep politik diartikan sebagai distribusi kekuasaan maka kita akan bertemu dengan hakekat dan tujuan system politik, hubungan structural dalam system itu, pola perilaku individu dan kelompok dalam system, hukum dan kebijakan sosial, partai politik, kelompok kepentingan, komunikasi dan pendapat umum serta birokrasi dan administrasi. Dengan demikian sejarah dengan pendekatan politik tidak lagi berisi sejarah tokoh-tokoh besar.

Pendekatan ilmu lain yang dapat dipakai untuk merekonstruksi sejarah tidak terbatas pada ketiga pendekatan itu, tetapi masih banyak seperti ekonomi, geografi, ekologi, gender, feminisme bahkan semiotik. Penggunaan beragam pendekatan untuk merekonstruksi sejarah akan memunculkan nuansa baru penulisan sejarah yang “berbeda” dan tentu saja akan menjadikan karya sejarah menarik, karena akan mengungkap sisi yang selama ini tidak dianggap sebagai kajian sejarah. Contoh Kebudayaan Indies karya Sapardi Djoko D menceritakan tentang akulturasi budaya Eropa-Indonesia dalam beragam hal mulai dari pakaian sampai arsitektur. Denys Lombart dengan karyanya Persekutuan Aneh memaparkan tentang kehidupan perempuan Tionghoa yang menjadi “istri” opsir VOC di Batavia pada abad 16-17, bagaimana mereka

menciptakan identitas baru karena secara sosial telah “dibuang” oleh masyarakatnya. Budaya ciptaan mereka ini salah satunya menjadi ikon Jakarta yang selalu dikenakan none-none Betawi yaitu baju kebaya encim.

E. KEPUSTAKAAN

Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu

Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Ilmu Sosial*. Jakarta: YOI

Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia

Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB II
INDONESIA MASA PRA AKSARA



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 2

INDONESIA MASA PRA AKSARA

- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam
- C. KKD : Menerangkan corak kehidupan masyarakat praaksara pada masa neolitikum
 - Menganalisis peninggalan budaya praaksara Indonesia
 - Mengidentifikasi teknologi pertanian pada masa pra aksara
 - Menganalisa hasil budaya pra aksara yang masih berlanjut sampai masa modern
- D. Materi

Nusantara telah dihuni oleh manusia sejak sekitar 20.000 tahun sejak permulaan jaman holocen. Tentu saja manusia pendukungnya merupakan manusia tingkat awal atau dikenal dengan manusia purba. Pada jaman ini pembentukan gugusan kepulauan nusantara terus terbentuk melalui serangkaian gerakan geologi dan iklim bumi awal. Masa inter glacial yang berlangsung dua kali membuat nusantara tersambung dengan benua Asia sehingga memungkinkan terjadinya migrasi manusia dan hewan dalam jumlah besar.

1. Kebudayaan praaksara

Masa Mesolithikum dianggap sebagai masa dimana manusia purba telah hidup berkelompok dan menghasilkan budaya dengan teknologi yang kompleks. Temuan komunitas manusia purba dari masa ini adalah Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi dan Flores. Berdasarkan temuan budaya manusia purba yang hidup masa Mesolithikum bercirikan berburu dan menangkap ikan (food gathering). Beberapa temuan juga telah menunjukkan pola hidup menetap terutama di gua-gua dekat perairan (pantai, sungai atau danau).

Penguasaan teknologi tingkat sederhana terus berkembang dan semakin kompleks. Temuan benda budaya dari masa selanjutnya yaitu masa Neolithikum memperlihatkan keberlanjutan teknologi itu. Pada masa ini pula mulai dikenal teknologi baru dalam bidang pertanian dan muncul organisasi sosial tingkat sederhana yaitu kelompok masyarakat atau klan. Jejak kehidupan sosial terekam

dalam banyak peninggalan budaya pra aksara baik yang bersifat materiil maupun mentifik atau hasil budaya non benda (magi, adat, pamali dll)

1.1. Kjekkenmoddinger

Ciri utama masa Mesolithikum nusantara adalah keberadaan peninggalan kepurbakalaan yang dikenal dengan sebutan Kjekkenmoddinger atau sampah dapur. Situs –situs kjekkenmoddinger ditemukan di sepanjang pantai Sumatra Timur Laut antara Langsa di Aceh dan Medan di daerah perbukitan yang jaraknya sekitar 20-30 km dari garis pantai sekarang. Kemungkinan situs tersebut berada di tepi pantai.

Tumpukan sampah dapur yang ditemukan diidentifikasi sebagai fosil kerang dan siput. Tumpukan fosil hewan laut itu mencapai ketinggian beberapa meter dengan lebar beberapa puluh meter, sehingga yang terlihat sekarang berupa bukit karang. Kita akan mengetahui bahwa itu adalah tumpukan sampah apabila dengan teliti dan seksama mengamati materi yang membentuk bukit.

1.2. Kapak genggam (pebble)

Kapak genggam (pebble) banyak ditemukan di Sumatra bersama dengan kjekkenmoddinger. Kapak genggam Sumatra berbeda dengan kapak genggam (chooper) dari masa sebelumnya (Palaeolithikum). Kapak Sumatra terbuat dari batu kali yang dibelah, sisiluar dibiarkan sesuai bentuk aslinya sedang sisi dalam (dataran pukul) diupam sesuai kebutuhan

Selain kapak genggam (Sumatra) kapak lain yang menjadi cirri khas masa Mesolithikum adalah kapak (genggam) pendek. Kapak ini berbentuk setengah lingkaran dengan cara pembuatan yang sama dengan kapak Sumatra dan tidak diupam (diasah). Sisi yang tajam yang dipakai sehingga ada yang berpendapat bahwa benda itu bukan kapak tetapi serpih bilah (flakes) yang biasanya dipakai untuk menguliti binatang buruan yang telah dibunuh.

1.3. Alat-alat dari tulang

Penemuan benda-benda purbakala masa Mesolithikum di Jawa didominasi dengan alat-alat dari tulang dan dikenal dengan istilah budaya Sampung (Sampung bone culture). Di Jawa tidak ditemukan kapak batu seperti di Sumatra. Alat-alat tulang yang ditemukan adalah mata panah dan mata tombak. Alat-alat

dari tulang banyak ditemukan di gua-gua Besuki Jawa Timur dan Bojonegoro. Situs hunian di Bojonegoro selain berisi alat-alat dari tulang juga terdapat alat-alat serpih yang terbuat dari kerang.

Kebudayaan tulang tidak hanya dikenal di Jawa, Sulawesi juga menghasilkan budaya alat serpin tersebut. Alat-alat tulang yang kebanyakan adalah mata panah ditemukan di Sulawesi Selatan khususnya daerah Lamoncong dan dikenal dengan kebudayaan Toala. Namun demikian alat tulang dari Sulawesi memiliki perbedaan dengan alat tulang Jawa. Mata panah kebudayaan Toala tidak berbentuk lancip polos tetapi bergerigi dan memiliki panjang dua kali lipat dari mata panah tulang budaya Sampung.

1.4. Kebudayaan Bacson-Hoabinh

Kebudayaan Bacson-Hoabinh adalah penamaan oleh Mme Madeline Colani ahli prasejarah Perancis. Kebudayaan ini terdapat di daerah Tonkin Indo-Cina dengan temuan utama kapak (pebble), kapak pendek dan alat-alat serpih dari tulang. Kapak-kapak yang ditemukan ada yang berbentuk kasar tetapi ada pula yang sudah diupam (dihaluskan). Berdasarkan penelitian lebih lanjut kebudayaan Bacson-Hoabinh merupakan pusat kebudayaan purba Asia Tenggara, dari sinilah kebudayaan itu menyebar ke Indonesia melalui Thailanda dan Malaysia.

1.5. Lukisan gua

Pada gua-gua di Maros Sulawesi beberapa diantaranya terdapat lukisan pada bagian langit-langit dan dinding bagian atas gua. Gambae yang dilukiskan adalah binatang sejenis babi hutan, hewan seperti kijang dengan posisi diburu oleh orang-orang yang membawa tombak. Ada juga lukisan cap tangan, ii dijumpai di beberapa gua dengan warna merah, kecoklatan.

1.6. Kapak persegi

Kapak persegi merupakan bentuk lebih modern dari kapak batu/berimbis/pebble. Kapak persegi sesuai namanya bentuknya persegi mirip pacul (jaman sekarang) dan terbuat dari batu api, batu kali dan kalsedon. Pada jenis yang lebih awal bentuknya masih kasar dengan dataran pukul (bentukan) terlihat jelas, sedangkan hasil budaya lebih lanjut memperlihatkan bentuk yang halus dan

diasah. Perbedaan itu memperlihatkan perkembangan teknologi pembuatan kapak batu dan kemampuan penguasaan teknologi pembuatan kapak batu.

Wilayah temuan budaya kapak persegi adalah Sumatra, Jawa dan Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi dan Kalimantan (jumlah sedikit dan teknologi sangat sederhana). Temuan budaya ini sangat berlimpah terutama di Lahat (Palembang), Bogor, Sukabumi, Karawang, dan Tasikmalaya (Jabar), serta daerah Pacitan dan lereng gunung Ijen (Jatim). Banyaknya temuan kapak persegi disertai “sampah” batuan serpih yang banyak dan batu asahan membuat para peneliti berkesimpulan bahwa daerah itu merupakan bengkel atau pabrik kapak persegi.

1.7. Kapak lonjong

Benda budaya ini mendapatkan namanya dari bentuknya lonjong bulat telur. Semua temuan kapak lonjong telah diasah dengan sangat halus sehingga licin. Kapak lonjong kebanyakan terbuat dari batuan beku magma sehingga cenderung berwarna gelap dank eras, namun banyak juga temuan kapak lonjong yang terbuat dari jenis batu yang lain seperti kalsedon. Biasanya kapak lonjong yang terbuat dari batu kalsedon tidak dipakai untuk keperluan sehari-hari tetapi sebagai alat upacara keagamaan.



Gambar kapak lonjong (www.wacananusantara.org)

Kebudayaan kapak lonjong disebut dengan kebudayaan Neolithikum Papua. Sebutan ini berdasarkan banyaknya benda budaya tersebut di temukan di Papua,

bahkan benda tersebut masih dibuat dan dipakai oleh sebagian besar orang-orang Papua. Selain Papua budaya kapak lonjong ditemukan di Seram, Gorong, Tanimbar, Leti, Minahasa, dan Serawak (Kalimantan Utara). Kapak lonjong juga ditemukan di Cina, Jepang, Assam, Birma Utara, Formosa, Philipina dan kepulauan Melanesia. Luasnya sebaran temuan budaya kapak lonjong memperlihatkan ruang gerak budaya tersebut yang cukup luas.

1.8. Gerabah

Teknik pembuatan gerabah juga telah dikenal pada masa Neolithikum. Seperti halnya kapak batu, temuan benda budaya gerabah juga memiliki dua model. Pertama adalah gerabah yang dibuat dengan sederhana dengan teknik tatap dan kedua gerabah yang dibuat dengan menggunakan teknik roda putar sehingga hasilnya lebih bagus dan presisi. Sebagian besar temuan gerabah di satu tempat berasal dari kedua teknik itu, sehingga disimpulkan bahwa meskipun telah dikenal teknik roda putar gerabah dengan teknik tatap tetap diproduksi.

Benda budaya gerabah banyak ditemukan di Sumatra berupa pecahan tanpa motif atau dengan dengan hiasan sangat sederhana. Temuan gerabah yang memperlihatkan penguasaan teknologi yang lebih maju banyak ditemukan di Jawa yaitu pada perbukitan pasir antara Yogyakarta dan Pacitan. Temuan gerabah di daerah ini telah menggunakan teknik roda putar dan memiliki hiasan berupa garis-garis simetris, cap tali, cap anyaman, dan cap kerang yang ditorehkan pada gerabah ketika masih basah. Di Melolo Sumba ditemukan gerabah berupa periuk belanga yang berisi tulang manusia.

1.9. Benda budaya perunggu

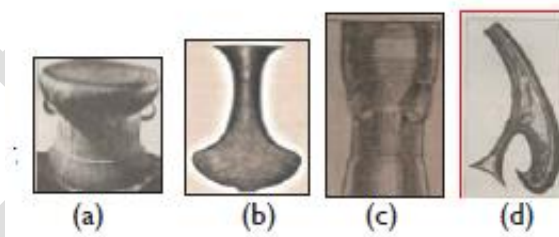
Masa neolithikum akhir dikenal pula dengan masa perundagian. Pada masa ini teknologi yang dikuasai manusia sudah lebih maju dan kompleks yaitu dengan dikenalnya teknik metalurgi atau pengecoran/peleburan logam. Benda budaya masa perundagian adalah kapak corong, nekara, dan moko.

Kapak corong ditemukan di Sumatra Selatan, Jawa, Bali, Sulawesi Tengah dan Selatan, pulau Selayar dan Irian dekat danau Sentani. Kapak corong memiliki jenis dan bentuk yang beragam. Ada yang kecil sederhana, polos tanpa hiasan, sampai bentuk yang lebih lebih besar dengan lengkung panjang disertai hiasan simetris

yang rumit. Jenis kapak corong dengan bidang lengkung yang panjang disebut candrasa, biasanya benda budaya ini dipenuhi dengan hiasan yang menggambarkan binatang, orang dengan posisi tertentu atau sekedar garis lurus dan lengkung yang simetris.

Nekara adalah temuan dari masa perundagian yang sangat istimewa. Di Indonesia nekara ditemukan dengan berbagai ukuran, mulai yang kecil dengan diameter sekitar 50 cm sampai yang berukuran besar dengan diameter sekitar 2 m. Nekara ditemukan di Sumatra, Jawa, Bali, pulau Sangean dekat Sumbawa, Roti, Leti, Selayar, kep. Kei dan Alor. Biasanya nekara ditemukan bersama Moko yaitu benda perunggu dengan bentuk seperti nekara tetapi memiliki diameter lebih kecil dan lebih tinggi sehingga memiliki kesan ramping.

Baik nekara maupun moko dipenuhi hiasan di seluruh permukaannya (bidang datar dan lengkung). Hiasan pada nekara dan moko berupa hewan baik hewan besar maupun kecil, unggas kebanyakan burung merak atau burung-burung “indah” lainnya, garis-garis simetris yang berpotongan, pola-pola rumit yang terlihat seperti daun, awan atau air. Pola-pola rumit itu masih dapat kita jumpai pada kain tenun tradisional Bali, Sumabawa dan Timor. Pada bagian atas nekara sering dihiasi dengan hewan katak.



Contoh hasil budaya masa Perundagian (a) nekara, (b) kapak corong (c) moko, (d) candrasa (sumber: koedahitam.blogspot.com)

2. System Religi

Kepercayaan manusia kepada kekuatan alam mulai ditemukan buktinya pada masa berburu dan mengumpulkan makanan serta semakin kompleks pada masa bercocok tanam. Seni lukis pada dinding gua memperlihatkan kegiatan berburu, keberadaan patung dewi kesuburan adalah bukti pengakuan komunitas manusia itu

terhadap kekuatan alam. Bekal kubur adalah bukti nyata tentang sikap manusia terhadap kekuatan di luar manusia.

Upacara penguburan adalah yang paling mencolok untuk membuktikan keberadaan kepercayaan pada masyarakat pra aksara. Penguburan dilakukan langsung maupun tidak langsung pada tempat yang dianggap sebagai tempat tinggal arwah nenek moyang. Mayat akan dibekali dengan beragam benda keperluan sehari-hari, perhiasan (manic-manik) yang dimaksudkan agar perjalanannya ke dunia arwah berjalan lancar.

Bukti lain keberadaan kepercayaan diperlihatkan dengan gambar perahu atau kapal. Lukisan perahu atau kapal sangat tegas dilukiskan pada nekara atau moko yang ditemukan di Bali dan Sumbawa. Para ahli kepurbakalaan menyimpulkan bahwa perahu atau kapal tersebut bukan untuk transportasi tetapi merupakan symbol perjalanan ke dunia arwah.

Tradisi megalitik juga berkaitan dengan system kepercayaan masyarakat pra aksara. Tradisi megalitik yaitu pendirian bangunan-bangunan besar dari batu menunjukkan keterhubungan dengan kepercayaan bahwa orang yang telah mati masih memiliki keterhubungan dengan yang masih hidup terutama dalam hal kesejahteraan dan kesuburan tanaman. Pendirian bangunan megalit sebagai medium penghormatan dan "hubungan" kepada yang telah mati. Tradisi megalit merupakan tradisi yang tersebar luas di Asia Tenggara.

Tradisi megalitik terbagi dua yaitu megalitik tua (2500-1500 SM) dan megalitik muda yang berusia kira-kira pada awal millennium. Megalitik muda berkembang pada masa perundagian dengan hasil budaya kubur peti batu (sarkopagus), dolmen semu, arca batu, batu lesung dan bejana batu. Namun demikian dalam penelitian selanjutnya tidak selalu tradisi megalitik berhubungan dengan monument batu besar. Pada tempat dimana daerah tersebut tidak menghasilkan bahan yang dibutuhkan keberadaan benda megalit digantikan dengan batu yang lebih kecil, kayu bahkan tidak ada medium sama sekali, tetapi ritual pemujaan kepada nenek moyang tetap dilakukan.

Situs megalitik di Sumatra terdapat di dataran tinggi Pasemah yaitu daerah antara Bukit barisan dan pegunungan Gumai di lereng gunung Dempo. Penelitian atas

situs ini dilakukan oleh Tombrink (1870), Engehard (1891), Krom (1918), Westenek (1922) dan Hoven (1927) serta Eerde (1929). Tradisi megalitik Sumatra Selatan ini erat hubungannya dengan cerita rakyat Si Pahit Lidah atau Serunting Sakti. Monument megalitik di Jawa terdapat di Jawa Barat (Kosala, Lebaksebedug, Pasir Angin, Leles, Kuningan, Kampung Muara). Situs Kosala atau dikenal dengan Arca Domas erat kaitannya dengan orang-orang Badui Banten. Bagi orang Badui menhir pada situs Arca Domas merupakan Batara Tunggal pencipta roh dan tempat dimana roh-roh kembali.

Tradisi megalitik juga ditemukan di Gunung Kidul Yogyakarta berupa kompleks kubur peti batu. Di daerah Matesih Surakarta ditemukan situs megalitik yang dikenal dengan nama “batukandang” yaitu bebatuan besar yang disusun membentuk segi empat atau lingkaran. Di Rembang ditemukan 20 buah batu pelinggih kepala arca hewan (kuda, babi, ikan). Di Jawa Timur monument megalitik berada di Bondowoso yaitu desa Pakauman dengan temuan dolmen yang disebut “pandhusa” atau “makam Cina” oleh penduduk setempat. Di Sulawesi bangunan megalitik ditemukan di daerah Besoha, Bada, Napu, Mahapi, Kantewu, dan Gimpu berupa bejana batu berbentuk bulat lonjong. Sementara sarkopagus banyak ditemukan di Bali, Sumbawa Barat, Flores dan Timor. Di daerah ini sarkopagus, masih memiliki fungsi sebagai kubur batu dan diperlakukan sacral, upacara kematian terutama bagi tokoh masyarakat memperlihatkan keberlangsungan kepercayaan masa pra aksara hingga masa kini.

3. System Sosial

Manusia purba tinggal di gua-gua tepi sungai, danau atau laut secara berkelompok. Karena kehidupan mereka sangat tergantung pada alam maka gua yang dipilih harus dekat dengan sumber penghidupan mereka, apabila lingkungan sekitar sudah tidak mendukung hidup maka mereka akan berpindah ke tempat lain. Berdasarkan temuan di gua Ulu Leang maros Sulawesi Selatan manusia purba Indonesia telah mengenal bercocok tanam, yaitu dengan ditemukannya fosil tanaman padi dan jewawut.

Pembagian kerja telah ditemui dalam masyarakat tersebut. Lukisan gua di Maros disertai temuan alat-alat serpih berupa mata panah dan tombak menunjukkan bahwa perburuan dilakukan secara teratur dan berkelompok. Upaya penjinakan binatang

atau memelihara hewan untuk membantu pekerjaan mereka juga telah dilakukan terutama anjing dan babi (situs gua Cakondo).

Cara hidup nomaden mulai ditinggalkan ketika manusia mulai menemukan cara budidaya tanaman. Seperti halnya pada masa food gathering pada masa food producing mereka juga memilih menetap di dekat perairan (sungai, danau, laut). Kubah Sangiran membuktikan bahwa wilayah itu telah didiami manusia sepanjang periode pra sejarah Indonesia sejak Mesolithikum sampai masa logam. Temuan alat-alat serpih dalam lapisan tanah yang berbeda menunjukkan periode dimana budaya tersebut berlangsung. Keberadaannya yang berada di tebing sungai Solo menunjukkan kepurbaan sungai tersebut.

Secara perlahan system sosialpun berubah. Dengan menetap perkembangan anggota kelompok menjadi mungkin sehingga dibutuhkan tempat tinggal yang lebih besar. Dengan makin banyaknya anggota masyarakat maka pengelompokan sosial pun mengalami perubahan menuju kearah system komunal. Makin banyaknya anggota dalam masyarakat memungkinkan munculnya spesialisasi dalam pekerjaan. Situs Punung, Kendenglembu, Wonogiri, adalah contoh situs perbengkelan yaitu dengan ditemukannya alat-alat serpih dalam jumlah besar.

Gotong royong adalah cirri kehidupan masa praaksara. Kerjasama ini dilakukan baik oleh kaum laki-laki maupun perempuan. Keberadaan lukisan perburuan di Maros yang memperlihatkan serombongan manusia membawa tombak dan panah sedang memburu babi hutan atau kijang membuktikan bahwa pekerjaan berburu dilakukan bersama-sama dan bergotong royong. Meskipun tidak ada bukti tentang pekerjaan perempuan masa pra aksara, dengan membandingkan informasi pada situs purbakala di Negara lain yang sejaman, terdapat informasi bahwa perempuan dan anak-anak mendapat bagian pekerjaan yang lebih bersifat pemeliharaan, seperti bercocok tanam, mengolah lahan dan memanen, menguliti binatang buruan, membuat gerabah, menganyam atau menenun.

Menurut penelitian H. Kern tentang bahasa, pada masa menetap inilah mulai dikenal bahasa karena manusia butuh berkomunikasi. Kern berpendapat bahwa Austronesia yang berkembang di nusantara berasal dari daerah di sekitar Campa,

Vietnam dan Kamboja. Pendapatnya ini dikuatkan oleh Heine Geldern melalui penelusuran sebaran beliung persegi.

F.KEPUSTAKAAN

Notosusanto, Nugroho. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia 1*. Jakarta: Balai Pustaka

R.P, Soejono dkk (red). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Zaman Prasejarah di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

R, Soekmono. 1987. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Kanisius

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB III
KERAJAAN MARITIM NUSANTARA



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 3

KERAJAAN MARITIM NUSANTARA

A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.

B. KD : Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam

C. KKD ; Menganalisis teori proses masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu-Buda, dan Islam ke Nusantara

Menjelaskan makna dari isi prasasti yang berunsur maritim kerajaan kerajaan Hindu-Budha di Indonesia

Menghubungkan sistem jaringan perdagangan Nusantara dengan penyebaran Islam di Nusantara

D. Materi

“Indonesia bukan pulau-pulau yang dikelilingi laut, tetapi laut yang ditaburi pulau-pulau” (A.B. Lopian 1929-2012). Pernyataan itu bermakna pentingnya laut sebagai ruang hidup bangsa Indonesia. Dengan demikian laut merupakan system yang mempersatukan wilayah Indonesia. Laut sebagai suatu system jaringan pemersatu kepulauan Indonesia telah dibuktikan oleh pendahulu kita pada masa klasik (Hindu-Buda) yang berlanjut pada masa Islam. Jaringan perniagaan laut yang terbentang dari Aceh hingga Ternate-Tidore merupakan system jaringan yang mengintegrasikan seluruh Bandar-bandar perniagaan kecil dan besar ke dalam jaringan pasar global Asia. Laut melalui jaringan perniagaan merupakan jantung bagi kelangsungan hidup kerajaan-kerajaan maritime Tarumanegara hingga Mataram Islam. Karena laut muncul kerajaan-kerajaan maritime nusantara yang disegani, namun melalui laut pula kerajaan maritime mundur dan berubah menjadi agraris.

1. Jaringan perdagangan

Bukti tertua perdagangan Asia Tenggara terdapat pada naskah kuna India yang menyatakan kayu gaharu dan kayu cendana didatangkan dari Negara asing. Kitab Raghuwamsa karya Kalisada menyebut lavanga (cengkeh) yang didatangkan

dari dvipantara. Wolters mempercayai dvipantara adalah nusantara (Notosusanto 1984:12).

Sumber Cina menyatakan hubungan perdagangan langsung antara nusantara dengan Cina baik menggunakan kapal mereka sendiri maupun menggunakan kapal dagang pada jalur perdagangan India-Cina. Wolters mengatakan berlangsung sejak abad ke-3 tetapi bukti nyata hubungan tercantum dalam laporan perjalanan yang berasal dari abad ke-5. Laporan pendeta agama Buda yaitu Fa Hsien dan Gunavarman. Dalam laporannya Fa Hsien menggambarkan bahwa ia bertolak dari Sri Langka thn 413 melalui laut, bln Mei sampai di Yeh-p'o-t'i yang diartikan sebagai Yawadwipa oleh para peneliti (Notosusanto, 1984: 15).

Sementara penelitian berdasarkan genetika yang dilakukan H. Sudoyo-Supolo dari Lembaga Biologi Molekuler Eijkman mendapati bahwa motif tenun Madagaskar mirip dengan motif tenun Sumba. Alison Crowther dari Universitas Queensland Australia menyebutkan kacang hijau dan padi masuk Madagaskara sekitar 1200 tahun yang lalu. Kesimpulan ini didapat berdasarkan risetnya tentang teknik bercocok tanam dan pengolahan lahan pertanian. Peneliti dari Lembaga Eijkman yang lain Pradiptajati Kusuma melakukan pelacakan DNA autosomal terhadap komunitas Dayak Ma'ayan dan membandingkan dengan populasi di Madagaskar. Meskipun hasil penelitian menunjukkan tidak ada hubungan antara kedua komunitas masyarakat tersebut, bukti lain menunjukkan bahwa nenek moyang orang-orang Madagaskar adalah orang-orang Nusantara dengan beragam suku sehingga jejak genetiknya menjadi kompleks yaitu terdapat jejak orang Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan bahkan Nusatenggara dan Bajau (suku laut nusantara) (Kompas, Senin 4 Juli 2016)

Ahli genetika Selandia Baru Murray Cox (2012) melalui penelitian DNA mitokondria menyatakan kolonisasi awal di Madagaskar dilakukan kelompok kecil perempuan Indonesia secara tidak sengaja. Namun demikian Pradipta melalui pengamatan pola periode migrasi menyimpulkan bahwa migrasi ke Madagaskar dilakukan pada era kejayaan Sriwijaya sekitar 1000-1400 tahun yang lalu bersamaan dengan peningkatan kegiatan perdagangan kerajaan tersebut

(Kompas, Senin 4 Juli 2016). Keberadaan jejak Nusantara di Madagaskar membuktikan kemampuan penguasaan ilmu pelayaran oleh orang-orang Nusantara. Keberadaan armada maritime dua kerajaan besar Sriwijaya (abad ke-7) dan Majapahit (abad ke-13-16) adalah bukti nyata bahwa orientasi peradaban nusantara adalah maritime. Pasang surut dominasi kerajaan di nusantara tidak mengubah orientasi hidup mereka yaitu lautan, dan tradisi bahari itu terus berlanjut sampai abad ke-16 ketika orang-orang Eropa muncul di perairan nusantara dan perlahan-lahan menguasai perairan nusantara melalui serangkaian kebijakan pemaksaan dan kekerasan.

2. Kerajaan Maritim Hindu-Buda

Nama Sriwijaya diperoleh dari pembacaan Kern pada tahun 1913 atas prasasti Kota Kapur dari pulau Bangka. Namun pada awalnya nama Sriwijaya bukanlah nama kota/tempat tetapi dipublikasikan sebagai nama raja oleh Kern. Adalah G. Coedes pada tahun 1918 berdasarkan pembacaan atas prasasti dan membandingkannya dengan sumber Cina maka dia berkesimpulan bahwa Sriwijaya adalah nama sebuah kerajaan di Sumatra Selatan dan berpusat di Palembang. Dalam berita Cina Sriwijaya dikenal dengan She-li-fo-she (Notosusanto, 1984: 53)

Keberadaan Sriwijaya sebagai kerajaan maritime dibuktikan dengan pembacaan atas prasasti Kedukan Bukit bertahun 682 M yang berisi tentang pengiriman armada perang dengan perahu untuk menaklukkan suatu wilayah. Krom, Moens dan Porbatjaraka sepakat bahwa isi prasasti tersebut merupakan peringatan kemenangan Sriwijaya atas ekspedisi menaklukkan Melayu. Boechari melengkapi pernyataan terdahulu tersebut dengan keberhasilan pembacaan bahwa untuk memperingati kemenangan itu akan didirikan ibukota baru (Notosusanto, 1984: 56)

Prasasti Kota Kapur (28 April 686 M) lebih lanjut memberitakan adanya usaha dari Sriwijaya untuk menaklukkan Jawa karena Jawa tidak mau mengakui keberadaan Sriwijaya. Coedes berpendapat prasasti itu dibuat ketika Sriwijaya akan berangkat berperang dengan Jawa. Kerajaan Jawa sasaran penyerangan adalah Tarumanegara, hal itu dibuktikan dengan tidak adanya laporan utusan

Taruma menghadap kaisar Cina pada tahun 699. Lenyapnya Taruma diperkuat dengan keberadaan prasasti Juru Pangambat dari Jawa Barat dan prasasti Gondosuli dari Kedu Jawa Tengah (Notosusanto, 1984: 58). Berdasarkan berita dari prasasti-prasasti tersebut terbukti bahwa Sriwijaya melakukan perluasan wilayah kekuasaan serta berusaha “mematikan” kekuatan yang menjadi pesaing pelayaran dan perdagangannya yaitu Jawa

Dengan penguasaan atas wilayah-wilayah di sekitar selat Malaka maka Sriwijaya menguasai jalur pelayaran perdagangan utama pada masa itu yaitu selat Malaka. Armada laut Sriwijaya tidak hanya menjaga perairan selat Malaka dari kejahatan perompak terhadap kapal dagang tetapi juga dapat “memaksa” kapal-kapal dagang asing (cina, India, Arab) untuk singgah di Bandar Sriwijaya. Sriwijaya memperoleh keuntungan yang sangat besar dari bea cukai yang harus dibayar oleh kapal-kapal asing serta keuntungan dari perdagangan. Keuntungan perdagangan yang diperoleh Sriwijaya juga karena Sriwijaya dapat menghadirkan komoditi dagang yang memiliki nilai ekonomi tinggi seperti penyu, gading, emas, perak, kemenyan, kapur barus, dammar dan lada, sementara komoditi impor yang diperdagangkan adalah porselen, kain katun dan kain sutra.

Kebesaran Sriwijaya dinyatakan pada prasasti Ligor yang ditemukan di Tanah Semenanjung Melayu. Prasasti Ligor A (bagian depan) berangka tahun 775 M memuat pernyataan pembangunan trisamaya caitya untuk Padmapani, Sakyamuni dan Vajrapani. Kemudian di Nalanda Negara bagian Bihar India ditemukan prasasti yang berasal dari abad ke-9 dan dikenal dengan prasasti Nalanda. Prasasti itu berisi tentang pembangunan vihara Buda di Nalanda oleh Balaputradewa. Prasasti itu juga menyebutkan bahwa kakek Balaputradewa adalah raja Jawa. Sementara menurut sumber Arab dan Persia pada tahun 844-848 M raja Zabag disebut maharaja dan memiliki kekuasaan meliputi pulau-pulau di lautan timur (Notosusanto, 1984: 64-67).

Riwayat Majapahit dimulai pada masa pemerintahan raja Kertanegara dari Kerajaan Singhasari. Kertanegara adalah raja Singhasari terakhir dan terbesar. Pada masa kekuasaannya Singhasari merupakan kerajaan maritime yang sangat kuat dan disegani. Kitab Negarakertagama membritakan tentang kebijakan

politiknya khususnya politik luar negeri dengan rinci. Untuk memperkuat kedudukan dan pengaruh Singhasari Kertanegara memberlakukan kebijakan politik yang dinamakan cakrawala mandala, yaitu perluasan wilayah (pengaruh) ke luar Jawa yang meliputi seluruh daerah dwipantara.

Realisasi kebijakan politik tersebut dengan memadamkan pemberontakan yang terjadi di dalam kerajaannya yaitu pemberontakan Kalana Bhaya pada 1270. Lima tahun kemudian yaitu pada 1275 Kertanegara melancarkan ekspedisi untuk menaklukkan kerajaan Melayu. Tahun 1280 sekali lagi Kertanegara harus menghadapi pemberontakan Mahisa Rangkah menyusul peneklukan Bali pada tahun 1284. Raja Bali yang dikalahkan dibawa ke Singhasari sebagai tawanan. Negarakertagama menyebutkan wilayah yang ditaklukkan berikutnya adalah Pahang, seluruh Melayu, seluruh Gurun, seluruh Bakulapura, dan seluruh Jawa dan Madura. Pernyataan Negarakertagama dikuatkan oleh prasasti yang dituliskan pada bagian belakang arca Camundi yang ditemukan di desa Ardimulyo Singosari Malang dengan angka tahun 1292. Prasasti lain yang membuktikan keberadaan ekspedisi penaklukan Melayu adalah prasasti yang dituliskan pada alas arca Amoghapasa dari Padangroco dan berangka tahun 1286 (Notosusanto, 1984: 411-413)

Luas dan kuatnya pengaruh Singhasari di Asia Tenggara mendapat perhatian dari kerajaan Cina. Cina merasa tersaingi dan perlu mengirim utusan untuk meyakinkan bahwa Cina masih yang dipertuan dari raja-raja di wilayah bawahannya (Asia Tenggara). Khubilai Khan segera mengirim utusan ke seluruh kerajaan-kerajaan di Asia Tenggara tidak terkecuali Singhasari. Utusan Khubilai Khan tiba di Singhasari pada 1280 dan 1281 membawa pesan agar raja Singhasari mengirim seorang pangeran ke Cina sebagai tanda pengakuan atas pengaruh dan kekuasaan Cina. Tahun 1289 datang lagi utusan dari Cina yaitu Meng-Chi untuk sekali lagi meminta Singhasari mengakui kekuasaan Cina atas kerajaan tersebut, Kertanegara tetap menolak dan sebagai bukti keseriusannya utusan Cina tersebut dilukai wajahnya.

Namun demikian akhir kerajaan Singhasari tidak karena serangan Cina yang tersinggung karena sikap Kertanegara, keruntuhan Singhasari justru akibat

pemberontakan di dalam negeri yang dilakukan oleh Jayakatwang pada 1292. Singhasari kemudian diperintah oleh Jayakatwang sampai datangnya pasukan Cina yang datang untuk memaksa Singhasari mengakui kekaisaran Cina sebagai yang dipertuan. Raden Wijaya menantu Kertanegara menggunakan kesempatan tersebut untuk balas menyerang Jayakatwang. Dengan kekalahan Jayakatwang berakhirlah era Singhasari dan era Majapahit dimulai.

Majapahit sebagai penerus kerajaan Singhasari terletak lebih ke pesisir apabila dibandingkan Singhasari. Majapahit terletak di Tarik (Trowulan-Mojokerto sekarang) sebuah desa di tepi sungai Brantas. Masa awal Majapahit dibawah R. Wijaya yang bergelar Kertarajasa Jayawarddhana adalah masa konsolidasi. Akibat runtuhnya Singasari Kertarajasa harus menghadapi berbagai anasir yang mencoba untuk merebut kekuasaannya. Banyak gerakan pemembrontakan yang harus dihadapi untuk menegakkan kekuasaan dan wibawa kerajaan baru tersebut.

Kondisi politik Majapahit mulai reda sejak pemerintahan Tribhuwanatunggadewi Jayawisnuwardhani dengan Gajah Mada sebagai kepala bayangkara. Negaraker tagama memberitakan bahwa Gajah Mada berhasil memadamkan pemberontakan di Sadeng dan Keta tahun 1331. Selanjutnya Pararaton memberitakan bahwa Gajah Mada mengangkat sumpah bahwa ia tidak akan amukti palapa sebelum dapat menundukkan nusantara yaitu Seran, Dampo, Bali, Sunda, Palembang, dan Tumasik (Notosusanto, 1984: 434). Sumpah Gajah Mada dibuktikan oleh kesaksian pedagang Cina Wang Ta-yuan yang membukukan catatan perjalanannya dalam Tao-ichih-lueh. WW Rockhill mengidentifikasi bahwa buku itu ditulis sekitar tahun 1349. Buku tersebut melukiskan kondisi alam dan penduduk She-p'o (Jawa), dengan komoditi utama padi, lada, garam, kain, dan burung kakak tua. Komoditi dari luar Jawa adalah mutiara, emas, perak, sutra, barang keramik dan barang-barang dari besi. Diberitakan juga bahwa daerah-daerah di Malaysia, Sumatra, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, serta beberapa wilayah Indonesia bagian timur mengakui kedaulatan She-p'o.



Gambar wilayah pengaruh dan kekuasaan Majapahit (oediku.wordpress.com)

Majapahit mencapai jaman keemasannya pada masa raja Hayam Wuruk. Raja Hayam Wuruk didampingi Patih Amangkubumi Gajah Mada berusaha mewujudkan cita-cita politik nusantara. Prapanca dalam Negarakertagama menuliskan bahwa wilayah kekuasaan dan pengaruh Majapahit hamper seluas Indonesia sekarang, meliputi daerah dari Sumatra sampai Maluku dan Irian di bagian timur, bahkan meluas sampai di Negara tetangga di Asia Tenggara. Namun demikian politik nusantara ini berakhir pada 1357 dengan kasus di Bubat. Kesalahpahaman antara Raja dan Patih Amangkubumi membawa malapetaka terjadinya perang Bubat dengan akhir tragis. Akibat peristiwa itu Gajah Mada akhirnya mukti palapa (mengundurkan diri) dari jabatannya (Notosusanto, 1984: 436-437). Para raja berikutnya pengganti Hayam Wuruk bukanlah raja-raja yang cukup kuat, sehingga pada masa pemerintahan mereka perlahan-lahan Majapahit mulai mundur. Pada saat yang sama Islam sebagai “kendaraan” politik mulai diusung oleh raja-raja pesisir untuk menghadapi dominasi Majapahit

3. Kerajaan maritime Islam

Ekspedisi “penghukuman” raja Jawa dibawah pimpinan Laksamana Cheng Ho bukan semata-mata untuk tetap menjaga pengaruh dan dominasi Cina di “rute dagang selatan” tetapi sekaligus untuk menjamin bahwa perdagangan wilayah selatan dikuasai oleh para pedagang muslim. Sejak abad ke-14 pedagang Cina muslim telah mendominasi distribusi perdagangan antara Cina India. Pada saat yang sama India berada dibawah kekuasaan kesultanan Delhi Utara yang muslim (Muhammad bin Tughluk 1325-1351). Muncul kesultanan-kesultanan baru di

pesisir seperti Benggali dibawah Ahmad Syah (1411-1441) dan Gujarat dibawah Mahmud Baikara (1458-1511) yang terus berkembang dan menjadi pusat perdagangan baru. Sementara pantai-pantai Malabar telah berada dibawah kekuasaan para pedagang dari masyarakat Mappila yang muslim dan melayni perdagangan dengan Arab, Ormuz dan Maladewa (Lombard, 1996: 30-31).

Samudra Hindia yang berada pada jalur perniagaan laut antara Laut Tengah dan Laut Cina otomatis terintegrasi dan setiap perubahan yang terjadi di salah satu wilayah akan berpengaruh terhadap jaringan lautan nusantara. Ibnu Batuta dalam perjalanannya ke India dan Cina mendeskripsikan wilayah, masyarakat dan pemerintahan dimana ia singgah. Ia berkelana dengan menumpang kapal-kapal dagang yang semuanya diawaki oleh orang-orang muslim dan dimiliki para saudagar muslim Cina, ia pernah menumpang jung milik raja Zahir dari Samudra Pasai (Lombard, 1994: 31).

Abad ke-14 periaran Asia Tenggara menjadi saksi lahirnya kapitalis-kapitalis baru dengan harta kekayaan berupa modal bergerak, suatu hal baru yang tidak ada pada masa sebelumnya. Kelompok elite sosial baru terbentuk yaitu para saudagar yang tinggal dan menetap di pesisir lautan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Kota-kota pelabuhan sekaligus kota perdagangan tumbuh menjadi pusat peradaban baru yang terbuka dan komopolitan. Struktur politik baru ini muncul pertama kali di Sumatra dengan Samudra Pasai menyusul Jawa dan wilayah-wilayah lain yang lebih timur. Semua itu dimungkinkan dengan perkembangan perniagaan laut yang makin bergerak ke timur periaran nusantara. Keberadaaan peradaban muslim nusantara di Sumatra dibuktikan dengan temuan arkeologis berupa makam Malik al Salih yangbberangka tahun 1297, makam Malik al Zahir (1326) dan emapt buah prasasti yang berasal dari abad ke-14. Bukti arkeologi itu menguatkan kisah Marco Polo dan Ibnu Batuta yang mngatakan bahwa terdapat kesultanan yang cukup penting di wilayah barat Nusantara (Lombard, 1994: 32)



Peta jalur perdagangan nusantara (www.mikirbae.com)

Di Jawa bukti keberadaan komunitas muslim dibuktikan dengan temuan arkeologis batu prasasti Loran yang berasal dari abad ke-11 serta makam Maulana Malik Ibrahim (1419) yang diduga pedagang Gujarat dan dimakamkan di Gresik. Suatu hal yang menarik bahwa di kota raja Majapahit yang notabene Hindi-Buda terdapat makam Islam (komp. Pemakaman Tralaya) kuno yang sampai sekarang masih bisa kita amati. L.Ch. Damais berdasarkan teks yang tertera pada makam tersebut menyatakan bahwa ada tiga makam berasal dari abad ke-14 (1376, 1380), dan delapan makam berasal dari abad ke-15 (1407 dan 1475) dengan satu makam khusus yang dianggap sebagai makam Putri Campa dan berangka tahun 1448/9 M (Lombard, 1994: 34)

Setelah Sumatra meredup maka Jawa mulai tampil sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan baru. Dimulai dari kota perniagaan kecil sebagai tempat singgah, Demak lambat laun berkembang menjadi pusat perniagaan laut. Tome Pires menggambarkan bahwa kota itu (Demak) banyak didatangi para pedagang asing yaitu orang Parsi, Arab, Gujarat, Bengali, Melayu dan bangsa-bangsa lain dan banyak diantara mereka adalah orang Moro (Islam). Mereka kaya karena berdagang dengan negeri Jawa dan mulai membangun masjid, mendatangkan pemimpin agama dari tempat lain sehingga jumlah mereka menjadi banyak dan keturunannya menjadi "jawa". Pires menggambarkan pemimpin-pemimpin pribumi yang masih kafir (Hindu-Buda) kemudian masuk Islam dan dengan cara demikian "orang asing" masuk ke dalam kekuasaan Jawa. Dengan cara demikian maka terjadi akulturasi budaya. Penguasa-penguasa berikut meskipun merupakan keturunan Cina, Parsi, Keling dan bangsa-bangsa lain

kemudian menjadi “jawa” dan hidup dengan tata cara Jawa karena mereka mewarisi kekayaan pendahulu mereka. Kelompok ini dianggap lebih penting dan lebih mulia dari orang Jawa pedalaman, dan dalam hal demikian nampaknya orang-orang Cina muslim menduduki tempat teratas.

Dominasi Islam dapat ditelusuri pada tingkat sosial dan politik kesultanan-kesultanan di nusantara mulai dari Aceh sampai Ternate-Tidore pada abad ke-16,17 dan 18. Agama menjadi ikatan dan merupakan cirri khas perniagaan dan pelayaran sehingga menuntun untuk mengunjungi pelabuhan-pelabuhan yang “sekomunitas agama”. Inilah yang mendorong majunya pelabuhan-pelabuhan nusantara menjadi Bandar besar dan mempunyai pengaruh politik.

Demak dibawah pemerintahan R. Patah mulai menunjukkan pengaruhnya baik dalam bidang perniagaan maupun politik. Bentang alam dengan gunung Muria di lepas pantai Jawa membentuk pelabuhan alam aman dari hempasan gelombang laut sehingga menjadi tempat ideal untuk singgah kapal-kapal dagang. Pada masa Trenggana (1504-1546) Demak tidak hanya menjadi pusat perniagaan tetapi juga politik dan keagamaan. Demak dikelilingi kota-kota lain yang menunjang perniagaan besar yaitu Juwana, Pati, Rembang, Kudus dan Jepara. Selain penyedia komoditi dagang utama beras kota-kota itu juga dikenal sebagai tempat untuk membuat dan memperbaiki kapal. Dari tempat-tempat itu terutama Rembang dan Jepara armada perang Demak berasal. Hal tersebut sangat dimungkinkan dengan dukungan hutan jati di wilayah pedalaman Jawa

Banten pada abad ke-16 seperti yang diberitakan Pires merupakan pelabuhan perniagaan penting di Jawa Barat. Sultan Hasanuddin (1552-1570) dan anaknya Sultan Yusuf (1579) memperluas dan mengembangkan perkebunan lada yang menjadi komoditas andalan dan sumber kekayaan Banten. Abad ke-16 sampai awal abad ke-17 Banten merupakan kota cosmopolitan. Lukisan tentang Banten dibukukan dengan judul Voyage oleh Pyrand de Laval tahun 1609. Pyrand menggambarkan Banten sebagai kota yang padat penduduk, dengan tembok bata mengelilingi kota, rumah-rumah yang besar, terdapat lima lapangan luas (alun-alun?) yang setiap hari berfungsi sebagai pasar segala macam barang dagangan, di luar tembok adalah pemukiman orang asing. Dalam hal perdagangan Pyrand

menggambarkan Banten dikunjungi banyak bangsa karena di Banten terjadi transaksi dagang dengan segala macam bangsa, baik orang nasranai, orang India, orang Arab, Gujarat, Malabar, Bengali dan Malaka yang utamanya datang untuk lada yang melimpah. Orng-orang Cina Nampak mendominasi perdagangan dengan sembilan atau sepuluh kapal besar yang dimuati dengan kain sutra, kain katun, emas, porselen, minyak kasturi dan beragam barang lainnya dari negri Cina (Lombard. 1994: 55-56)

Kejayaan imperium Islam pesisiran tidak bertahan lama. Munculnya orang-orang Eropa dengan motivasi utama mencari kekayaan sebanyak-banyaknya dan semurah mungkin merusak system perdagangan bebas yang telah berkembang sejak masa Hindu-Buda. Ketidakmampuan orang-orang Eropa bersaing di pasar bebas Asia dengan system perdagangan bebas Asia membuat orang Eropa menempuh jalur kekerasan dan pemaksaan untuk menguasai dan mengambilalih pusat-pusat perniagaan. Lambat laun system perniagaan Asia mengalami kemunduran dengan semakin banyaknya bangsa Eropa masuk Asia dan menaklukkan kerajaan-kerajaan bangsa Asia.

E. KEPUSTAKAAN

Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Mizan

Chaudhuri, K.N. 1989. *Trade and Civilisation in The Indian Ocean*. NY: Cambridge

Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya Bagian II: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia

Notosusanto, Nugroho. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Gramedia

_____. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Gramedia

Zuhdi, Susanto. 2014. *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Jakarta: Komunitas Bambu

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB IV
ABAD PELAYARAN SAMUDRA



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 4

ABAD PELAYARAN SAMUDRA

- A. KI :Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam
- C. KKD : Menganalisis latar belakang munculnya pelayaran samudera bangsa Barat ke dunia timur
Menganalisa pemikiran-pemikiran yang melahirkan Revolusi Industri di Eropa
- D. Materi

1. Pendahuluan

Pada umumnya yang disebut bangsa Eropa yaitu bangsa-bangsa yang mendiami Wilayah di Eropa Barat dan memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh masyarakat dunia secara umum. Kemampuan itu telah diwarisi dari peradaban Yunani Kuno yaitu kemampuan mengabstraksi, memiliki kebebasan sikap untuk mengadakan pengamatan serta berani menentang alam dan tidak tergantung pada alam. Mungkin faktor inilah yang menjadi penyebab mengapa bangsa- bangsa Eropa Barat khususnya sepanjang sejarah memiliki peranan yang sangat penting dalam mengubah dunia.

Penemuan daerah-daerah baru dalam usaha penjelajahan,menjadi perangsang bagi bangsa-bangsa Eropa khususnya Eropa Barat. Pertama-tama dilakukan oleh bangsa Portugis dengan diketemukannya bagian yang ujung paling selatan dari Benua Afrika oleh Bartolomeus Diaz yang kemudian diberi nama tanjun harapan. Penemuan ini merupakan suatu rintisan yang membuka jalan menghubungkan dengan dunia timur. Kepercayaan akan teori dan berkembangnya paham Rasionalisme, para ekspedisi penjelajah samudra semakin bergairah, terutama setelah diketemukan daerah-daerah baru dan Benua baru. Bangsa-bangsa Eropa berlomba mencari sumber perdagangan dan tambang emas, untuk mendapatkan keuntungan yang sebanyak-banyaknya. Pada saat itu masing-masing negara di Eropa berusaha mengembangkan merkantilisme dalam dunia perdagangan.

Eksplorasi ekonomi dan kondisi negara-negara jajahan merupakan ciri-ciri kolonialisme. Semua hasil bumi yang laku di Eropa dikuras termasuk emasm, daging

dijadikan alat tukar. Di tanah jajahan kolonial mengundang para partikelir untuk menanamkan modalnya di lahan-lahan perkebunan. Orang-orang Eropa mejadi semakin rakus akan kekayaan sumber alam dan hasil bumi. Perdagangan menjadi semakin sibuk akan perdagangan budak. Pemasaran tenaga kerja di perkebunan maupun di pertambangan membutuhkan tenaga manusia yang dipekerjakan sebagai budak

2. Usaha Penemuan Dunia Baru

Jaman Renaissance merupakan awal kebangkitan para pemikir Eropa. Para pemikir ingin mengembalikan kejayaan, peradaban dan kebudayaan jaman Yunani dan Romawi Kuno. Pada masa itu para ahli pemikir filsafat, politik, hukum dan ilmu Humanitis berkembang pesat. Masyarakat dan negara menghormati kebebasan. Peradaban ini lenyap setelah terjadi serbuan bangsa barbar ke Eropa dan seluruh kawasan Eropa mengalami masa kegelapan. Setelah abad pertengahan terjadi perubahan dan masyarakat Eropa mengalami jaman pencerahan. Pada saat itu mereka baru sadar betapa pentingnya ilmu pengetahuan. Dengan ilmu pengetahuan manusia dapat merubah dunia. Hasil pemikiran Plato, Aristoteles, Virgilius, Ovidius dan Cicero, mulai ditelaah kembali. Pada masa itu dirasakan adanya kebutuhan yang mendesak yaitu tentang pendidikan yang lebih praktis (Gay, 1982: 12).

Study Humanitis semakin berkembang di Eropa untuk memenuhi kebutuhan akan pengetahuan filsafat, politik dan hukum serta kegunaan ilmu sejarah. Demikian pula ilmu-ilmu yang lain seperti Astronomi, Fisika, Matematika, serta ilmu pengetahuan alam selalu didasarkan pada pencarian fakta. Kaum Humanitis telah melahirkan revolusi pemikiran, artinya adalah berfikir sistimatis dan logis, bersikap positif, beretos kerja yang tinggi dan disiplin, selalu menghargai waktu, tidak tergantung pada alam, tetapi mampu menguasai dan merubahnya (Soebantardjo, tt)

Gerakan intelektual ingin mendobrak ikatan lama yang berupa tradisi adat dan budaya filsafat, teologi memegang peran penting dalam peri kehidupan masyarakat Eropa. Kebebasan berfikir dibidang ilmu pengetahuan baik dibidang filsafat, ekonomi, politik, sosial dan hukum menghasilkan penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan.

Berdasarkan ilmu pengetahuan dan kisah-kisah perjalanan ke dunia Timur itu menjadi faktor pendorong, disamping itu pula adanya faktor kebutuhan akan daya hidup dalam usaha mengatasi tantangan alam musim dingin yang ganas. Ilmu pengetahuan menghasilkan suatu karya cipta dan ketrampilan manusia untuk membuat kapal-kapal besar memiliki keseimbangan dan mampu mengatasi gelombang besar di laut. Teknologi pembuatan kapal besar (jung) ini telah mendorong semangat para pelaut yang dipelopori oleh bangsa Portugis Bartholomeus Diaz berhasil mencapai Tanjung Harapan di ujung Afrika Selatan pada tahun 1436.

Mengingat keberhasilan bangsa Spanyol dalam mengarungi lautan Atlantik sehingga menemukan Benua Baru yang disebut Benua Amerika, maka bangsa Portugis semakin giat melakukan penelitian dengan mengirimkan ekspedisinya yang dipimpin oleh pelaut Vasco de Gama, berhasil mendarat di Calikut pantai Malabar di India Barat bagian selatan pada tahun 1498.

Perjanjian Tordesilas membagi dunia ini menjadi dua sebagai hak kepemilikan. Penentuan bagian yang didasarkan pada ketentuan garis vertikal yaitu pada $46^{\circ} 37'$ BB. Dengan perjanjian itu tidak berarti persaingan perebutan wilayah baru berakhir. Kebebasan berfikir telah mendorong orang untuk menentang dan tidak patuh pada keputusan gereja. Kerajaan-kerajaan Eropa melakukan protes bahwa dunia bukan hanya milik Spanyol dan Portugis saja, tetapi semua bangsa negara di Eropa berhak pula melakukan penjelajahan berdagang serta memiliki daerah-daerah baru yang diketemukan.



Gambar penjelajahan samudra oleh bangsa Portugis dan Spanyol (anyunz.blog.com)

Sejak saat itu negara-negara yang kuat ekonominya karena memiliki cadangan emas yang banyak sebagai alat tukar, mulai ikut campur dalam masalah ekonomi. Kekuasaan negara sangat menentukan dalam sistem perekonomian. Sistem ini di kenal dengan sebutan sistem Merkantilisme. Agar persediaan logam mulia semakin bertambah dan menjadi kas kekeyaan negara. Maka negara-negara tersebut disamping melakukan persaingan yang sangat ketat, juga melakukan monopoli. Membuat neraca perdagangan harus tetap positif artinya negara itu harus memperbesar ekspor (menjual hasil yang diperoleh dari Asiamaupun Amerika serta mengurangi/memperkecil import, karena barang yang diimport menjadi semakin langka dan semakin mahal.

Negara yang melakukan Merkantilisme adalah Perancis kemudian disebut Colbertisme. Kebijakan ekonominya, dilakukan dengan cara mengeluarkan peraturan larangan ekspor gandum, memperbesar pasar di tanah jajahan, memajukan industri nasional, mendirikan persekutuan dagang, dan memasukan alat tukar (Emas) sebagai pembayaran yang sah (Soebantardjo,: 36).

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul: "An Inquiry Into The Nature and Causes of The Wealth of Nation" atau lebih dikenal dengan *Wealth of Nation* mengembangkan gagasan liberalisme dalam bidang ekonomi. Liberalisme ini ternyata tidak hanya berpengaruh di bidang ekonomi saja, tetapi meliputi seluruh aspek kehidupan manusia terutama pada aspek politik ketata negaraan . Sejak saat itu orang mulai berfikir tentang perubahan. Inggris mulai mengobarkan Revolusi Industri, Amerika menentang penjajahan dan mencetuskan perang kemerdekaan, Perancis menentang feodalisme dan mengumumkan Revolusi, serta di ikuti oleh negara dengan Revolusi Komunis.

3. Revolusi Industri

a. Perkembangan Ilmu dan Revolusi Industri

Kemajuan ilmu itu erat hubungannya dengan penemuan alat-alat baru seperti kompas, teleskop dan mikroskop. Dengan alat itu para ahli dapat meneliti alam raya dan alam sekitar dengan teliti dan cermat. Di berbagai kota besar di Eropa seperti Paris dan London

berdiri pusat perkembangan ilmu. Para ahli mengadakan kegiatan penelitian dan menulis buku-buku dasar ilmu. Ensiklopedi yang mencatat berbagai konsep dan istilah tentang ilmu juga dikerjakan.

Diantara negara-negara Eropa, maka Inggris menjadi pelopor untuk memajukan ilmu. Pada tahun 1662 di London sudah didirikan suatu perhimpunan untuk memajukan ilmu. Tiap tahun perhimpunan itu memberi hadiah kepada penemuan yang penting. Ilmu-ilmu mendapat dorongan untuk maju. Dimana-mana berdiri lembaga dan akademi yang mempelajari berbagai cabang ilmu.

Kemajuan ilmu alam membawa kemajuan pada bidang industri. Hasil penemuan yang diperoleh dari ilmu itu dipergunakan untuk berbagai keperluan hidup. Timbullah perkembangan teknologi yaitu berbagai cara yang diperlukan untuk memajukan kehidupan manusia yang beraneka ragam itu.

b. Revolusi Industri di Inggris

Revolusi industri di Inggris terjadi sesudah tahun 1780, tetapi sebab-sebab timbulnya revolusi itu sudah berjalan jauh sebelumnya. Antara keadaan politik atau kenegaraan di Inggris dengan revolusi industri, terdapat hubungan walaupun tidak secara langsung. Di tanah Inggris antara abad ke-16 dan 17 terjadi perubahan politik yang besar. Perang mawar antara keluarga bangsawan kuno melawan bangsawan baru telah berkobar yang dimenangkan oleh keluarga bangsawan baru. Berlainan dengan keluarga bangsawan kuno, maka keluarga bangsawan baru yang berkuasa ini terdiri dari bangsawan rendah, petani dan pedagang yang sudah menjadi kaya. Mereka memiliki modal dan berusaha keras untuk memperkuat ekonominya. Sejak itu Inggris diperintah oleh orang-orang yang mementingkan kemajuan ekonomi daripada sekedar kemasyhuran nama dan tradisi

Pada abad ke-18 masyarakat Inggris meningkatkan kekayaannya, terutama sekali para pengusaha, pedagang dan parapemilik bank. Usaha pelayaran dan perdagangan mengalami kemajuan pesat, sehingga terkumpul banyak modal yang dapat dimanfaatkan untuk perkembangan ekonomi.

Sementara itu di negeri Inggris sendirisebelumnya telah terjadi revolusi sosial-ekonomi yang dinamakan *Revolusi Agraria*. Revolusi ini berupa pengaturan kembali tanah pertanian Inggris. Dahulu daerah pertanian di Inggris itu sepertiganya menjadi pemilik para bangsawan atau tuan tanah. Letak tanah para bangsawan itu tersebar di antara daerah pertanian milik petani. Daerah pertanian milik para petani ini walaupun cukup luas, tetapi dimiliki oleh banyak petani, sehingga tiap petani itu sebenarnya hanya memiliki tanah yang sempit.

Sementara itu kerajinan bulu domba di Inggris makin berkembang pesat, karena kebutuhan akan wol meningkat. Dunia usaha bulu domba menjadi makin menarik. Karena itu para bangsawan mengadakan perubahan peraturan tanah. Peraturan itu menata kembali status dan kedaan tanah pertanian. Tanah para bangsawan yang tersebar itu dikumpulkan dengan cara menukar-nukar dengan tanah para petani, sehingga menjadi satu daerah yang luas. Sudah barang tentu banyak petani yang terpaksa berpindah atau diusir dari daerahnya. Bahkan banyak pula yang kehilangan tanahnya, kemudian tanah yang sudah terkumpul itu dipagari (*enclosure*) menjadi satu tanah lapang yang luas untuk dijadikan lapangan peternakan domba. Para bangsawan dan tuan tanah mulai mengusahakan industri bulu domba.

Bagaimana dengan nasib para petani yang menjadi miskin karena tanahnya hilang atau menjadi sempit? Masih beruntung, karena waktu itu Inggris sedang mengalami kemakmuran dan usaha industrialisasi sedang dipergiat, maka berbondong-bondonglah para petani miskin itu ke kota-kota untuk bekerja sebagai buruh pada pabrik-pabrik yang baru berdiri.

Sikap dan tindakan manusia yang selalu ingin mencapai perbaikan dan kemajuan di dalam hidupnya, adalah perbuatan budaya. Ilmu merupakan bagian penting dari budaya. Di negeri Inggris sejak zaman *renaissance* sudah tampak banyak perhatian terhadap ilmu. Pada abad ke-17 sudah berdiri suatu perhimpunan di kota London, untuk memajukan ilmu terutama matematika dan fisika. Masyarakat dan pemerintahan Inggris membantu kegiatan penelitian ilmu itu. Di mana-mana berdiri akademi dan lembaga untuk memajukan ilmu.

Penelitian ilmiah, kegiatan percobaan untuk membuat alat kerja baru dan pembangunan manufaktur serta pabrik tentu membutuhkan biaya yang banyak. Beruntung sekali, pelayaran dan perdagangan Inggris pada zaman itu berkembang dengan baik, sehingga terdapat modal yang besar. Disamping itu masyarakat Inggris terkenal mentaati moral agama mereka yang menganjurkan supaya tiap manusia bekerja keras dan hidup hemat, cermat dan sederhana. Sikap demikian menyebabkan berkumpulnya modal yang kemudian dimanfaatkan untuk kemajuan ekonomi. Kecuali tersedia modal berupa uang, kekayaan dan kepandaian. Tanah Inggris mengandung batu bara dan bijih besi yang amat penting bagi tumbuhnya industri baja yang diperlukan untuk membuat mesin dan membangun pabrik. Kesemuanya itu merupakan faktor yang amat menguntungkan bagi terjadinya revolusi industri negeri Inggris.

Revolusi Industri ialah perubahan, perombakan dan pembaharuan secara radikal dan cepat pada bidang penanganan industri dan teknik yang terjadi di Eropa, terutama di Inggris pada abad ke-18. Revolusi industri juga banyak terjadi di negara Eropa, tetapi kecepatannya dan pada saat mulainya tidak sama. Selama setengah abad, Inggris mendahului negara-negara lain. Di Inggris mula-mula terjadi industrialisasi, kemudian diikuti negara-negara lain di Eropa, Amerika Serikat dan Jepang.

Bermunculan pusat-pusat industri seperti Lancashire, Manchester, Liverpool, Birmingham dan lain-lain. Kota-kota tersebut menunjukkan kemegahan industri yang modern dan berhasil, tetapi juga menggambarkan kota yang kotor dan tidak sehat. Kota industri yang paling tidak sehat adalah Man Chester. Di kota yang penuh cerobong dengan asap yang mengotori udara itu, berkumpul massa manusia buruh yang miskin dan hidup jauh dari persyaratan kesehatan.

Tetapi disamping kemajuan yang menggembirakan itu terdapat pula kesedihan, terutama pada massa permulaan revolusi industri. Berdirinya pabrik dengan mesin yang cukup dilayani oleh sedikit orang menyebabkan banyak pekerja tangan yang berkurang sumber penghasilannya. Lagi pula para pemilik pabrik lebih senang memperkerjakan buruh wanita dan kanak-kanak, karena upahnya lebih kecil dan mereka lebih penurut. Pada masa permulaan revolusi industri nasib para pekerja pabrik-pabrik itu menyedihkan. Mereka harus bekerja dalam waktu yang lama. Dalam sehari mereka bekerja tidak kerang

dari 12 jam. Tempat kerjanya serba menyedihkan. Upah mereka kecil dan mereka hidup dalam suasana yang penuh kemiskinan. Perumahan dan kesehatannya tidak terjamin.

c. Perkembangan Industri di Negara-negara Lain

Revolusi industri mula-mula terjadi di Inggris, kemudian berbagai negara di dunia menjalankan pula industrialisasi. Sesudah Inggris diikuti oleh Perancis. Pada zaman Napoleon Bonaparte dasar-dasar industri Perancis sudah digarap, mengingat waktu itu Perancis sedang berperang melawan Inggris yang sudah tentu membutuhkan industri yang kuat sebagai tulang punggung ekonomi negara. Namun barulah pada zaman Napoleon III Perancis menjalankan industrialisasi secara mantap. Untuk memajukan industri di negaranya, Napoleon III menyelenggarakan Pekan Raya Internasional seperti halnya di Inggris. Meskipun demikian Perancis tetap merupakan negara industri yang berhubungan dengan pertanian.

Negara Jerman sangat memanfaatkan ilmu kimia untuk kemajuan industrinya. Sesudah kehidupan Politik yang menyatukan Jerman selesai pada tahun 1871, maka dapatlah Jerman di bawah pimpinan Otto Von Bismarck dengan mantap menjalankan industrialisasi. Dalam waktu tidak terlalu lama, Jerman menjadi negara industri yang besar yang mampu menyaingi Inggris.

Di Amerika Serikat, di wilayah New Foundland sejak beberapa waktu sudah tumbuh banyak perusahaan dan industri kecil-kecilan. Dengan diketemukannya tambang batu bara dan besi di sekitar daerah itu, pada tahun 1850, maka mulailah Amerika Serikat menjalankan industrialisasi. Perkembangan industri ini menjadi lebih lancar sesudah masalah politik, yaitu pertikaian antara Selatan dan Utara diselesaikan melalui Perang Saudarapada tahun 1861-1865. Sesudah itu industri Amerika berjalan dengan sangat pesat, karena menggunakan sistem kerja dan peralatan yang mutakhir.

Perkebunan di daerah Selatan pun mengalami kemajuan karena menggunakan mesin untuk pertanian yang dapat menggantikan tenaga kerja manusia. Apalagi sesudah jalan kereta api di buka pada tahun 1869 dan 1884 yang menghubungkan patai timur dengan pantai barat, maka perekonomian Amerika Serikat bertambah maju.

F.KEPUSTAKAAN

Davies, Norman. 1996. *Europe a History*. New York: Oxford University Press

Djokotertono. 1958. *Sejarah Perekonomian*. Jogjakarta: Gadjah Mada

Gay, Peter. 1982. *Abad Pencerahan*. Jakarta: Pustaka Time Life

Parker, Geoffrey (ed). 1994. *Atlas World History 4th Edition*. London: Times Books

USIA. 1994. *An Outline of American History*. Washington: US Information Agen

PLPG 2017

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB V
JAWA MASA CULTUURSTELSEL DAN
ETISCHE POLITIEKE



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 5

JAWA MASA CULTUURSTELSEL DAN ETISCHE POLITIEKE

- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam
- C. KKD : Menganalisis program penanaman komoditi pertanian di masa Tanam Paksa
 - Menganalisis dampak politik etis terhadap perkembangan sosio-ekonomi di Hindia Belanda
 - Menerangkan dampak politik pintu terbuka terhadap perkembangan sosio-ekonomi di Hindia Belanda
- D. Materi

1. Cultuurstelsel

Era Cultuurstelsel (tanam paksa) adalah masa penjajahan yang sebenarnya, dalam arti Negara Belanda sebagai Negara induk melakukan kebijakan kolonisasi terhadap Hindia Belanda. Belanda memiliki hak dan kuasa mengeksploitasi Hindia Belanda dengan legal tanpa tentangan dari Negara lain maupun kekuatan di dalam negeri. Dalam hal ini akhirnya Belanda berkuasa penuh atas seluruh wilayah Indonesia (sekarang), adalah "anugrah" karena pada saat yang sama Belanda sedang mengalami krisis keuangan akibat operasi-operasi militer yang dilancarkan baik di Hindia Belanda maupun di Belanda. Perang Jawa (1825-1830) berhasil menguras sebagian besar keuntungan Belanda yang didapat dari eksploitasi Jawa (tengah dan timur)

Sementara Jawa merupakan daerah andalan sebagai "ladang" emas akibat kesuburan tanah dan ketersediaan tenaga kerja yang melimpah. Jawa sekali lagi harus dapat mendatangkan keuntungan, tidak hanya untuk mengganti keuntungan yang hilang karena "perkara Jawa" tetapi yang lebih penting adalah untuk mendukung operasi militer di negeri Belanda karena munculnya Revolusi Belgia pada 1830. Perang ini tentu membutuhkan biaya yang sangat besar dan harus tersedia dalam waktu yang relative singkat. Belanda berusaha untuk menaklukkan Belgia pada 1831-1832, namun gagal. Dengan terpaksa Belanda mengakui kemerdekaan Belgia pada 1839 .

Perang Jawa, meskipun terjadi lebih dahulu dari kasus Belgia, perang ini berhasil menguras hampir seluruh keuntungan yang diperoleh Belanda di tanah jajahan. Berlarut-larutnya pertempuran dengan medan tempur yang sangat lebar serta keterbatasan penguasaan medan perang oleh pihak Belanda memaksa Belanda mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk mengatasi masalah tersebut. Kerugian yang diderita harus segera diatasi dan dikembalikan, maka Belanda terus memikirkan bagaimana mempercepat perolehan keuntungan yang hilang tersebut.

Beragam pendapat dan pemikiran diajukan untuk mengatasi masalah financial tersebut, pada akhirnya pilihan jatuh pada usul van Den Bosch (1829) yang dirasa paling maksimal untuk mengembalikan kerugian yang diderita. Usulan tersebut diajukan kepada Raja Belanda dan diterima. Dan untuk memastikan bahwa usulan itu dapat dilaksanakan dan menghasilkan keuntungan seperti yang dijanjikan van Den Bosch diangkat sebagai Gubernur Jendral Hindia Belanda (1830-1833). Januari 1830 van Den Bosch tiba di Jawa untuk mengemban misi memastikan ide-idenya terlaksana dan mengeluarkan Belanda dari masalah keuangan.

System cultuurstelsel adalah penerapan kembali eksploitasi sumber daya alam dalam bentuk penyerahan wajib seperti yang pernah dilakukan VOC. Kegagalan system pajak tanah dijadikan alasan utama van Den Bosch untuk sekali lagi menerapkan system serah wajib atas komoditas tanaman yang dapat diekspor dan mendatangkan keuntungan maksimal. Ciri khas cultuurstelsel adalah kewajiban bagi rakyat Jawa untuk membayar pajak dalam bentuk natura berupa hasil pertanian mereka. Syarat dan ketentuan culttuurstelsel tertuang dalam Staatsblad (Lembaran Negara) tahun 1834 no. 22.

Dalam praktek cultuurstelsel berbeda dengan syarat dan ketentuan tertulisnya. Di atas kertas ketentuan cultuurstelsel tidak terlihat merugikan rakyat, sebaliknya, rakyat akan diuntungkan. Berdasarkan ketentuan hanya sepertiga lahan (sawah) rakyat yang akan dipergunakan untuk tanaman komersil, dalam pelaksanaannya lahan yang diperuntukkan bagi rakyat hanya sepertiga, sedangkan dua pertiganya untuk tanaman komersil. Dalam ketentuan kegagalan panen karena

factor alam dan hama akan ditanggung pemerintah colonial, tetapi pada kenyataannya semua kegagalan panen harus ditanggung oleh petani.



Gambar sistem cultuurstelsel (www.berpendidikan.com)

Cultuurprocenten adalah insentif yang diberikan kepada pegawai Belanda maupun penguasa pribumi Bupati dan kepala desa agar mereka melaksanakan tugas dengan baik. Cultuurprocenten adalah tambahan bagian tertentu apabila para pejabat berhasil melampaui target produksi yang telah ditetapkan. Karena tidak ada aturan pelaksanaan tentang peningkatan produksi maka para pejabat mengambil langkah mudah dengan memperluas areal tanam. Secara tradisional para petani adalah klien (bawahan) para penguasa desa (patron) sehingga mereka harus mematuhi pimpinan (patron) mereka. Konsep inilah yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan eksploitasi. Dengan cara demikian eksploitasi pedesaan Jawa dilakukan secara besar-besaran dan terstruktur, keuntungan besar terjamin. Pemerintah colonial berhasil mendapatkan komoditi ekspor dalam jumlah yang banyak dan berkelanjutan.

Perubahan sosial terjadi di pedesaan Jawa. Tuntutan administrative memaksa pejabat colonial Belanda harus berada di “lapangan” untuk menjamin keterlaksanaan program. Keberadaan pegawai Belanda Eropa di tengah perkebunan akhirnya memaksa pejabat Jawa untuk mendampingi. Suatu hal yang belum

pernah terjadi pada masa sebelumnya dalam kehidupan sosial masyarakat Jawa. Pada budaya Jawa pedesaan hanya pejabat desa yang berinteraksi langsung dengan rakyat/petani, pejabat di atas kepala desa/lurah hanya mengeluarkan perintah yang akan dikerjakan oleh pejabat dibawahnya. Cultuurstelsel mengubah tradisi tersebut, mulai era itu rakyat dapat berinteraksi langsung dengan pejabat berwenang atau dalam hal ini interaksi buruh dan majikan terjadi secara massif. Hal itu juga berarti penjajahan atas Jawa (Indonesia) adalah nyata, pegawai Eropa sebagai “tuan” benar-benar ada dan “memerintah” tanah Jawa (Indonesia)

Dengan segera pengaruh kebijakan cultuurstelsel dapat dirasakan bagi pihak Belanda. Keuangan Belanda menjadi stabil, Belanda berhasil membayar hutang yang dibuatnya selama kasus Belgia, bahkan Belanda dapat membiayai pembangunan negaranya dan meningkatkan kemakmuran rakyatnya. Perekonomian Belanda tumbuh dengan signifikan, Belanda tidak lagi menjadi Negara yang terbelakang dan miskin di Eropa. Namun demikian apa yang dialami Belanda tidak terjadi di pedesaan Jawa. Cultuurstelsel yang di atas kertas sangat ideal, dalam pelaksanaannya sebaliknya, penderitaan rakyat Jawa segera terlihat.

Sepuluh tahun setelah pemberlakuan cultuurstelsel masalah segera nampak. Penderitaan rakyat Jawa terutama pada wilayah perkebunan tebu segera tampak. Terjadi kekurangan beras sebagai akibat areal penanaman padi yang menyusut bahkan tidak ada sama sekali. Ketersediaan beras sebagai bahan pakan utama penduduk Jawa tidak hanya karena kurangnya areal tanam tetapi juga tidak terawatnya tanaman padi akibat penduduk diminta merawat tanaman tebu. Perawatan tanaman tebu menyita waktu penduduk sehingga mereka tidak punya waktu lagi untuk mengurus tanaman padi.

Kelangkaan padi membuat harga jual padi menjadi mahal, gejolak harga tidak terkendali. Tahun 1844 terjadi gagal panen akibat hama, disusul bencana kelaparan di Grobogan dan Cirebon. Wabah penyakit berjangkit hampir di seluruh pesisir utara Jawa. Tahun 1849-1850 wabah kelaparan meluas di Jawa Tengah, sementara dalam situasi buruk itu pemerintah colonial melakukan penaikan pajak.

Kesengsaraan dan penderitaan rakyat pribumi memunculkan beragam reaksi dari berbagai kalangan pula. Keputusan rakyat pribumi diwujudkan

melakukan pembakaran ladang tebu, menolak membayar pajak, kabur dari perkebunan sampai melakukan gerakan kekerasan terhadap pejabat desa maupun pegawai Belanda. Di pihak Belanda juga muncul kritik setelah penderitaan pribumi Jawa dipublikasikan di Belanda. Douwes Dekker yang pernah menjadi Resident Lebak dan Probolinggo melalui karyanya *Multatuli* mengungkapkan kesaksiannya atas penderitaan pribumi Jawa. Penentangan terhadap kebijakan *cultuurstelsel* muncul, terutama setelah kelompok liberal memenangkan mayoritas kursi pada parlemen Belanda. Kaum liberal yang terdiri dari pengusaha dan orang-orang kaya menuntut penghentian *cultuurstelsel* dan peran pemerintah yang sangat dominan di tanah jajahan.



Gambar penanaman wajib kopi (kisanak.wordpress.com)

Kelompok liberal mendesak dilakukannya pembaharuan dalam mengelola tanah jajahan yaitu dengan mengurangi peran pemerintah terutama dalam urusan perekonomian tanah jajahan, dihapuskannya pembatasan bagi pihak swasta untuk mengeksploitasi tanah jajahan dan pengakhiran pemerasan dan penindasan terhadap rakyat pribumi. Namun demikian tidak mudah memaksa pemerintah mewujudkan tuntutan kelompok liberal. Setelah melalui serangkaian perdebatan yang panjang disepakati *cultuurstelsel* akan dihapus secara bertahap, mulai dari komoditi yang paling sedikit mendatangkan keuntungan. Secara berturut penghapusan *cultuurstelsel* diberlakukan atas lada 1862, cengkih dan pala 1864, nila, teh dan kayu manis 1865, tembakau 1866; sementara kopi dan tebu adalah

komoditi terakhir yang dihapuskan melalui pengelolaan cultuurstelsel karena kedua tanaman ini adalah komoditi yang paling menguntungkan.

2. Politik Pintu Terbuka

Agrarische Wet (UU Agraria) 1870 menandai dimulainya era liberal di Jawa. Pengelolaan Jawa tidak lagi monopoli pemerintah, kini pihak swasta memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan eksploitasi. UU itu juga menjamin kebebasan dan keamanan pengusaha perkebunan. Dalam ketentuan yang berlaku hanya orang-orang Hindia Belanda (Indonesia) dan pemerintah yang diizinkan memiliki tanah. Pemerintah sebagai pemilik tanah dapat menyewakan kepada pengusaha asing atau Belanda dengan jangka waktu sewa 75 tahun, sementara pihak pribumi yang memiliki tanah diizinkan menyewakan tanahnya selama 5 sampai 20 tahun. Dengan demikian mulai berlakunya UU Agraria 1870 sampai awal 1900 di Hindia Belanda marak dengan munculnya usaha agroindustri.

Tidak hanya Jawa, wilayah luar Jawa juga mulai dikembangkan untuk usaha perkebunan dan pertambangan. Selesaiannya terusan Suez menyusul pembukaan terusan itu untuk kapal-kapal non militer memangkas jarak tempuh Eropa-Asia sekaligus memicu perkembangan perhubungan laut. Perkembangan agroindustri swasta dengan dukungan transportasi laut (Koeniglijk Paketvaart Maatschappij KPM) yang dikelola pemerintah Belanda mendorong pertumbuhan perekonomian berbasis agroindustri. Ekspor Hindia Belanda pada tahun 1860 baik pemerintah maupun swasta memiliki nilai sama, tetapi pada 1885 nilai ekspor pihak swasta sepuluh kali lipat nilai ekspor pemerintah. Secara keseluruhan nilai ekspor Hindia Belanda tahun 1885 adalah dua kali lipat dari nilai tahun 1860. Keberadaan orang-orang sipil Eropa meningkat pesat dari 17.285 pada tahun 1852 menjadi 62.477 pada tahun 1900. Periode liberal adalah periode peningkatan eksploitasi Hindia Belanda secara besar-besaran (Ricklefs, 2001:269-270)

Jaman liberal juga berarti masa ketika alat tukar uang menjangkau lebih ke pedalaman Hindia Belanda terutama pada masyarakat Jawa. Semua ini akibat sistem sewa tanah yang mewajibkan pembayaran berupa uang, selain itu usaha

perkebunan memperkenalkan uang melalui system pengupahan atas buruh yang bekerja di perkebunan-perkebunan besar.

Keberadaan perkebunan besar mendorong munculnya usaha sector jasa yaitu ekspor-impor. Industry ekspor merupakan penggerak perekonomian Hindia Belanda dan berpengaruh terhadap sector ekonomi lainnya. Keberadaan industry itu tidak lepas dari meningkatnya permintaan pasar Eropa akan komoditi (pertanian dan pertambangan) dari Negara-negara koloni. Komoditi primadona yang terus mengalami peningkatan permintaan adalah gula, kopi, tembakau, karet, dan barang-barang tambang seperti timah, bauxite dan lain-lain.

Prinsip ekonomi liberal adalah kebebasan ekonomi tanpa campur tangan pemerintah serta penghapusan semua unsure paksaan. Kaum liberal yakin apabila perekonomian dibiarkan bebas maka akan berjalan menuju ke taraf yang lebih baik, kebebasan berarti siapa saja memiliki kesempatan berusaha yang sama, hal itulah yang akan mendorong perkembangan ekonomi. Liberalism menunjukkan keberhasilannya dalam hal perkembangan industry khususnya ekspor yang berkembang pesat. Ketersediaan capital dalam jumlah besar dengan dukungan system keuangan (bank) yang solid perkebunan-perkebunan di Hindia Belanda berhasil mengembangkan usahanya. Modal membuat perkebunan dapat menggunakan teknologi baru hasil Revolusi Industri untuk memaksimalkan produktifitas mereka. Pada tahun 1870 luas areal perkebunan tebu di Jawa adalah 54.176 bau, luas areal perkebunan tebu mengalami peningkatan yaitu menjadi 128.301 bau pada 1900. Produksi gula meningkat dari 2.440.000 pikul pada 1870 menjadi 12.050.544 pikul pada tahun 1900. Hal yang sama terjadi pada perkebunan teh, khususnya setelah perkebunan-perkebunan tersebut membudidayakan tanaman the yang berasal dari Assam. Tembakau mengalami hal yang sama, bahkan sempat memiliki harga yang sangat bagus dan sangat terkenal di Eropa (Notosusanto, 1984: 124-125)



Gambar pabrik gula di Jawa (www.willemsmithhistorie.nl)

Komoditi dagang lainnya yang dihasilkan perkebunan-perkebunan besar yang telah mengalami perkembangan pesat selama masa ini adalah kopi dan kina. Selama jaman liberal Hindia Belanda menjadi Negara penghasil kina yang paling terkemuka di dunia, karena hampir 90% dari kina yang digunakan di dunia pada waktu itu berasal dari perkebunan-perkebunan kina di Jawa. Sayangnya kopi tidak lagi menjanjikan keuntungan yang bagus seperti selama masa cultuurstelsel meskipun kopi Jawa Barat sangat terkenal.

Harga kopi dan gula jatuh setelah tahun 1885, sehingga keuntungan yang diperoleh juga menurun secara signifikan. Tahun 1891 menyusul harga tembakau jatuh di pasar internasional. Jatuhnya harga tembakau cukup serius sehingga membahayakan kelangsungan hidup perkebunan-perkebunan tembakau di Deli. Jatuhnya harga gula terutama disebabkan oleh munculnya pesaing gula tebu yaitu gula bit yang dibudidayakan di Eropa. Budidaya tanaman bit di Eropa memangkas ongkos kirim sehingga komoditas baru itu dapat menyaingi gula dari Hindia Belanda.

Penurunan keuntungan akibat turunnya harga komoditas berimbas terhadap jasa keuangan atau perbankan yang hidup dari perkebunan. Kredit macet menjadi ancaman yang akan menjatuhkan lembaga keuangan di Hindia Belanda. Untuk menghindari kejatuhan semua usaha perekonomian (perusahaan perkebunan dan lembaga perbankan) perlu dilakukan perubahan mendasar untuk menyelamatkan perekonomian Hindia Belanda. Keputusan yang diambil pemerintah Hindia Belanda adalah melakukan merger atas perkebunan yang

dimiliki perseorangan menjadi sebuah perseroan terbatas yang dikendalikan oleh manager professional bukan oleh pemilik perkebunan. Pemilik perkebunan akan menjadi pemegang saham yang memiliki hak memilih dewan direksi yang akan mengawasi kinerja perkebunan yang dijalankan oleh sang manajer. Dengan demikian perbankan tetap dapat menyalurkan kreditnya dengan resiko yang lebih kecil. Namun pihak perbankan kemudian juga melakukan pengawasan terhadap perusahaan perkebunan sehingga salah urus, ketidakefisienan operasi perkebunan-perkebunan besar dapat diminimalisir. Bank-bank di Hindia Belanda tidak lagi beroperasi secara mandiri, tetapi menjadi bagian dari bank-bank yang berkedudukan di Belanda.

Perkembangan usaha perkebunan yang pesat dan sangat menguntungkan, ternyata hanya dinikmati para pengusaha dan pemerintah Belanda. Rakyat pribumi tetap masih berada dalam kemiskinan. Kemakmuran seperti yang didengung-dengungkan kaum liberal atas penduduk pribumi tidak terwujud. Widjojo Nitisastro dalam penelitiannya tentang pertumbuhan penduduk Hindia Belanda setelah 1880 memperlihatkan adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk (Notosusanto, `1984: 128) Di pihak lain ketersediaan produksi pangan mengalami sedikit penurunan dari pertumbuhan penduduk. Ini berarti pertumbuhan penduduk Jawa tidak diiringi pertumbuhan produksi pangan, seperti yang sudah diramalkan Malthus bahwa suatu hari pertumbuhan penduduk akan melampaui pertumbuhan produksi pangan sehingga kelangkaan pangan menjadi niscaya

Penurunan kesejahteraan penduduk pribumi Jawa dilaporkan oleh Mindere Welvaarts Commisie (Komisi Kemerosotan Kemakmuran) yaitu suatu badan yang dibentuk pemerintah colonial Hindia Belanda untuk menyelidiki tingkat kemakmuran penduduk pribumi. Hasil penyelidikannya menyatakan bahwa pada awal abad ke-20 pendapatan rata-rata rumah tangga Jawa berkisar f.80 untuk satu tahun, dari jumlah itu kurang lebih f.16 harus dibayarkan kepada pemerintah sebagai pajak, sehingga pendapatan sebenarnya adalah f.64/thn atau f.5,3/bln jumlah yang sangat kecil

Penurunan kemakmuran penduduk Jawa tidak hanya disebabkan penurunan usaha perkebunan besar Belanda tetapi juga karena sebab-sebab lain. Pertama adalah meningkatnya penduduk Jawa setelah Perang Jawa dengan tidak diikuti perluasan areal lahan pertanian untuk pangan. Kedua adanya system kerja rodi baik untuk pejabat colonial maupun pejabat pribumi sebagai patron mereka. Petani tidak memiliki motivasi kerja keras karena mereka paham bahwa hasil kerja mereka tidak dapat mereka nikmati. Ketiga adalah kebijakan politik colonial yang menjadikan Jawa sebagai tulang punggung financial untuk daerah-daerah lain yang dikuasai Belanda. Keempat adalah system pajak regresif yaitu system perpajakan yang memberatkan kelompok berpendapatan rendah yang sebagian besar adalah pribumi tetapi di pihak lain menguntungkan kelompok berpendapatan tinggi (mayoritas Eropa) karena rendahnya pajak yang harus mereka tanggung. Kelima adalah krisis yang melanda perkebunan pada tahun 1885 (Notosusanto 1984: 129-131)

3. Politik Etis

Cultuurstelsel berhasil membawa Belanda keluar dari belitan kesulitan dan menikmati masa makmur bertahun-tahun setelah itu. Tidak demikian halnya dengan Hindia Belanda terutama penduduk pribuminya. Penduduk Hindia Belanda harus bekerja keras agar Hindia Belanda menghasilkan banyak uang yang dipakai sebagai jaminan hidup negeri Belanda. Garis kebijakan politik tersebut banyak menuai kecaman terutama dari kelompok humanis. Mereka berpendapat tidak seharusnya hal itu dilakukan, Belanda harus membayar kembali “jasa baik” yang telah diberikan penduduk Hindia Belanda. Van Dedem mengusulkan dilakukannya pemisahan pembukuan agar dapat dihitung dengan jelas pemasukan dan pengeluaran dari Hindia Belanda karena selama ini tercatat jadi satu. Van Kol menyebut pengelakan pengakuan “jasa” Hindia Belanda sebagai politik immoral atau tidak tahu diri

De Waal menghitung jumlah hutang Belanda 236 juta gulden termasuk hutang VOC beserta bunganya, pengeluaran setelah 1800 oleh Belanda untuk Hindia Belanda. Sementara Hindia Belanda pada 1815-1863 menyumbang sebesar

507,5 juta gulden. Menurut perhitungan van Der Berg dari 236 juta gulden, beban Hindia Belanda paling banyak 96 juta, tetapi negeri Belanda mengambil lebih banyak sehingga pada 1884 Hindia Belanda masih berhak menerima 528 juta gulden, dan apabila diperhitungkan dengan bunga maka Hindia Belanda berhak menerima 1585 juta gulden (Notosusanto, 1984: 13)

Van Deventer dalam artikel yang dimuat dalam majalah *De Gids* tahun 1899 menyebutkan bahwa jutaan yang dihasilkan oleh Hindia Belanda sebagai *Een Eerschuld* (hutang kehormatan). Jumlahnya menurut van Deventer 823 juta gulden, tanpa memperhitungkan jumlah yang diperoleh sebelum 1867 ketika masih dalam satu pembukuan. Setelah keluarnya *Comptabiliteits Wet* tahun 1867 pemisahan keuangan resmi dilakukan sehingga perlu pengembalian hasil yang dipungut sejumlah 187 juta gulden (Notosusanto, 1984: 14)

Kecaman-kecaman terhadap pemerintah Belanda mendorong munculnya pemikiran “balas budi”. Pemikiran tentang balas budi tersebut sebagian besar muncul dari kalangan humanitarisme, sosial-demokrat dan politik etis. Dalam pidato tahun 1901 Ratu Belanda menyatakan bahwa “negeri Belanda memiliki kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran serta perkembangan sosial dan otonomi dari penduduk Hindia Belanda” (Notosusanto, 1984: 35). Tekanan pada penduduk menunjukkan bahwa adanya pengakuan terhadap hak penduduk pribumi Hindia Belanda.

Perkembangan perekonomian sekitar tahun 1900, yaitu penurunan keuntungan ekonomis dari komoditi kopi dan tebu karena serangan penyakit berhasil mempercepat perubahan haluan politik. Kemajuan pesat industri perkebunan sejak 1870 dengan jutaan keuntungan yang diperoleh justru memundurkan perusahaan-perusahaan pribumi. Dalam hal ini negeri Belanda harus memperhatikan kepentingan penduduk pribumi dan membantu mengatasi kesulitan di Hindia Belanda. Politik Etis dilaksanakan dengan pemberian bantuan sebesar f.40 juta gulden

Politik Etis membawa perubahan cara pandang terhadap Hindia Belanda. Hindia Belanda adalah daerah yang harus dikembangkan sehingga dapat memenuhi keperluannya dan meningkatkan budaya rakyat pribumi. Politik Etis

yang dimulai dengan politik kesejahteraan adalah akibat berbagai pemberitaan tentang kemerosotan hidup rakyat. Kuyper secara tegas menyatakan untuk mengganti system eksploitasi dengan sistem perwalian. Peradaban pribumi harus ditingkatkan, untuk itulah tugas misi yaitu “mengadabkan bangsa pribumi”

Selama periode 1900-1914 terlihat sikap “lunak” pemerintah colonial terhadap gerakan yang mengusung cita-cita kemerdekaan. Pemerintah colonial berusaha mencari wadah yang tepat agar keinginan-keinginan colonial dan pribumi dapat berdampingan untuk mencapai suatu kesatuan politik. Sampai tahun 1925 pemerintah colonial telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang menunjukkan “kepercayaan” kepada pihak pribumi melalui desentralisasi, perubahan pemerintahan, perbaikan kesehatan masyarakat, emigrasi, perbaikan pertanian dan peternakan, pembangunan irigasi, dan lalu lintas (Notosusanto, 1984: 40)

Upaya pembangunan yang dilakukan pemerintah colonial Hindia Belanda selain karena tuntutan Politik Etis juga untuk memenuhi kebutuhannya sendiri yang semakin menuntut efisiensi. Demi menjaga keuntungan besar yang diinginkan tanah jajahan harus menyesuaikan diri dengan tuntutan komunikasi dan transportasi yang luas dan cepat. Peningkatan kesejahteraan penduduk pada gilirannya juga akan meningkatkan pendapatan pemerintah karena perputaran uang yang makin menjangkau masyarakat luas membawa keuntungan tersendiri bagi lembaga-lembaga keuangan.

Pemerintah colonial Hindia Belanda dalam sepuluh tahun pertama 1900-an mengeluarkan berbagai peraturan guna mempercepat peningkatan kesejahteraan penduduk. Lembaga-lembaga yang memudahkan penduduk pribumi untuk memperoleh dan menyalurkan uangnya didirikan seperti bank perkreditan, pegadaian, lumbung desa, bank koperasi, sementara kerja paksa atau rodi berangsur-angsur dihapuskan.

Di bidang pendidikan terjadi peningkatan jumlah sekolah dengan signifikan. Meskipun tujuan pendirian sekolah adalah untuk mendapatkan tenaga kerja terdidik dan murah sekolah berhasil menjadi sarana pemunculan kesadaran akan hak dan persamaan hak. Sekolah yang didirikan pemerintah colonial pada

awalnya hanya untuk kalangan Eropa dan Belanda, kemudian terbuka untuk para anak bangsawan. Politik Etis dengan tuntutan peningkatan kesejahteraan penduduk pribumi berhasil memunculkan sekolah-sekolah rakyat untuk kalangan bangsawan rendahan sehingga transformasi pemikiran modern menjangkau rakyat pribumi. Pada akhir abad ke-19 terdapat 721 sekolah rendah dengan jumlah murid 131.000. Tahun 1907 Sekolah Kelas 2 (sekolah ongko loro) diperluarsdengandidirikannya Sekolah Kelas 1 (sekolah ongko siji) yang telah mengajarkan bahasa Belanda. Dan pada tahun 1912 Sekolah Kelas 1 diubah menjadi HIS (Holland Inlandsche School) yaitu sekolah dasar untuk anak pribumi dengan bahasa pengantar bahasa Belanda. Demikian juga untuk jenjang pendidikan di atas SD perluasan pendidikan juga dilakukan secara berangsur-angsur, tahun 1902 STOVIA (sekolah dokter Hindia), tahun 1913 didirikan NIAS (Nederlandsch Indische Artsen School: sekolah kedokteran). Tahun 1927 STOVIA secara berangsur-angsur ditransformasikan menjadi sekolah tinggi kedokteran (Geneeskundige Hogeschool) dan pada 1936 STOVIA dihapus sehingga sekolah kedokteran tinggal NIAS (Ricklef, 2001: 329-334)



Gambar HIS di Sumenep Madura (id.wikipedia.org)

Perluasan pendidikan di kalangan pribumi meningkatkan jumlah pribumi terdidik yang secara tidak langsung meningkatkan kesadaran identitas. Kaum

terdidik berusaha menyebarluaskan gagasan-gagasan itu melalui beragam saluran, dan salah satunya adalah pers atau surat kabar. Surat kabar telah dikenal di Hindia Belanda sejak 1800, tetapi semuanya masih diterbitkan dalam bahasa Belanda sehingga pembacanyapun sangat terbatas. Perluasan pendidikan pribumi dengan pengantar bahasa Melayu memunculkan surat kabar berbahasa Melayu. Keberadaan surat kabar berbahasa Melayu mempercepat dan meluaskan penyebaran ide-ide kebangsaan.

Kesejahteraan rakyat yang menjadi sasaran Politik Etis termasuk hal kesehatan rakyat. Bidang ini menjadi tanggungjawab Dinas kesehatan Umum dan bagian dari Departemen Pendidikan. Beberapa hal yang dilakukan berkenaan dengan upaya pencegahan dan pengobatan penyakit menular yang harus dilakukan oleh pegawai pemerintah. Sebelum adanya dokter Jawa pada tahun 1851 selaku petugas kesehatan adalah para pamong praja, mereka itu yang melakukan pencacaran dan penyuntikan apabila terdapat suatu wilayah yang penduduknya terinfeksi. Akibat wabah cacar tahun 1911 pemerintah mulai mendirikan rumah sakit, apotik, dan dilakukan gerakan pencacaran oleh para dokter dan mantra. Hasilnya adalah menurunnya angka kematian penduduk menjadi tidak lebih 20 kematian tiap 1000 penduduk

Secara tidak langsung kebijakan-kebijakan Politik Etis memunculkan elite intelektual baru yang memahami identitasnya serta sangat menyadari keterbelakangan masyarakat pribumi. Gerakan-gerakan yang kemudian dimunculkan kelompok intelektual ini melalui pertemuan, perdebatan, rapat terbuka, pidato dan lain-lain merupakan kekuatan sosial baru

Lahirilah pergerakan nasional di seluruh penjuru Hindia Belanda. Gerakan ini membuka mata pemerintah colonial Hindia Belanda akan munculnya kekuatan baru yang berasal dari dalam dan memiliki cita-cita hidup bebas (kemerdekaan). Bahwa gerakan itu kemudian ada yang menjadi radikal karena diskriminasi yang dilakukan oleh Belanda dengan pemerintahan kolonialnya sementara cita-cita kemerdekaan dimotivasi oleh kesejahteraan yang dicita-citakan.

F.KEPUSTAKAAN

Locher-Scholten, Elsbeth. 1996. *Etika Yang Berkeping-keping. Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877-1942*. Jakarta: Djambatan

Marwati Djoened P & Nugroho N. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia IV dan V*. Jakarta: Balai Pustaka

Ricklef, M.C. 2004. *Sejarah Modern Indonesia 1200-2004*. Yogyakarta: Pusta Pelajar

Sartono Kartodirjo, 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid I dari Emporium ke Imperium*. Jakarta: Gramedia

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB VI
PERLAWANAN BANGSA PRIBUMI
SEBELUM ABAD KE-20



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 6

PERLAWANAN BANGSA PRIBUMI SEBELUM ABAD KE-20

- A. KI :Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam
- C. KKD : Menganalisis latar belakang perlawanan rakyat di Nusantara dalam menentang imperialisme dan kolonialisme Belanda

D. Materi

1. Persaingan Perdagangan

Ketika VOC memasuki perairan Nusantara kongsi itu dihadapkan pada suatu system perdagangan Asia Tenggara yang telah mapan berupa perdagangan internasional dengan system terbuka. Transaksi perdagangan mengikuti suatu peraturan yang telah lama berkembang di kawasan tersebut. Komoditi utama perdagangan Nusantara adalah rempah meskipun komoditi lainnya sama pentingnya. Kain didatangkan dari India dan Cina dibawa oleh pedagang Gujarat, Benggali dan Cina. Sedangkan komoditi pertanian dan rempah didominasi beragam suku di Nusantara, terutama beras dipegang oleh Jawa.

Jaringan transportasi atau jalur pelayaran Nusantara tidak dapat dipisahkan dengan jaringan transaksi perdagangan, sehingga keduanya memiliki fungsi strategis. Penguasaan jaringan pelayaran berarti pula penguasaan jaringan perdagangan. Garis pelayaran Malaka-Maluku adalah struktur pelayaran yang berfungsi sebagai jalur perdagangan yang optimal di Nusantara, jaringan ini diperkuat oleh jaringa-jaringan atau subsistem yaitu pelayaran local antar pulau sebagai pendukung.

Menghadapi kenyataan itu VOC berusaha menguasai jaringan dengan menduduki pusat perdagangan rempah Maluku kemudian Malaka. Tidak mudah bagi VOC menerapkan monopoli karena para penguasa pribumi meskipun telah

ditundukkan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan VOC bahkan menciptakan jaringan baru.

Jalan yang ditempuh VOC untuk mewujudkan ambisinya yaitu melarang kapal-kapal pribumi mengangkut komoditi dagang Portugis, menghentikan ekspor rempah-rempah dan yang lebih dramatis melakukan penebangan terhadap pohon-pohon lada (pala dan cengkih). VOC juga melakukan pembatasan perdagangan dengan bangsa Asia tetapi hal itu tidak efektif karena VOC kekurangan kapal untuk memantau pembatasan itu. Sementara membeli rempah-rempah dengan mata uang logam hanya memindahkan transaksi kain ke Portugis, memborong kain dari Inggris dan Portugis untuk dijual kepada pedagang pribumi tidaklah mungkin karena keterbatasan sarana pengangkutan, sementara rempah-rempah yang harus diangkut cukup banyak.

Dihadapkan pada dilemma yang akhirnya tetap tidak menguntungkan VOC akhirnya praktek kekerasan dijalankan. Terhadap penguasa pribumi yang menolak bertransaksi dengan VOC, maka akan dilakukan penghancuran. Bagaimanapun tindakan itu tetap tidak efektif, karena pasar rempah-rempah kemudian berpindah ke Makasar. VOC berusaha menarik pedagang bangsa Asia ke Bandar Ambon agar dapat menarik pajak perdagangan. Semua upaya “legal” yang dilakukan VOC tidak membawa hasil karena pada dasarnya VOC menginginkan konsep monopoli sepenuhnya, hal itu tentu tidak disukai pedagang lain karena merugikan mereka

Persaingan dengan para pedagang Eropa yang lain mulai berkurang dengan kemenangan yang diperoleh Belanda yaitu dengan berhasil dikuasainya Maluku tahun 1613, menyusul Malaka pada tahun berikutnya. Sementara dengan Inggris Belanda tidak berkonfrontasi secara terbuka karena Inggris telah berhasil menguasai India. VOC masih harus menghadapi kerajaan pribumi yang masih cukup kuat menguasai jaringan perdagangan yaitu Mataram, Makasar dan Aceh.

Penetrasi VOC ke dalam jaringan perdagangan di nusantara menimbulkan konflik dengan pusat - pusat perdagangan yang berperan sebagai entreport, emporium atau “perantara” di tengah jalan jaringan Maluku dan Malaka. Salah satu mata dagang penting adalah beras yang dipegang oleh para pedagang Jawa

yang berasal dari Gresik, Jaratan dan Surabaya. Keberadaan VOC dengan kebijakan monopoliya merupakan ancaman bagi pusat-pusat perdagangan begitu pula sebaliknya VOC memandang dominasi para pedagang tersebut harus dipatahkan. Selain harus berhadapan dengan pedagang nusantara VOC juga harus menghadapi parapedagang Asia (Cina, India, Bengali, Keling, Gujarat). Seperti halnya pedagang nusantara pedagang Asia itu juga menguasai komoditi yang memiliki nilai ekonomi tinggi di pasar dagang Asia Tenggara. Tingginya nilai komoditi non rempah tersebut membuat VOC mempertimbangkan untuk memasukkan komoditi tersebut dalam jaringan monopoli perdagangan VOC.



Gambar persaingan perdagangan bangsa Eropa di perairan Makasar (www.negarahukum.com)

Oleh sebab itu VOC pada tahun 1624 mendirikan benteng Zeelandia di Formosa, membangun loji di pulau Deshima dekat Nagasaki pada 1647, membangun pos dagang di Siam (1607), Kambodia (1620), Annam (1636), Tonkin (1637), Arakan (1610). Juga membangun kantor dagang di India yaitu di Gujarat, Surat, Baroda, Ahmadabad, Jalalpur pada 1604, kemudian Mauritius (1638) dan Tanjung Harapan tahun 1647 (Chauduri, 1989: 87-95)

2. Persaingan Politik Kerajaan Pribumi

Pasar utama perdagangan rempah-rempah di bagian timur nusantara adalah Makasar. Makasar sebagai pasar bergantung secara keamanan kepada kerajaan tetangganya Gowa dan Tallo, sementara kedua kerajaan tersebut

mengandalkan Makasar sebagai ruang hidup mereka karena Makasar merupakan pasar penting bagi komoditas hasil pertanian mereka. Kepentingan bersama tersebut yang membawa ketiga kerajaan itu secara bersama menciptakan kondisi yang memaksimalkan perdagangan baik untuk wilayah sekitarnya maupun perdagangan internasional.

Kedudukan Makasar sebagai entreport sangat bergantung pada keberadaan rempah-rempah yang berasal dari Maluku, Seram dan Ambon dan produksi beras serta bahan pangan lain dari pulau-pulau lain, sehingga sangat dapat dipahami apabila dinamika sejarah nusantara bagian timur sangat ditentukan oleh factor tersebut.

Rempah menjadi mata dagang penting, sehingga siapa menguasainya ia dapat mengendalikan perdagangan. Inilah yang memicu konflik Ternate-Tidore dengan Portugis, kemudian Ternate dengan VOC menyusul Makasar dengan VOC. Dari sudut pandang VOC kedudukan Gowa-Tallo mengancam kedudukan VOC yang sedang berusaha memonopoli perdagangan rempah-rempah. Konflik tersebut tidak menguntungkan Makasar maupun Malaka karena satu dengan lainnya ada ketergantungan, gangguan terhadap salah satu Bandar akan mempengaruhi Bandar yang lain.

Sementara factor intern kerajaan itu sendiri tidak dapat diabaikan. Rivalitas kerajaan-kerajaan local tidak jarang dimanfaatkan oleh pihak VOC untuk menarik keuntungan bagi mereka. Persaingan diantara kerajaan pribumi yang berkepanjangan membuka ruang bagi VOC untuk memajukan kepentingan-kepentingannya dengan cara memihak salah satu dari mereka.

Di Sulawesi persaingan terjadi diantara kerajaan Makasar, Gowa, Talo, Bone, Wajo dan Sopeng. Kadang pada suatu masa terjadi juga aliansi dari beberapa kerajaan tersebut apabila menghadapi ancaman atau memiliki kepentingan sama. Kerajaan-kerajaan kuat seperti Gowa, Bone dan Makasar saling bersaing untuk meraih hegemoni atas kerajaan-kerajaan lain, dalam beberapa hal keinginan itu tercapai tanpa adanya konflik terbuka tetapi tidak selalu demikian. Keinginan Gowa untuk terus memegang hegemoni selalu ditentang oleh Bone,

akibatnya Gowa dengan bantuan Wajo dan Sopeng melakukan serangan atas Bone pada 1643 (Notosusanto, 1984: 41-42)

Perkembangan perdagangan internasional dan ancaman rivalitas baik dari kerajaan saingan maupun VOC, memaksa bandar-bandar besar melindungi perdagangannya dengan kapal-kapal perang. Kapal-kapal perang dikirim untuk melancarkan ekspedisi “pengamanan” dari armada-armada pesaing. Pada tahun 1641 Makasar mengirim 36 kapal untuk beroperasi di Maluku, Seram dan Ambon. Akhir tahun 1653 kapal angkatan laut VOC harus menghadapi 19 jung Makasar di perairan antara Makasar dan kepulauan Maluku. Tahun 1666 makasar memiliki 600 kapal yang ditempatkan di Butung, ketika terjadi konflik dengan VOC Makasar mengerahkan 450 kapal dan 200 kapal berhasil disita VOC (Ricklefs, 2001: 144-14).

Peristiwa yang sama terjadi di Jawa. Ekspansi Mataram dimulai dengan menghancurkan kota-kota pesisir yang merupakan lawan utamanya, sebuah strategi yang kelak menjadi boomerang untuk Mataram karena pesisiran adalah sumber kekayaan dan tulang punggung pemerintahan seperti telah diperlihatkan para pendahulunya yaitu Sriwijaya, Majapahit, Aceh, Malaka, Makasar dan sebagainya. Serangan Mataram atas kota-kota pesisir membuat para pedagang Jawa mengungsi ke Bandar-bandar lain seperti Banten, Banjarmasin dan Makasar. Munculnya pusat perdagangan baru yang secara tidak langsung akibat kebijakan politik Mataram kemudian menjadi saingan dan oposan terhadap Mataram.

Factor lain yang tidak dapat diabaikan dalam kasus Jawa adalah munculnya despotism dan tirani, pertentangan di kalangan keluarga di dalam keraton, pemberontakan dan perebutan tahta. Semua itu merongrong kerajaan, melemahkan dari dalam sehingga bangunan kerajaan menjadi rapuh, akhirnya hanya memudahkan VOC melakukan penetrasi dan membatasi Mataram menjadi kerajaan agraris tanpa akses keluar (pelabuhan).

Pertengahan abad ke-17 sampai tahun-tahun akhir abad ke-17 Mataram menghadapi konflik “dalam negri” yang tidak dapat diabaikan oleh VOC. Amangkurat 1 pengganti Sultan Agung memiliki program kerja yaitu, konsolidasi kerajaan, sentralisasi system administrasi dan keuangan, dan menumpas segala bentuk perlawanan (pemberontakan). Dalam hal ini Amangkurat mencoba

membuat Mataram sebagai kerajaan yang bersatu dengan sumber pendapatan yang berada di bawah kendali raja. Akibatnya ialah terjadi pengucilan terhadap kelompok atau orang yang berpengaruh dan daerah-daerah penting, hal itu justru memunculkan pemberontakan.

Amangkurat I berusaha untuk menguasai wilayah pesisir dan mencoba memonopoli perdagangan hanya dengan VOC. Tujuan dari kebijakan itu adalah (1) menjamin supaya pajak dari perdagangan daerah pesisir langsung tersalur ke istana; (2) menegakkan kembali hubungan vassal VOC yang memuat keyakinannya telah ditetapkan di dalam perjanjian tahun 1646; (3) menerima hadiah-hadiah VOC yang dapat meningkatkan kemegahan dan keagungan istana; (4) menerima uang VOC untuk meringankan kekurangan dana yang kronis di kerajaannya. Tujuan itu akan tercapai apabila Amangkurat melenyapkan otonomi daerah pesisir dan memaksa VOC bertransaksi langsung dengan istana (Nagtegaal, 1996: 58-64)

Kerajaan Mataram mulai mengalami disintegrasi. Amangkurat telah lanjut tetapi kebijakan kekerasan dan “pembersihan” terus berlanjut. Tahun 1674-1675 berjangkit penyakit dan kelaparan, muncul penanda tidak baik yaitu gunung Merapi meletus (1672), gempa bumi beberapa kali, gerhana bulan, dan hujan turun tidak pada musimnya. Dalam tradisi Jawa penanda alam yang muncul tidak sesuai dengan kebiasaan merupakan tanda akan munculnya suatu kejadian yang membawa akibat buruk. Dalam keadaan demikian akan percuma melawan “takdir” yang telah digariskan.

Kebijakan politik otoritarian tentu saja akan menimbulkan gelombang ketidakpuasan dan berakhir dengan gerakan pemberontakan. Meskipun dalam banyak hal istana masih dapat mengatasi pemberontakan tetapi konflik diantara para bangsawan istana tidak pernah berakhir. Beberapa konflik bersifat regional seperti kasus Madura dan daerah pesisir timur laut. Akar masalah itu sendiri telah terjadi sejak akhir abad ke-16 yaitu masa awal berdirinya Mataram dan semakin parah ketika Amangkurat I memerintah dengan tangan besi. Konflik itu adalah konflik para bangsawan istana dan menyangkut masalah legitimasi karena dengan kekejamannya, pembunuhan-pembunuhan yang dilakukan, usaha-usahnya untuk menghancurkan otonomi regional, dan ketidakmampuannya menggunakan

kekuatan militer, Amangkurat I telah menghancurkan permufakatan para pembesar yang sangat penting artinya bagi legitimasi dan pemerintahan yang efektif.

3. Campur Tangan VOC

Sejak pertengahan abad ke-17 sampai tahun-tahun terakhir abad tersebut terjadi banyak konflik pada kerajaan pribumi Jawa yang tidak dapat diabaikan oleh VOC di Batavia. Pada sudut pandang VOC kasus-kasus itu sama dengan hal serupa di Maluku. Kerajaan-kerajaan itu merupakan sumber utama lada bagi VOC, di kerajaan – kerajaan itu juga tinggal orang Eropa non Belanda yang merupakan pesaing Belanda, wilayah kerajaan yang dekat dengan laut, dan gejolak pada kerajaan-kerajaan itu dapat membuat Batavia terganggu.

Dibanding kerajaan lain Mataram adalah masalah yang berbeda bagi VOC. Mataram punya arti penting tidak hanya karena ekspor utama VOC berasal dari kerajaan itu tetapi juga karena hidup VOC sangat tergantung padanya. Mataram adalah pemasok beras bagi VOC dan sekutunya, juga karena kayu terutama jati yang sangat dibutuhkan VOC untuk memperbaiki dan membuat armada serta untuk membuat rumah dan gedung. Namun demikian Mataram juga ancaman yang potensial bagi VOC, pedalaman Mataram yang menyediakan sumber daya melimpah merupakan tulang punggung yang menjamin kelangsungan kerajaan tersebut meskipun seluruh wilayah pesisir utara Jawa dikuasai VOC.

Karena itu VOC sangat berkepentingan memperhatikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di kerajaan Jawa, misalnya pada kasus Trunajaya. Perseteruan Amangkurat I dengan Putra mahkota yang dibantu Trunajaya telah melibatkan VOC dalam konflik tersebut. Akibat kekurangan sumber daya, pihak putra mahkota dan Trunajaya meminta bantuan VOC meriam, mesiu dan perlengkapan perang lainnya. VOC sangat berkepentingan terhadap stabilitas dan keamanan di daerah pesisir utara agar perdagangan dapat berjalan baik tanpa gangguan. Atas kepentingan itulah akhirnya pada 1676 Batavia memutuskan melakukan mediasi untuk menyelesaikan konflik tersebut.

Laksamana Speelman diiringi 1500 prajurit dikirim untuk misi tersebut. Tugas utamanya adalah mencari pemecahan masalah secara damai, ia dan pasukannya dilarang memasuki wilayah pedalaman. Keputusan itu diambil VOC karena pada saat yang sama Belanda juga harus menghadapi kasus-kasus perlawanan dari orang-orang Melayu, sementara Banten menunjukkan dan Negara-negara pribumi lain juga menunjukkan tanda perlawanan. Jadi VOC harus menghitung dengan tepat penggunaan sumber daya militernya. Ternyata apa yang harus dihadapi VOC tidak sesederhana itu.

Berdasarkan perjanjian bulan Februari 1677, yang diperkuat pada bulan Juli 1677, terjadi persekutuan antara Amangkurat II (putra mahkota) dengan VOC. Awalnya raja ragu untuk mempercayai sekutunya, tetapi pada bulan Septemberakhirnya ia bersedia untuk pergi dari Tegal ke Jepara yaitu markas Speelman dan pasukannya. Speelman berhasil memukul mundur pemberontak. Operasi militer itu memerlukan biaya yang cukup besar dan menjadi hutang baru bagi Mataram. Pada waktu itu, hutang kerajaan kepada VOC untuk biaya-biaya militernya sudah sangat besar, dan raja tidak mempunyai kekayaan yang dapat dipakai untuk membayar kembali hutang tersebut. Oleh karena itulah, maka pada bulan Oktober 1677 dan Januari 1678 dia membuat perjanjian-perjanjian baru. Kini VOC dijanjikan untuk mendapatkan penghasilan dari hasil pungutan pajak pelabuhan-pelabuhan pesisir sampai hutangnya lunas, hak monopoli pembelian beras dan gula, hak monopoli atas impor tekstil dan candu, dan pembebasan dari cukai. Semarang dijanjikan raja untuk diserahkan kepada VOC serta mengakui kekuasaan Batavia yang membentang ke selatan sampai samudra Hindia serta seluruh dataran tinggi Priangan (Ricklef, 2001: 176).

Hal itu membuat Speelman ingin melancarkan misi ke pedalaman, tetapi pihak Batavia tetap menolak. Tahun 1678 ketika Direktur Jendral Rijklof van Goens menggantikan Gubernur Jendral Maetsuycker yang meninggal dunia dan Speelman sendiri menggantikan posisi van Goens terbukalah realisasi dari keinginan Speelman untuk menguasai pedalaman Jawa. Anthonio Hurdt yang menggantikan posisi Speelman di Jepara adalah ujung tombak operasi-operasi militer Batavia yang agresif.

VOC memiliki pasukan militer yang kuat, terlatih, dipersenjatai dengan baik dan memiliki disiplin tinggi. Tetapi VOC juga menghadapi banyak kesulitan yaitu tidak mengenal medan tempur, perbekalan kurang baik, sering terserang penyakit, rentan ditinggalkan sekutu-sekutu pribuminya, serta keberadaan konflik internal dalam pasukan maupun antara komandan lapangan dengan para pejabat di Batavia. Operasi-operasi militer yang digelar mengakibatkan kerugian yang cukup besar dan memakan biaya yang besar pula. Kemenangan-kemenangan berhasil diraih apabila banyak sekutu pribumi yang memihak kepadanya. Pasukan VOC adalah pasukan yang dipersiapkan untuk pertempuran medan datar seperti halnya di Eropa, pasukan VOC tidak disiapkan untuk bertempur di medan pegunungan yang sering merupakan keunggulan musuhnya. VOC disiapkan untuk bersikap defensive, VOC melindungi seorang penguasa atas dasar bayaran dan konsesi. VOC akhirnya berhasil menumpas pemberontak-pemberontak, akan tetapi dia gagal mempertahankan kestabilan dan ketertiban di Jawa (Ricklef, 2001: 179)

Campur tangan VOC dalam masalah suksesi ini memungkinkan raja yang tanpa pendukung dapat menjalankan pemerintahannya secara efektif dan "legitimate". VOC dapat melindungi dan menjamin kelangsungan tahtanya, tetapi tidak dapat membuatnya diakui (legitimate) oleh rakyat. Sebagaimana kasus di Eropa VOC percaya bahwa raja memiliki kuasa absolute. Karena itu untuk menegakkan stabilitas, VOC cenderung mendukung penguasa yang tidak memiliki hak sah atau kemampuan memerintah, tetapi dapat dikendalikan oleh VOC. Dalam hal ini VOC hanya memperburuk keadaan di Jawa.

Tahun 1680 VOC harus menarik kekuatan militernya dari Jawa Tengah dan Jawa Timur. VOC merasa telah cukup menggelar operasi militer dan kondisi stabil agaknya akan tercapai. Namun demikian hal itu tidak sesuai harapan, konflik di dalam istana tidak pernah berhenti dan selalu menyeret VOC untuk kembali terlibat dalam masalah suksesi Jawa, sehingga VOC dipaksa selalu menyiagakan pasukan militernya. Harus diakui bahwa hal itu menuntut biaya yang sangat besar dan inilah yang menggerogoti keuangan VOC sepanjang abad ke-18

3. Perang Jawa

Sejak 1812 sampai 1825 perasaan tidak senang yang terpendam makin meningkat akibat beberapa persoalan. VOC masih melakukan campur tangan atas urusan-urusan istana khususnya urusan suksesi. Kehidupan di istana menjadi tidak kondusif, korupsi dan persekongkolan merajalela. Kedudukan istimewa orang-orang Eropa dan Cina makin jelas dengan makin luasnya konsesi sewa tanah yang didapat kedua kelompok bangsa ini. Tanah-tanah tersebut diubah menjadi perkebunan-perkebunan tebu, kopi, nila, dan lada. Tanah disewa dengan seluruh penduduknya untuk keperluan tenaga kerja di perkebunan dan pada perkebunan itu berlaku hukum Eropa bukan hukum adat local.

Petani harus membayar pajak secara kontan. Perbedaan system ini “mengejutkan” petani sehingga ketika tidak tersedia dana pada saat harus membayar pajak, para petani cenderung meminjam uang kepada pengutang atau rentenir yang kebanyakan orang-orang Cina. Pengusaha perkebunan dan pachter (penyewa) pajak Cina memainkan peran penting terutama dalam hal perekonomian desa. Kondisi itu meningkat ketegangan etnis Cina-Jawa. Sementara pada wilayah yang dikuasai penguasa Jawa kondisinya tidak jauh berbeda. Para petugas pajak juga bertindak sewenang-wenang. Dengan model demikian jumlah pendapatan Batavia dari pajak jalan di Yogyakarta mencapai tiga kali lipat dari tahun 1816-1824. Sementara jumlah pintu pajak yang banyak mematikan perdagangan local yang banyak dikuasai pribumi (Ricklefs, 2001: 252)

Penderitaan akibat beban pajak dan kemiskinan mengakibatkan dislokasi sosial, gerombolan perampok semakin banyak dan makin banyak kasus perampokan, pencurian, pembegalan maupun perampasan. Pemakaian opium semakin meluas dan hanya menguntungkan pendapatan pemerintah colonial. Hampir 12% dari pendapatan pemerintah colonial berasal dari monopoli opium dalam kurun 1827-1833 (Ricklefs, 2001: 253)

Di tengah kondisi Jawa yang semakin kacau itu muncul seorang tokoh yang kelak sangat terkenal dalam sejarah Indonesia yaitu Dipanegara. Dipanegara adalah putra tertua Hamengkubuwana III. Dipanegara tumbuh besar dalam lingkungan kraton yang penuh konflik dan intrik selama pemerintahan Hamengkubuwana II. Masa kecil sampai masa remaja dihabiskan untuk tinggal

dengan neneknya Ratu Ageng di Tegalreja sebuah tempat yang jauh dari istana Yogyakarta. Di Tegalreja Dipanegara mempelajari kitab-kitab Islam, karya sastra Jawa dan sejarah Jawa. Ia belajar di pesantren dan menolak datang ke istana yang tidak disukainya karena sudah tidak sesuai dengan budaya Jawa dan terpengaruh barat yang merusak. Sebagai seorang pangeran Dipanegara masih menjalin hubungan dengan para bangsawan baik di istana maupun di luar istana, ia juga menjalin hubungan dengan para ulama karena kedudukannya sebagai penganut tasawuf, dan sebagai penduduk desa ia juga dengan mudah berbaur dan menjalin hubungan dengan masyarakat. Dan karena kedudukannya sebagai pangeran senior maka dia juga memperoleh kesetiaan dari orang-orang yang tidak puas dengan kebijakan kraton.

Hamper 20 tahun Dipanegara menunggu waktu untuk bergerak, dan selama masa itu pula pengikutnya kian bertambah seiring memburuknya situasi Jawa. Pada 1820-an mulai muncul pemberontakan-pemberontakan kecil. Tahun 1821 terjadi gagal panen padi dan berjangkit penyakit kolera untuk kali pertama. Tahun 1822 Hamengkubuwana IV wafat disertai tersebarnya rumor bahwa beliau meninggal karena diracun. Keadaan semakin kacau ketika terjadi perdebatan yang sengit dalam hal penunjukkan wali bagi putra Hamengkubuwana IV yang masih berusia tiga tahun. Pada akhir tahun itu juga gunung Merapi meletus, orang Jawa menganggap bencana itu sebagai petanda buruk yaitu akan datangnya jaman kekacauan. Embrio pertempuran yang sudah tumbuh sejak 1808 telah mencapai masanya untuk meledak (Ricklef, 2001: 253-254)

Tahun 1823 Gubjen G.A.G. Ph. Van Der Capellen (1816-1826) mengeluarkan kebijakan baru untuk mengakhiri penyelewengan dalam urusan sewa tanah swasta di Jawa Tengah. Dia memerintahkan sewa tanah dihentikan. Praktis kebijakan itu memukul para bangsawan Jawa, mereka kehilangan sumber pendapatan selain harus mengembalikan uang muka yang telah dibayarkan oleh para penyewa baik Cina maupun Eropa. Hal tersebut tidak mudah karena pada umumnya uang muka sewa itu telah dibelanjakan. Kebijakan yang dirasa merugikan tersebut mendorong banyak bangsawan melancarkan pemberontakan.

Pada bulan Mei 1825 dibangun jalan raya baru dekat Tegalreja. Perselisihan terjadi antara pengikut Dipanegara dengan pengikut Patih Danureja IV ketika patok tanda jalan raya dipancangkan. Sejak saat itu ketegangan makin meningkat. Tanggal 20 Juli Belanda melancarkan ekspedisi untuk menangkap Dipanegara, pertempuran segera terjadi. Tegalreja diduduki dan dibakar, Dipanegara berhasil melarikan diri dan mengumumkan pemberontakan, Perang Jawa (1825-1830) dimulai (Ricklef, 2001: 254)

Gerakan itu dengan cepat menyebar ke seluruh Jawa Tengah dan Jawa Timur, namun pusatnya tetap di seputar Yogyakarta. 15 dari 29 pangeran beserta 41 dari 88 bupati bergabung dengan Dipanegara. Sikap Surakarta tidak memihak meskipun berkecenderungan berpihak pada pemberontak, kelompok ulama jelas mendukung gerakan Dipanegara dengan pimpinan Kyai Maja. Dipanegara memakai gelar Erucakra sebagai pernyataan sebagai sosok “ratu adil” yang telah dinantikan, seorang raja adil yang akan menyelamatkan Jawa dari penindasan.

Rakyat pedesaan mendukung Dipanegara dan membantu pasukan pemberontak. Pihak Belanda juga mendapat bantuan dari sekutu-sekutu kraton, terutama dari Legiun Mangkunegara, begitu pula para pangeran dari Madura dan sebagian besar pembesar Jawa.

Perang Jawa adalah upaya perlawanan kelompok elite bangsawan yang terakhir. Perlawanan itu adalah usaha mengembalikan keadaan sebelum meningkatnya kekuasaan konial tahun 1808. Luasnya lingkup gerakan sosial pendukung perlawanan yang dipimpin Dipanegara membuktikan dalamnya pengaruh penjajahan terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat Jawa. Karenanya perlawanan itu tidak sekedar upaya mengusir orang asing dan memerangi istana yang dianggap telah keluar dari norma dan tata nilai Jawa, tetapi upaya mengembalikan tata kehidupan sesuai dengan nilai dan norma orang Jawa untuk mengembalikan harmoni hidup.

Akhirnya semangat spiritual dan cita-cita “mengembalikan impian masa lalu” harus berhadapan dengan dunia nyata yang materialis. Perlahan Belanda berhasil membatasi ruang gerak Dipanegara dan kekalahan sudah di depan mata. Banyak penguasa local akhirnya berpihak kepada Belanda dan istana. Dan setelah

1830 hampir semua elite bangsawan berpihak kepada istana dan Belanda. Istana Jawa Tengah akhirnya menjadi bawahan Belanda yang patuh, namun demikian rasa tidak suka menjadi “yang kalah” tetap ada di bawah permukaan.



Gambar penangkapan Dipanegara (id.wikipedia.org)

Perkara Perang Jawa membuat Belanda melakukan perubahan besar dalam hubungannya dengan kerajaan Jawa. Mempertahankan kesetiaan kaum bangsawan menjadi penting, karena itu anti feodalisme yang sebelumnya telah diterapkan Raffles dan Daendels melalui pembatasan hak-hak bangsawan ditinggalkan. Belanda kembali menjalin persekutuan dengan bangsawan pribumi, para bangsawan diperkenankan kembali menjalankan hak-hak feodalnya. Dengan cara demikian Belanda memperoleh kesetiaan para bangsawan sehingga dapat memperkecil kemungkinan munculnya gerakan perlawanan.

E. KEPUSTAKAAN

Marwati Djoened P & Nugroho N. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka

Nagtegaal, Luc. 1996. *Riding The Dutch Tiger*. Leiden: KITLV

Ricklef, M.C. 2004. *Sejarah Modern Indonesia 1200-2004*. Yogyakarta: Pusta Pelajar

Sartono Kartodirjo, 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid I dari Emporium ke Imperium*. Jakarta: Gramedia

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB VII
MASA PENDUDUKAN JEPANG



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 7

MASA PENDUDUKAN JEPANG

- A. KI :Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menguasai materi Sejarah secara luas dan mendalam
- C. KKD : Menganalisis kehidupan bangsa Indonesia di bidang sosial, ekonomi, budaya, militer, dan pendidikan pada zaman pendudukan Jepang
- D. Materi

1. Pendahuluan.

Pada jaman Hindia–Belanda kaum pergerakan kemerdekaan diklasifikasikan dalam dua golongan berdasarkan sikapnya terhadap pemerintah kolonial. Golongan pertama adalah golongan kooperator, yaitu mereka yang mau bekerja sama (berkooperasi) dengan pemerintah; dan golongan yang kedua adalah golongan non-kooperator yaitu mereka yang tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Bagi golongan terakhir ini, tidak mau bekerja sama dengan pemerintah dalam arti tidak bersedia menjadi pegawai negeri dan atau menjadi anggota semacam badan perwakilan seperti Dewan Rakyat. Dewan Kotapraja dan sebagainya (Susanto T.;1984:21-22). Tokoh-tokoh dari golongan ini yang terkemuka antara lain Sukarno, Moh. Hatta, Cipto Mangunkusumo dan Sutan Syahrir

Sebagai akibat dari sikap dan tindakannya yang tidak mengenal kompromi terhadap pemerintah kolonial maka dengan berbagai alasan antara lain mengganggu keamanan umum, menentang kekuasaan pemerintah, menyiarkan kabar bohong dan sebagainya, mereka ditangkap dan dijatuhi hukuman oleh pemerintah. Semula hukuman berupa hukuman penjara, tetapi kemudian Gubernur Jenderal dengan baik *exorbitante rechte*nya menindak kaum non kooperator yang dianggap berbahaya itu dengan hukuman pengasingan. Sukarno pada tahun 1933 diasingkan ke Ende, Flores, kemudian pada tahun 1937 dipindahkan ke Bengkulu. Pada tahun 1934 Moh. Hatta dan Sutan Syahrir

diasingkan ke Digul kemudian dipindahkan ke Bandanaira. Begitu pula Cipto Mangunkusumo sudah lebih dulu diasingkan ke Banda. Demikian-lah mereka dengan teguh memegang prinsip dan sikap perjuangan yang diyakininya dengan menerima segala resikonya.

Pada tahun 1942 pemerintah Hindia Belanda runtuh dan kedudukannya digantikan oleh pemerintah Balatentara Jepang. Pada jaman pendudukan tentara Jepang itu ternyata diantara tokoh-tokoh non kooperator di atas tidak lagi memegang, azas non kooperasi. Mereka merubah sikap, bila pada jaman Hindia Belanda mengambil sikap non kooperasi maka pada jaman pendudukan Jepang bersikap kooperasi. Perubahan sikap ini tentu sangat beralasan. Sehubungan dengan itu maka tulisan ini mencoba untuk mengungkapkan permasalahan tentang alasan-alasan apakah yang mendorong terjadinya perubahan sikap itu.

2. Sikap bangsa Indonesia Terhadap Ancaman/Berbahaya Fasisme.

Sudah sejak awal abad XX Jepang menjadi imperialistis karena berbagai faktor; di antaranya Jepang menghadapi persoalan kepadatan penduduk, kemajuan industri-nya yang pesat dan adanya restriksi untuk bermigrasi ke Australia dan Amerika. Ekspansi teritorial yang dilakukan oleh *Jepang* setelah Perang Dunia I dihubungkan dengan suatu dokumen yang terkenal sebagai *Tanaka Memoir* (Rencana Tanaka). Dokumen itu memuat rencana ekspansi yang ternyata banyak kesesuaian dengan tindakan Jepang selanjutnya. Perlu dikemukakan bahwa Baron Tanaka yang membuat dokumen itu adalah Perdana Menteri Jepang yang memerintah antara tahun 1927 sampai 1929. Ekspansi teritorial Jepang itu dimulai dengan pendudukan daerah Manchuria (1931), Cina (1937) dan disusul dengan serbuan ke kawasan Asia Tenggara (1941).

Sebenarnya ancaman *fasisme* Jepang itu sudah diperkirakan oleh beberapa tokoh pergerakan Indonesia. Dr. Ratulangi (1928) dan Ir. Sukarno (1929) telah meramalkan bahwa pada suatu waktu kelak akan timbul perang besar di kawasan Pasifik, yaitu antara kekuatan Inggris, Amerika dan Jepang (Sukarno;1956:162-163). Di samping ancaman fasisme, dunia pun terancam oleh sikap agresif ekspansionis Jerman (*Naziisme*)

Pergerakan politik di Indonesia pada umumnya berpendirian anti fasisme dan anti naziisme. Hanya tentang fasisme Jepang, terdapat perbedaan pendapat. Geribdo (Gerakan Rakyat Indonesia) sebagai pergerakan nasional sayap kiri berpendirian sesuai dengan azas anti fasismenya. Partai ini mengutuk fasisme Jepang. Sebaliknya Parindra (Partai Indonesia Raya) sebagai pergerakan sayap kanan ingin memakai kekuatan Jepang untuk memukul dan menghapuskan penjajahan Belanda. Untuk maksud itu Parindra tidak mau menentang imperialis Jepang yang makin hari terasa mengincar ke arah Indonesia (Alisastroamidjojo, 1974:120).

Sikap tokoh-tokoh nasionalis radikal seperti Sukarno dan Moh. Hatta sudah jelas, mereka menunjukkan sikap anti militerisme dan anti fasisme terutama melalui tulisan-tulisannya. Pada tahun 1940, Sukarno dalam surat kabar Panji Silam menulis suatu artikel berjudul "*Indonesia versus Fasisme*". Dalam tulisannya itu ia menegaskan bahwa jiwa Indonesia bertentangan dan tidak sesuai dengan jiwa fasisme. Jiwa Indonesia adalah jiwa demokrasi dan jiwa fasisme adalah jiwa anti demokrasi, jiwa anti kerakyatan (Sukarno:1963:457). Kemudian dalam artikelnya di dalam surat kabar Pembangun (1941) yang berjudul "*Fasisme adalah politiknya dan sepakterjangnya kapitalisme yang menurun*" , pada bagian akhir artikelnya itu ia menulis : kalau karangan saya sekarang ini dapat membuka mata orang dan menanamkan benih benci kepada fasisme di dalam hati orang, maka sudah merasa puaslah saya di dalam hati..... (Sukarno; 1963:603).

Sikap anti fasisme pada diri Sukarno nampak pula pada ucapannya. Dalam pembicaraan yang diadakan pada tahun 1938 di Bengkulu dengan seorang pembesar pemerintah yakni dr. L.G.M. Jaquet, ia mengemukakan bahwa penduduk pribumi apabila mengalami pendudukan Jepang akan menderita tekanan sosial ekonomi yang lebih berat dari pada keadaan di bawah pemerintahan Belanda (L. De Jong;1987:27-28).

Sama halnya dengan Sukarno, Moh. Hatta juga menunjukkan sikap anti Jepang. Sebelum perang Pasifik, Hatta berkali-kali menyatakan dengan jelas agar waspada terhadap imperialisme Jepang. Setelah perang berlangsung ia mengulas

pada surat kabar *Pemandangan* tanggal 22 dan 23 Desember 1941 bahwa Jepang memulai bahwa suatu kemenangan Jepang bagi Indonesia akan mengandung arti penghambaan dan perbudakan. Pada akhir karangnya ia menulis : Juga apabila kita akan mengetahui tentang kemungkinan bahwa Jepang akan menang, tetap akan terpikul di puncak kita kewajiban untuk bangkit menenyahkan ancaman bagi tercapainya cita-cita kita. Lebih baik mati berdiri dari pada hidup berlutut.....Inilah arti dari perjuangan kita (L. De Jong: 17).

Berlawanan dengan sikap kaum pergerakan, rakyat Indonesia di pulau Jawa sangat dipengaruhi oleh Jongko Joyoboyo. Rakyat percaya bahwa ramalan itu akan terjadi (A.G. Pringgodigdo;1978:153). Hal ini menunjukkan tanda adanya kepercayaan terhadap hari depan Indonesia yang gemilang. Jadi rakyat masih mempunyai penghargaan. Adanya pengharapan inilah yang menjadi landasan kuat bagi rakyat untuk tetap bertahan dalam penderitaan bagaimanapun beratnya seperti yang dialaminya pada jaman pendudukan Jepang.

Demikianlah sikap bangsa Indonesia menghadapi ancaman fasisime/ militerisme yang mengancam dunia tidak seragam, sebagaimana tercermin dari sikap kaum pergerakan dan sikap rakyat di atas.

3. Sikap Sukarno-Hatta Terhadap Pemerintah Militer Jepang.

Pada tanggal 8 Desember 1941, Jepang memicu Perang Asia Timur Raya dengan melakukan pemboman terhadap pangkalan armada Amerika Serikat Pearl Harbour di Hawaii. Gubernur Jenderal Hindia-Belanda Tjarda Strakenborgh Stachouwer setelah mendengar berita Jepang telah mulai membuka peperangan kemudian mengumumkan bahwa Hindia-Belanda dalam keadaan perang melawan Jepang (A.G. Pringgodigdo:150). Dalam perang itu Angkatan Perang Hindia-Belanda terpaksa harus bertekuk lutut kepada Balatentara Jepang. Pada tanggal 9 Maret 1942 Jenderal Ter Poorten sebagai Panglima Tentara Belanda di Hindia-belanda menanda-tangani menyerahkan tidak bersyarat di Kalijati (Subang, Jawa Barat) kepada Jenderal Hitoshi Imamura, dan selanjutnya ia bersama-sama dengan Gubernur Jenderal Tjarda menjadi tawanan Jepang. Dengan demikian

demikian tamatlah riwayat penjajahan Belanda di Indonesia dan kemudian berganti dengan penjajahan Jepang.

Dalam menjalankan pemerintahan di Indonesia, pemerintah militer Jepang mengalami kesukaran-kesukaran. Yang pertama berhubungan dengan keadaan geografi Indonesia terdiri dari daerah yang luas dengan pulau-pulanya yang sangat banyak. Masyarakatnya bersifat heterogen dengan berbagai sukubangsa dan adat-istiadatnya masing-masing. Yang kedua, kurangnya pengetahuan Jepang tentang Indonesia dengan segala sifat-sifatnya tadi. Yang ketiga, Jepang kekurangan tenaga untuk bisa mengisi jabatan-jabatan yang lowong karena ditinggalkan oleh Belanda (G. Mujan-to;1974:74). Sehubungan dengan kesukaran-kesukaran tersebut dan juga untuk menyelesaikan Perang Asia Timur Raya, pemerintah militer Jepang sangat memerlukan dukungan dan bantuan penduduk, sehingga untuk itu diperlukan “kerja sama” dengan tokoh-tokoh nasionalisme terkemuka Indonesia seperti Sukarno dan Moh. Hatta.

Ketika tentara Jepang menyerbu Indonesia, Sukarno dan Moh. Hatta dalam status sebagai *interniran*. Sukarno berada di Sumatra, sedangkan Moh. Hatta sudah kembali ke Jawa, sehingga pimpinan militer Jepang di Jawa mengadakan hubungan dengan Moh. Hatta lebih dulu dari pada Sukarno. Dalam menghadapi uluran tangan Jepang untuk saling kerjasama demi kepentingan masing-masing, sikap dan alasan yang ditempuh oleh Moh. Hatta dapat dibaca pada otobiografinya “*Memoir*”, sedangkan sikap dan alasan Sukarno dijumpai pada otobiografinya “*Bung Karno Penyambung Lidah rakyat Indonesia*”.

a. Sikap Moh. Hatta

Moh. Hatta yang diinternir oleh pemerintah Hindia-Belanda di Bandanaira, bersama-sama dengan Sutan Syahrir dipindahkan ke Sukabumi pada awal bulan Februari 1942. Mereka ditempatkan di Sekolah Polisi. Kurang lebih sepuluh hari setelah Hindia-Belanda runtuh, seorang pembesar kempetai diiringi oleh seorang juru bahasanya dan seorang Indonesia bernama Sulaiman Effendi datang ke tempat Moh. Hatta. Pembesar kempetai itu mengatakan bahwa ia tahu riwayat hidup Moh. Hatta dan karena penjajah

Belanda sudah ditaklukkan oleh Jepang maka hendaklah Moh. Hatta bersedia datang ke Bandung ke Pusat Tentara Jepang dan menyatakan kesediaan bekerja sama dengan tentara Jepang untuk menjaga keselamatan rakyat dan menangkis serangan kaum Sekutu. Dengan adanya desakan itu, Moh. Hatta menyatakan kesanggupannya datang ke Bandung pada hari Minggu tanggal 22 Maret 1942 (Moh. Hatta;1982: 391). Namun sehari sebelum keberangkatannya, yakni pada Sabtu tanggal 21 Maret 1942, Moh. Hatta mendapat surat dari bupati Sukabumi yang isinya mengatakan bahwa seorang kolonel tentara Jepang bernama Kol. Ogura ingin bertemu. Dalam pertemuan pada sore hari, Kol. Ogura menjelaskan bahwa ia ditulis oleh Jenderal Harada dan minta kesediaan Moh. Hatta untuk bersama-sama pergi ke Jakarta (Moh. Hatta; 393). Dari dua pilihan itu, harus pergi ke Bandung ataukah Jakarta, maka Moh. Hatta akhirnya memilih pergi ke Jakarta bersama Kol. Ogura. Di Jakarta Moh. Hatta berkenalan dengan beberapa perwira Jepang antara lain Kol. Mioshi dan Kol. Nakayama. Perwira-perwira inilah yang mengurus tempat tinggal dan fasilitas lain bagi Moh. Hatta di Jakarta.

Pada tanggal 26 Maret Moh. Hatta bertemu dengan Jenderal Harada. Dalam pertemuan itu, Harada mengatakan bahwa ia mengetahui betul aktivitas Moh. Hatta sebagai seorang nasionalisme dan ingin mengetahui apakah mau bekerja sama dengan pemerintah militer. Moh. Hatta menjawab bahwa ia ingin mengetahui terlebih dulu apa, maksud Jepang sebenarnya, apakah Jepang bermaksud menjajah Indonesia. Harada menyatakan tidak, dan menekankan bahwa cita-cita Jepang adalah membebaskan semua bangsa-bangsa Asia yang ditaklukkan oleh bangsa Barat. Atas penjelasan Harada itu, kemudian Moh. Hatta menyatakan persetujuannya, hanya saja ia tidak sebagai pejabat pemerintah militer melainkan sebagai penasihat semata (Moh. Hatta: 400; L. De Jong: 19).

Dari keterangan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa Moh. Hatta rupa-rupanya yakin pihak Jepang sungguh-sungguh bersedia memberikan kemerdekaan bagi Indonesia atau setidaknya pemerintahan sendiri sesuai dengan propagandanya sebelum invasi.

Sumber lain yang dapat mengungkapkan latar belakang kesediaan Moh. Hatta berkooperasi dengan Jepang ialah hasil wawancara Nugroho Notosusanto dengan Moh. Hatta pada tanggal 29 Juli 1976. Moh. Hatta bercerita bahwa ketika Jepang masuk kota Sukabumi dimana ia ditahan Belanda, terjadi suatu insiden yang sangat berkesan di dalam sanubarinya. Seorang Belanda dengan mobilnya menyeret mobil seorang Jepang, akibatnya ia langsung ditembak mati oleh Jepang itu. Kejadian itu menurut Moh. Hatta memberikan kepadanya keyakinan, bahwa sikap melawan secara terang-terangan terhadap kekuasaan pihak Jepang akan berarti bunuh diri (Nugroho Notosusanto;1979:15). Atas dasar cerita Moh. Hatta di atas, jelaskan bahwa mengambil sikap yang berlawanan dengan pihak Jepang risikonya terlalu besar dan agaknya melakukan kooperasi dengan pihak Jepang merupakan sikap dan tindakan yang wajar dilakukan.

b. Sikap Sukarno

Ketika tentara Jepang menyerbu Palembang sebagai sasarannya yang pertama di Sumatra, Sukarno masih berada di Bengkulu. Baru pada saat tentara Jepang bergerak menuju Bengkulu, Sukarno beserta keluarganya diungsikan oleh polisi ke Padang dengan mengalami penderitaan dalam perjalanan. Menurut rencana, mereka akan dibawa ke Australia, tetapi sesampainya di Padang Belanda dalam keadaan panik karena angkatan laut Jepang sudah mendekat. Di kota itu Sukarno ditinggalkan oleh para polisi yang seharusnya mengawasi dan menjaganya. Setelah mendapatkan hotel untuk keluarganya, Sukarno mencari sahabatnya yang tinggal di kota itu yakni Woworuntu. Keluarga Sukarno kemudian pindah ke rumah Woworuntu. Untuk menenangkan rakyat yang panik, Sukarno mengambil alih tampuk pimpinan. Ia membentuk komando rakyat yang bertugas sebagai pemerintahan sementara dan untuk menjaga ketertiban. Dalam pidatonya pada rapat umum ia menyatakan agar rakyat jangan melawan tentara Jepang, agar dihindari pertumpahan darah, namun jiwa harus tetap bertekad untuk merdeka (Cindy Adams;1966:208)

Pada hari pertama tentara Jepang menduduki Padang, Sukarno dalam pembicaraannya di malam hari dengan Woworuntu menyatakan bahwa ia akan memperlakukakan Jepang untuk kepentingan rakyat (Cindy Adams:21). Esok harinya datang ke rumah Woworuntu kapten Sakaguchi menjumpai Sukarno. Melalui kapten Sakaguchi inilah Kol. Fujiyama, Panglima Tentara Jepang di Bukittinggi, minta agar Sukarno bersedia datang ke Bukittinggi. Permintaan itu dipenuhi oleh Sukarno, dan ia segera datang menghadap Kol. Fujiyama. Dalam pertemuan itu Kol. Fujiyama menanyakan kesediaan Sukarno untuk bekerja sama dengan Jepang. Tawaran itu diterima oleh Sukarno dengan minta jaminan, bahwa selama ia bekerja untuk kepentingan Jepang, ia juga diberi kebebasan bekerja untuk rakyatnya dengan pengantian bahwa tujuannya yang terakhir adalah di suatu waktu, dengan salah satu jalan membebaskan rakyat dari kekuasaan Belanda maupun Jepang. Kol. Fujiyama mengatakan bersedia menjamin dan pemerintah Jepang tidak akan menghalang-halangnya (Cindy Adams:217). Di Bukittinggi itulah Sukarno untuk sementara membantu Fujiyama menjalankan pemerintahannya. Karena kemudian pemerintah militer Jepang di Jawa memerlukan Sukarno maka Sukarno harus kembali ke Jawa. Dalam perjalanan ke Jakarta, Sukarno terpaksa harus tinggal sementara waktu di Palembang karena pembesar militer Jepang di kota itu menghendaki bantuannya untuk memecahkan kesukaran-kesukaran yang mereka hadapi. Setelah sebulan di Palembang Sukarno dibebaskan untuk melanjutkan perjalanannya ke Jakarta.

Ketika tiba di Jakarta pada tanggal 9 Juli 1942 untuk memenuhi keinginan Letnan Jenderal Imamura, maka bertemulah ia dengan kawan-kawan seperjuangannya antara lain Moh. Hatta, bertemu dengan Sutan Syahrir, Sukarno membicarakan taktik perjuangan menghadapi Jepang. Disepakati bahwa mereka akan bekerja dengan dua cara “di atas tanah” dan di bawah tanah”. Menurut Bung Karno, untuk memperoleh konsesi-konsesi politik yang berkenaan dengan pendidikan militer dan jabatan-jabatan pemerintah bagi orang-orang Indonesia, maka jalan yang ditempuh adalah dengan cara kolaborasi (Cindy Adams:265). Pendapat Bung Karno itu dimengerti oleh Bung

Karno dan Sutan Syahrir, yang selanjutnya Bung Hatta sendiri menegaskan bahwa kekuatan Bung Karno adalah untuk menggerakkan masa, jadi Bung Karno harus bekerja secara terang-terangan. Atas tanggapan Bung Hatta itu, Bung Karno minta kesediaan Bung Hatta untuk membantunya. Menyambung pertanyaan Bung Hatta, Sutan Syahrir mengatakan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta barangkali tidak dapat mengelakkan kerjasama itu (Moh. Hatta:416), selanjutnya ia menyanggupkan diri mengadakan gerakan bawah tanah dan menyusun bagian penyadapan berita dan gerakan rahasia lainnya (Cindy Adams:266).

Di samping untuk memperoleh konsesi-konsesi di atas, kerja sama dengan Jepang adalah untuk mendidik dan mempersiapkan rakyat menghadapi revolusi. Jepang memberikan kepada bangsa Indonesia kepercayaan kepada diri sendiri sehingga mengakibatkan bangsa Indonesia tidak merasa lebih rendah dari orang Barat (lenyapnya rasa inferioritet); tetapi kekejaman Jepang memang sangat berat dirasakan. Kondisi seperti ini diharapkan oleh Bung Karno dapat menciptakan kebulatan tekad. Jika rakyat benar-benar merasa berat tertindas, maka akan timbul revolusi mental dan setelah itu menyusul revolusi fisik (Cindy Adams : 267)

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa Sukarno mau bekerja sama dengan Jepang bukan didorong oleh perasaan takut mati karena jiwa pengecut, melainkan sebagai upaya untuk mencari “keuntungan” yang mungkin dapat diperoleh bagi bangsa Indonesia selama pendudukan Jepang. Keuntungan-keuntungan itu sudah barang, tentu berupa kesempatan-kesempatan yang dapat menunjang perjuangan mencapai kemerdekaan Indonesia. Kenyataan telah membuktikan bahwa kerja sama dengan Jepang memberikan peluang untuk dapat berkomunikasi dengan rakyat yang pada masa sebelumnya sulit dilakukan. Terbentuknya Putera (Pusat Tenaga Rakyat) sebagai badan penghimpunan segala potensi rakyat memberikan jalan ke arah itu. Peluang inilah yang kelihatannya ditujukan untuk kepentingan Jepang sebenarnya ditujukan untuk kepentingan bangsa Indonesia sendiri. Semangat anti imperialis Barat dikorbankan sebagaimana dilakukan oleh Bung Karno dengan

ucapannya “Amerika kita seterika, Inggris kita Linggis” (John Lengge;1986:112). Tegasnya dalam setiap kegiatan propaganda selalu diselipkan ajaran-ajaran nasionalisme dan patriotisme agar rakyat tetap tegar dalam menghadapi segala kesulitan dan tekanan-tekanan berat.



Gambar Bung Karno pemimpin Putera (indrasaputra.blogspot.com)

Sejalan dengan semangat anti Barat maka di lapangan pemerintahan orang-orang Indonesia banyak yang menduduki jabatan-jabatan penting yang pada jaman sebelumnya dipegang oleh orang-orang Belanda. Hal ini menguntungkan bangsa Indonesia tidak canggung lagi untuk mengatur dan menjalankan pemerintahan sendiri. Selanjutnya dilapangan pertahanan, dengan alasan untuk memperkuat pertahanan militer Jepang di Indonesia dibentuklah pasukan Pembela Tanah Air (Peta) atas usul seorang pemimpin nasionalis Indonesia. Pembentukan Peta sebenarnya dimaksudkan untuk persiapan bagi kekuatan pertahanan negara Indonesia merdeka. Ketika Republik Indonesia berdiri, banyak mantan prajurit Peta memasuki Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan menjadi inti angkatan perang Republik Indonesia.

4. Kesimpulan.

Dari uraian diatas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa Sukarno dan Moh. Hatta bersedia bekerja sama dengan Jepang didasarkan atas faktor-faktor

sebagai berikut : Pertama, pemerintah militer Jepang keras dan kejam sehingga penderitaan rakyat semakin berat. Untuk meringankan atau mengu-rangi beban rakyat dan melindungi mereka serta untuk keselamatan pribadi Sukarno-hatta mau tidak mau harus berkolaborasi dengan Jepang. Kedua, dengan berkolaborasi, Sukarno-Hatta mengharapkan mendapat konsesi-konsesi politik yang menguntungkan bangsa Indo-nesia dalam rangka mencapai cita-cita perjuangan Indonesia. Ketiga, menyiapkan rakyat untuk menghadapi revolusi, mulai dari revolusi mental yakni perubahan sikap dari patuh, penuntut menjadi menentang, melawan, menuju ke revolusi fisik. Berkaitan dengan itu persatuan nasional dan semangat untuk merdeka perlu tetap digalang dan dipertahankan.

KEPUSTAKAAN

- Alisatroamidjojo,1974, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Jakarta, PT. Kinta
- De Jong, L;1987, *Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta, Kesaint Blanc
- Legge,John;1986, *Gelora Api Revolusi, Sukarno Si Tokoh Politik*, Jakarta, PT. Gramedia
- Moh. Hatta; 1982, *Memoir*, Jakarta, PT. Tinta Mas
- Mujanto,G;1974, *Sejarah Indonesia Bagian I.1900-1945*, jakarta, Kanisius
- Nugroho Notosusanto;1979, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia
- Pringgodigdo, A.G;1978, *Perjuangan Bangsa Indonesia menegakkan Pancasila dalam Masa Penjajahan/Pendudukan Jepang dalam Santiaji Pancasila*, Surabaya, Usaha Nasional

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB VIII
DEMOKRASI DAN DISINTEGRASI
INDONESIA 1945-1968



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 8

DEMOKRASI DAN DISINTEGRASI INDONESIA 1945-1968

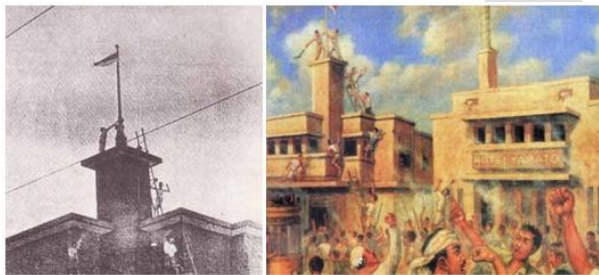
- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menjelaskan makna Maklumat pemerintah tahun 1945 bagi sistem ketatanegaraan RI
- C. KKD :
- D. Materi

Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan Negara, dan bertujuan untuk menjaga kestabilan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinu dan demokrasi dimana seharusnya masyarakat bisa ikut turut andil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Sistem pemerintahan Negara Indonesia, menurut UUD 1945 adalah Sistem Pemerintahan Presidensial (Sistem Kabinet Presidensial), dan yang bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan adalah preseiden. Presiden dibantu para menteri dan bertanggung jawab kepada presiden. Presiden merupakan Mandataris Majelis Permusyawaratan Rakyat dan juga bertanggung jawab kepada MPR.

Sistem Pemerintahan Presidensial, kemudian dirubah dengan sisitem pemerintahan Parlementer. Perubahan ini diawali dengan petisi yang diajukan oleh Sutan Sjahrir, dkk, yang berisi desakan untuk merubah sistem pemerintahan menjadi Parlementer. Karena desakan tersebut, diadakannlah sidang pertama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP), yang membahas tentang sistem pemerintahan RI dan juga badan-badan pembantunya (karena pada saat itu, belum terbentuk MPR dan DPR). Tuntutan Syahrir, dalam sidang KNIP adalah meningkatkan fungsi KNIP sebagai badan legislatif. Sidang ini berjalan dengan sangat gaduh, tetapi dapat dihasilkan rekomendasi perluasan tugas dan wewenang KNIP, yang tercermin pada Maklumat Wakil Presiden Nomer X tanggal 16 Oktober 1945. Dan tanggal 17 Oktober 1945,

diangkat ketua BP-KNIP yaitu Syahrir dan mengesahkan sistem ketatanegaraan RI menjadi Sistem Parleментар.

Agenda kedua Sjahrir, adalah mendorong pembentukan partai-partai politik sebanyak-banyaknya, sebagai sarana penyaluran aspirasi dan paham Sistem Parleментар. Usulan tersebut mendapat persetujuan dari KNIP dan disetujui oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Maklumat Pemerintah No 3, tanggal 3 November 1945. Maklumat tersebut menandai terbentuknya banyak partai politik pada periode tahun November 1945 sampai Januari 1946. Pergolakan dalam penentuan Sistem pemerintah di pusat (Jakarta), dibayang-bayangi oleh keadaan sosial politik Indonesia yang masih rawan. Keinginan Belanda (NICA), yang masih ingin menguasai Indonesia menjadi tantangan tersendiri untuk kestabilan RI. Keinginan NICA tersebut, memicu serangkaian perlawanan bersenjata di berbagai tempat, berikut beberapa perlawanan di daerah.



Gambar 1: Peristiwa perobekan bendera di Hotel Yamato (pelajar-sejati.blogspot.com)

Peristiwa Heroik di Surabaya, salah satu peristiwa perlawanan di Surabaya adalah insiden bendera di Surabaya yang diawali dengan pendaratan tentara Sekutu dan NICA di Surabaya. Belanda

dan Sekutu yang mendarat di Surabaya menginginkan Hotel Yamato dijadikan markas tentara Belanda, dan bendera yang ada diatas hotel diganti dengan bendera Belanda. Tindakan Belanda tersebut, menimbulkan kemarahan rakyat Surabaya, dengan gagah berani, arek-arek Surabaya menyerbu Hotel Yamato untuk menurunkan bendera Belanda . Setelah sampai di atas, bendera Belanda dirobek yang warna birunya lalu dikibarkan kembali sebagai bendera Merah Putih. Peristiwa yang lainnya adalah, tentara Sekutu telah membebaskan orang-orang Belanda yang ditahan di penjara Kalisosok. Mereka juga menduduki Pakalan Udara Tanjung Perak dan Gedung Internatio.

Melihat ulah tentara Sekutu, maka rakyat mulai mengadakan perlawanan, dalam peristiwa tersebut mengakibatkan tewasnya Brigjen Mallaby, oleh karena itu, pihak Inggris dibawah pimpinan EC. Mansergh mengeluarkan ultimatum

agar tentara dan para pemuda Surabaya menyerah paling lambat pukul 06.00 pada tanggal 10 November 1945. Ternyata ultimatum dari Inggris itu dipedulikan. Sehingga Inggris naik pitam dan segera melancarkan serangan besar-besaran di Kota Surabaya. Untuk mengenang peristiwa heroik di Surabaya itu, setiap tanggal 10 November selalu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Sebagai peringatan Kota Surabaya, maka dibangunlah Tugu Pahlawan.

Pertempuran Ambarawa, diawali dengan Sekutu yang ingkar janji dan menyalahi tugasnya. Tentara Sekutu bersama tentara NICA telah melakukan teror dan menindas penduduk, di Magelang. Oleh karena itu, timbullah perlawanan dari TKR dan para pejuang. Para pejuang kita yang dipimpin oleh Imam Adrongi dan Letkol M. Sarbini telah melakukan perlawanan. Pada tanggal 23 November 1945, terjadilah pertempuran yang sengit antara tentara Sekutu yang didukung NICA dengan para pejuang RI.

Dalam serangan ini, Letkol Isdiman yang baru saja disertai pimpinan tempur gugur tertembak oleh pasukan musuh. Tampilah Kolonel Sudirman Panglima Divisi Banyumas untuk memimpin serangan ke Ambarawa, menggantikan Letkol Isdiman. Sudirman merencanakan untuk menggunakan taktik supit urang, untuk menyerang Sekutu. Pada tanggal 12 Desember 1945 sekitar pukul 04.30, serangan Kolonel Sudirman dilancarkan. Kota Ambarawa dikepung sehingga Sekutu terdesak dan bertahan di Benteng Willem. Oleh karena terus terdesak, pada tanggal 15 Desember 1945, Sekutu meninggalkan Ambarawa menuju Semarang. Perginya Sekutu



Gambar 2: Ilustrasi Bandung Lautan Api
(info-wisatadibandung.blogspot.com)

dari Ambarawa menandai telah berakhirnya Pertempuran Ambarawa. Untuk mengenang peristiwa itu di Ambarawa didirikan Monumen Palagan Ambarawa, dan pada tanggal 15 Desember dijadikan sebagai hari Infanteri

Pada tanggal 17 Agustus 1945, pasukan Sekutu memasuki Kota Bandung. Tanpa menghiraukan penduduk, pasukan Sekutu yang dibantu oleh NICA mulai menduduki daerah Bandung Utara. Pertempuran terjadi diberbagai tempat di sekitar pabrik kina di Jalan Riau, Hotel Preanger. Pada tanggal 28

November 1945, terjadi lagi pertempuran sengit di Gedung Sate . Para Pemuda membakar rumah-rumah orang Belanda, hal itu mengakibatkan tentara Sekutu naik pitam dan melancarkan serangan bom dari udara. Pada tanggal 23 Maret 1946, Sekutu kembali mengeluarkan ultimatum. Sekutu memerintahkan kepada TRI dan penduduk untuk mengosongkan seluruh Kota Bandung dan mundur ke luar kota. Untuk menghindari jatuh korban, pemerintah RI menyetujui pengosongan Kota Bandung. Kota Bandung kemudian di bakar sehingga menjadi “Lautan Api”. Bahkan, markas-markas TRI juga dibakar oleh anggota TRI yang akan meninggalkan tempat. Inilah pengorbanan perjuangan. Peristiwa itulah yang kita kenal dengan Bandung Lautan Api.

Peristiwa Medan Area, pada tanggal 9 Oktober 1945, pasukan Inggris atas nama Sekutu telah mendarat di Sumatera Utara. Pasukan Sekutu ini dipimpin oleh T.E.D. Kelly, pasukan Sekutu ini juga diikuti oleh tentara NICA. Pada awalnya kedatangan mereka disambut oleh tokoh dan masyarakat di Sumatera Utara. Akan tetapi, tindakan tentara Sekutu menyakitkan rakyat. Seorang oknum penghuni hotel menginjak-injak bendera merah putih, akibatnya, hotel diserang oleh para pemuda sehingga timbul banyak korban. Peristiwa ini menjadi awal terjadinya pertempuran Medan Area. Tentara Sekutu melancarkan aksi militer secara besar-besaran, serangan diawali pada tanggal 10 Desember 1945, rakyat pun melakukan perlawanan sekuat tenaga.

Puputan Margarana, Seperti daerah lainnya, rakyat Bali juga berusaha sekuat tenaga untuk mempertahankan kemerdekaan dan merebut kekuasaan dari Belanda. Ternyata sejak Maret 1946, Belanda sudah menduduki beberapa tempat di Bali. I Gusti Ngurah Rai kembali ke Bali untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda. Ngurah Rai mendapat bantuan dari TRI – Laut dengan pimpinan Kapten Markadi. Dalam perjalanan menyeberangi Selat Bali telah terjadi pertempuran laut antara pasukan Ngurah Rai dengan patroli Belanda. Pertempuran juga terjadi di Cekik dekat Gilimanuk, Bali. Ngurah Rai terus berjuang sekuat tenaga untuk mengusir Belanda, dengan melakukan *long march* dari kota satu ke kota lain, dan melancarkan serangan-serangan terhadap Belanda. Pada tanggal 18 November 1946, tentara Ngurah Rai (yang dikenal Pasukan Cing Wanara) mulai menyerang Tabanan dan berhasil. Belanda

segera mengerahkan kekuatannya dari Bali dan Lombok, kekuatan yang tidak seimbang pasukan Ngurah Rai kemudian melakukan Perang Puputan (Pertempuran habis-habisan). Pertempuran terjadi di Margarana dan dimulai pada tanggal 20 November 1946. Dalam pertempuran tersebut, pada tanggal 29 November, Ngurah Rai gugur sebagai kusuma bangsa.

Peristiwa Merah Putih di Minahasa, seperti di daerah lain, rakyat Minahasa melakukan mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda. Pada awal September 1945, tentara Sekutu yang diwakili tentara Australia mendarat di Minahasa. Kedatangan mereka diikuti oleh tentara NICA, dan segera melancarkan aksinya untuk menegakkan kembali kekuatannya. Sekutu dan NICA kemudian mengeluarkan perintah larangan pengibaran bendera Merah Putih, tetapi larangan tersebut tidak dihiraukan rakyat. Dengan semboyan “hidup atau mati”, rakyat Minahasa tetap akan mempertahankan berkibarnya Sang Saka Merah Putih di Tanah Minahasa. Akhirnya, bentrokan dan pertempuran antara rakyat Minahasa melawan tentara Sekutu dan NICA tidak dapat dihindarkan. Bentrokan terjadi di Tondano dan Tomohon. Pihak musuh cukup kuat karena persenjataannya lengkap. Oleh karena itu, perjuangan rakyat Minahasa dilanjutkan dengan perjuangan melalui bawah tanah.

Pertempuran Rakyat Makassar, pada bulan Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Makassar di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Pasukan Westerling bertindak kejam. Pasukan Westerling banyak melakukan pembunuhan terhadap rakyat Makassar, akibatnya terjadi perlawanan rakyat Makassar kepada Belanda. Perlawanan di pimpin oleh Wolter Monginsidi, akan tetapi Wolter Monginsidi berhasil ditangkap Belanda dan kemudian dijatuhi hukuman mati.



Gambar 3 : I Gusti Ngurah Rai
(www.biografiku.com)

Selain dengan kekuatan senjata, perjuangan bangsa Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaannya juga dilakukan dengan jalan perundingan atau diplomasi.

Perundingan Linggarjati

Perang yang terjadi antara para pejuang dengan tentara sekutu yang diboncengi oleh NICA, telah menimbulkan banyak korban. Melihat kondisi tersebut para pemimpin dari kedua pihak berusaha untuk mencari jalan damai

dengan melakukan perundingan. Atas dasar prakarsa Lord Killearn pada 10 November 1946 disepakati persetujuan Linggarjati (Cirebon) yang isinya :

1. Belanda mengakui secara De Facto kekuasaan RI atas Jawa, Sumatra, dan Madura.
2. Pemerintah RI dan Belanda bekerja sama membentuk Republik Indonesia Serikat (RIS).
3. Negara Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda sebagai ketuanya. Delegasi Indonesia dipimpin oleh Sutan Syahrir sedangkan Belanda dipimpin oleh Prof. Schermerhorn, Van Poll, dan De Boer. Penandatanganan persetujuan dilakukan pada 25 Maret 1947.

Perundingan Renville

Persetujuan Linggarjati merugikan bangsa Indonesia dan menimbulkan perbedaan penafsiran di antara keduanya. Sementara itu, Belanda dengan berbagai cara berusaha untuk melemahkan kekuatan Republik Indonesia. Pada 8 Desember 1947, delegasi perjanjian renville Indonesia dipimpin PM. Amir Syarifudin, sedangkan Belanda dipimpin R. Abdulkadir Wijoyoatmojo. isi perjanjian Renville : (1) Belanda tetap berdaulat atas wilayah RI sampai kedaulatannya diserahkan kepada RIS yang segera dibentuk, (2) RIS sejajar dengan Belanda dalam Uni Indonesia – Belanda, (3) Republik Indonesia merupakan bagian dari RIS, (4) Pasukan Republik Indonesia yang berada di daerah Kantong (Daerah yang berada dibelakang garis Van Mook) harus ditarik ke wilayah RI, (5) Adanya penghentian tembak-menembak disepanjang garis van mook, dan (6) Penghentian tembak-menembak diikuti dengan peletakkan senjata dan pembentukan daerah kosong militer. Perjanjian Renville menempatkan Republik Indonesia pada kedudukan yang sangat sulit. Wilayah Indonesia semakin sempit karena pendudukan Belanda. Dan dipersulit dengan adanya blokade yang dilancarkan Belanda.

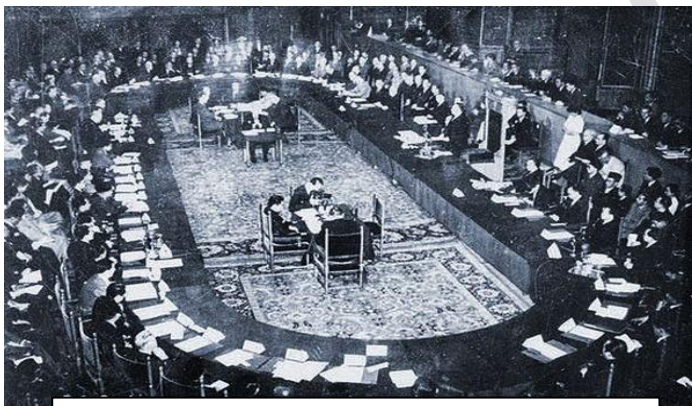
Perjanjian Roem – Royen

Perjanjian ini dimulai pada tanggal 14 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Mohammad Roem dan Herman van Roijen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB di Den Haag Hasil pertemuan ini adalah: 1) Angkatan bersenjata Indonesia

akan menghentikan semua aktivitas gerilya, 2) Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB, 3) Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta, 4) Angkatan bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang.



Gambar 4: Perjanjian Roem Royyen/jagosejarah.blogspot.com



Konferensi Meja Bundar (jagosejarah.blogspot.com)

Konferensi Meja Bundar (KMB)

Konferensi Meja Bundar (KMB) adalah sebuah titik terang bagi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan kedaulatan dari Belanda, menyelesaikan sengketa antara

Indonesia-Belanda, dan berusaha menjadi negara yang merdeka dari para penjajah. Konferensi Meja Bundar (KMB) dibuka secara resmi di Ridderzaal, Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus 1949. Berikut ini adalah delegasi-delegasi yang menghadiri KMB: Delegasi Indonesia dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta, Delegasi BFO dipimpin oleh Sultan Hamid II, Delegasi UNCI dihadiri oleh Chritchley, Merle Cochran, dan Heermans, 4. Delegasi Belanda dipimpin oleh J.H. van Maarseveen.

KMB ini dipimpin oleh PM. Belanda, W. Dress dari tanggal 23 Agustus sampai dengan tanggal 2 November 1949. KMB ini berlangsung melalui perdebatan yang panjang. Akhirnya, setelah melalui perundingan yang berlarut-larut pada tanggal 2 November 1949 tercapailah persetujuan KMB.

Berikut ini adalah hasil persetujuan yang telah dicapai dalam KMB:

1. Belanda mengakui RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat selambat-lambatnya pada tanggal 30 Desember 1949.
2. Masalah Irian Barat akan diselesaikan dalam waktu satu tahun sesudah pengakuan kedaulatan.
3. Akan didirikan Uni Indonesia Belanda berdasarkan kerja sama.
4. Pengembalian hak milik Belanda oleh RIS dari pemberian hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan.
5. RIS harus membayar segala utang Belanda yang diperbuatnya sejak tahun 1942.

Untuk menindaklanjuti hasil KMB maka tanggal 16 Desember 1949 Ir. Soekarno dilantik sebagai presiden RIS, dan pada tanggal 17 Desember 1949 diambil



Gambar 6 : Suasana multi partai, hampir 80 partai
(www.jitunews.com)

sumpahnya. Pada tanggal 20 Desember 1949, Presiden Soekarno membentuk kabinet RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta sebagai perdana menteri. Pada tanggal 23 Desember 1949, delegasi RIS yang dipimpin oleh Drs. Moh. Hatta berangkat ke Belanda untuk menandatangani naskah pengakuan kedaulatan RI dari pemerintah Belanda. Upacara penandatanganan naskah pengakuan kedaulatan tersebut dilakukan pada waktu yang bersamaan, baik di Indonesia maupun di Belanda yaitu pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan ditandatanganinya naskah penyerahan kedaulatan maka secara formal Belanda telah mengakui kemerdekaan Indonesia dan mengakui kedaulatan penuh negara Indonesia di seluruh bekas wilayah Hindia Belanda (kecuali Irian Barat).

Demokrasi Liberal

Robert A. Dahl, dalam studinya yang terkenal, mengajukan lima kriteria bagi demokrasi sebagai sebuah ide politik (Robert A. Dahl, 1985). Yaitu : (1) Persamaan hak pilih dalam menentukan keputusan kolektif yang mengikat; (2) partisipasi efektif, yaitu kesempatan yang sama bagi semua warga Negara dalam proses pembuatan keputusan secara kolektif; (3) pembeberan kebenaran, yaitu adanya peluang yang sama bagi setiap orang untuk memberikan penilaian terhadap jalannya proses politik dan pemerintahan secara logis; (4) kontrol terakhir terhadap agenda, yaitu adanya kekuasaan eksklusif bagi

masyarakat untuk menentukan agenda mana yang harus dan tidak harus diputuskan melalui proses pemerintahan, termasuk mendelegasikan kekuasaan itu pada orang lain atau lembaga yang mewakili masyarakat; (5) Pencakupan, yaitu terliputnya masyarakat mencakup orang dewasa, dalam kaitannya dengan hukum.

Dalam definisinya ini Dahl, tampak mementingkan keterlibatan masyarakat dalam proses formulasi kebijakan, dan adanya pengawasan terhadap kekuasaan dan dijaminnya persamaan perlakuan Negara terhadap semua warga Negara sebagai bagian dari unsure-unsur demokrasi.

Definisi demokrasi yang sejalan dengan Dahl datang dari April Carter, William Ebenstein dan Edwin Fogelman. Carter mendefinisikan demokrasi secara ringkas, padat, dan tepat sebagai “membatasi kekuasaan”. (April Carter, 1985:25) Seperti yang sudah dijelaskan diatas, pada masa demokrasi Liberal hampir semua elemen demokrasi dapat ditemukan, contohnya :

1. Lembaga perwakilan rakyat memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Perwujudan kekuasaan parlemen diperlihatkan dengan sejumlah mosi tidak percaya kepada pemerintah, yang mengakibatkan cabinet harus meletakkan jabatannya. Hal ini terlihat dalam seringnya kabinet berganti-ganti, hampir satu kabinet, hanya bertahan selama kurang lebih satu tahun saja.
2. Akuntabilitas pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial.
3. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya, untuk berkembang. Ada hampir 40 partai politik yang dibentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen, campur tangan pemerintah tidak ada sama sekali.
4. Pelaksanaan pemilu tahun 1955, dilakukan dengan prinsip demokrasi.
5. Masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga Negara dapat merasakannya dengan maksimal (Afan Gaffar,2001:30)

Pada masa demokrasi liberal dalam Indonesia, susunan kabinet yang menjalankan roda pemerintahan Indonesia, adalah sebagai berikut:

KABINET NATSIR (6 September 1950 – 21 Maret 1951)

Kabinet ini dilantik pada tanggal 7 September 1950, dengan Mohammad Natsir (Masyumi) sebagai perdana menteri. Kabinet ini merupakan kabinet koalisi yang dipimpin oleh partai Masyumi, dan juga merupakan kabinet koalisi di mana PNI sebagai partai kedua terbesar dalam parlemen tidak turut serta, karena tidak diberi kedudukan yang sesuai. Kabinet ini pun sesungguhnya merupakan kabinet yang kuat pormasinya di mana tokoh-tokoh terkenal duduk di dalamnya, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mr. Asaat, Ir. Djuanda, dan Prof Dr. Soemitro Djojohadikusumo.

Program pokok dari Kabinet Natsir adalah:

1. Menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman.
2. Mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintahan.
3. Menyempurnakan organisasi Angkatan Perang.
4. Mengembangkan dan memperkuat ekonomi rakyat.
5. Memperjuangkan penyelesaian masalah Irian Barat.

Keberhasilan yang pernah dicapai oleh Kabinet Natsir:

1. Di bidang ekonomi, ada **Sumitro Plan** yang mengubah ekonomi kolonial ke ekonomi nasional.
2. Indonesia masuk PBB
3. Berlangsung perundingan antara Indonesia-Belanda untuk pertama kalinya mengenai masalah Irian Barat.

Sementara kendala/masalah yang dihadapi selama kabinet Natsir adalah sebagai berikut:

1. Upaya memperjuangkan masalah Irian Barat dengan Belanda mengalami jalan buntu (kegagalan)
2. Pada penerapan Sumitro Plan, pengusaha nasional diberi bantuan kredit, tetapi bantuan itu diselewengkan penggunaannya sehingga tidak mencapai sasaran
3. Timbul masalah keamanan dalam negeri yaitu terjadi pemberontakan hampir di seluruh wilayah Indonesia, seperti Gerakan DI/TII, Gerakan Andi Azis, Gerakan APRA, Gerakan RMS

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh adanya mosi tidak percaya dari PNI menyangkut pencabutan Peraturan Pemerintah mengenai DPRD dan DPRDS. PNI menganggap peraturan pemerintah No. 39 th 1950 mengenai DPRD terlalu menguntungkan Masyumi. Mosi tersebut disampaikan kepada parlemen tanggal 22 Januari 1951 dan memperoleh kemenangan, sehingga pada tanggal 21 Maret 1951 Natsir harus mengembalikan mandatnya kepada Presiden.

KABINET SUKIMAN (27 April 1951 – 3 April 1952)

Setelah Kabinet Natsir mengembalikan mandatnya pada presiden, presiden menunjuk Sartono (Ketua PNI) menjadi formatur. Hampir satu bulan beliau berusaha membentuk kabinet koalisi antara PNI dan Masyumi. Namun usahanya itu mengalami kegagalan, sehingga ia mengembalikan mandatnya kepada presiden setelah bertugas selama 28 hari (28Maret-18 April 1951).Presiden Soekarno kemudian menunjukan Sidik Djojokusastro (PNI) dan Soekiman Wijosandjojo (Masyumi) sebagai formatur dan berhasil membentuk kabinet koalisi dari Masyumi dan PNI. Kabinet ini terkenal dengan nama Kabinet Soekiman (Masyumi)- Soewirjo (PNI) yang dipimpin oleh Soekiman.

Program pokok Kabinet Sukiman adalah sebagai berikut.

1. Menjamin keamanan dan ketentraman
2. Mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbaharui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani.
3. Mempercepat persiapan pemilihan umum.
4. Menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya.
5. Di bidang hukum, menyiapkan undang – undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerja sama,penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Soekiman yaitu tidak terlalu berarti sebab programnya melanjutkan program Natsir hanya saja terjadi perubahan skala prioritas dalam pelaksanaan programnya, seperti awalnya program menggiatkan usaha keamanan dan ketentraman selanjutnya diprioritaskan untuk menjamin keamanan dan ketentraman.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

1. Adanya Pertukaran Nota Keuangan antara Mentri Luar Negeri Indonesia Soebardjo dengan Duta Besar Amerika Serikat Merle Cochran. Mengenai pemberian bantuan ekonomi dan militer dari pemerintah Amerika kepada Indonesia berdasarkan ikatan *Mutual Security Act* (MSA). Dimana dalam MSA terdapat pembatasan kebebasan politik luar negeri RI karena RI diwajibkan memperhatikan kepentingan Amerika. Tindakan Sukiman tersebut dipandang telah melanggar politik luar negara Indonesia yang bebas aktif karena lebih condong ke blok barat bahkan dinilai telah memasukkan Indonesia ke dalam blok barat.
2. Adanya krisis moral yang ditandai dengan munculnya korupsi yang terjadi pada setiap lembaga pemerintahan dan kegemaran akan barang-barang mewah.
3. Masalah Irian barat belum juga teratasi.
4. Hubungan Sukiman dengan militer kurang baik tampak dengan kurang tegasnya tindakan .

pemerintah menghadapi pemberontakan di Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan.

Berakhirnya kekuasaan kabinet disebabkan oleh pertentangan dari Masyumi dan PNI atas tindakan Sukiman sehingga mereka menarik dukungannya pada kabinet tersebut. DPR akhirnya menggugat Sukiman dan terpaksa Sukiman harus mengembalikan mandatnya kepada presiden.



KABINET WILOPO (3 April 1952 – 3 Juni 1953)

Pada tanggal 1 Maret 1952, Presiden Soekarno menunjukan Sidik Djojokusarto (PNI) dan Prawoto Mangkusasmito (M asyumi) menjadi formatur, namun gagal. Kemudian menunjuk Wilopo dari PNI sebagai formatur. Setelah bekerja selama dua minggu berhasil dibentuk kabinet baru di bawah pimpinan Perdana Mentari Wilopo, sehingga bernama kabinet Wilopo. Kabinet ini mendapat dukungan dari PNI, Masyumi, dan PSI. Program pokok dari Kabinet Wilopo adalah:

1. Program dalam negeri: (a) Menyelenggarakan pemilihan umum (konstituante, DPR, dan DPRD), (b) Meningkatkan kemakmuran rakyat, (c) Meningkatkan pendidikan rakyat, dan pemulihan keamanan.

2. Program luar negeri: (a) Penyelesaian masalah hubungan Indonesia-Belanda, (b) Pengembalian Irian Barat ke pangkuan Indonesia, (c) Menjalankan politik luar negeri yang bebas-aktif

Kabinet ini tidak mempunyai prestasi yang bagus, justru sebaliknya banyak sekali kendala yang muncul antara lain sebagai berikut.

1. Adanya kondisi krisis ekonomi yang disebabkan karena jatuhnya harga barang-barang ekspor Indonesia sementara kebutuhan impor terus meningkat.
2. Terjadi defisit kas negara karena penerimaan negara yang berkurang banyak terlebih setelah terjadi penurunan hasil panen sehingga membutuhkan biaya besar untuk mengimport beras.
3. Munculnya gerakan separatisme dan sikap provinsialisme yang mengancam keutuhan bangsa. Semua itu disebabkan karena rasa ketidakpuasan akibat alokasi dana dari pusat ke daerah yang tidak seimbang.
4. Terjadi peristiwa 17 Oktober 1952.

Peristiwa tanggal 17 Oktober 1952, merupakan upaya pemerintah untuk menempatkan TNI sebagai alat sipil sehingga muncul sikap tidak senang dikalangan partai politik sebab dipandang akan membahayakan kedudukannya. Peristiwa ini diperkuat dengan munculnya masalah intern dalam TNI sendiri yang berhubungan dengan kebijakan KSAD A.H Nasution yang ditentang oleh Kolonel Bambang Supeno sehingga ia mengirim petisi mengenai penggantian KSAD kepada menteri pertahanan yang dikirim ke seksi pertahanan parlemen sehingga menimbulkan perdebatan dalam parlemen. Konflik semakin diperparah dengan adanya surat yang menjelekkkan kebijakan Kolonel Gatot Subroto dalam memulihkan keamanan di Sulawesi Selatan. Keadaan ini menyebabkan muncul demonstrasi di berbagai daerah menuntut dibubarkannya parlemen. Sementara itu TNI-AD yang dipimpin Nasution menghadap presiden dan menyarankan agar parlemen dibubarkan. Tetapi saran tersebut ditolak, dan muncullah mosi tidak percaya dan menuntut diadakan reformasi dan reorganisasi angkatan perang dan mengecam kebijakan KSAD. Intiperistiwa ini adalah gerakan sejumlah perwira angkatan darat guna menekan Sukarno agar membubarkan kabinet.

Selain itu, munculnya peristiwa Tanjung Morawa merupakan sebuah peristiwa penting pada masa Kabinet Wilopo. Peristiwa ini mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Sesuai dengan perjanjian KMB pemerintah mengizinkan pengusaha asing untuk kembali ke Indonesia, dan memiliki tanah-tanah perkebunan. Tanah perkebunan di Deli yang telah ditinggalkan pemiliknya selama masa Jepang telah digarap oleh para petani di Sumatera Utara dan dianggap miliknya, sehingga pada tanggal 16 Maret 1953 muncullah aksi kekerasan untuk mengusir para petani liar Indonesia yang dianggap telah mengerjakan tanah tanpa izin tersebut. Para petani tidak mau pergi sebab telah dihasut oleh PKI, akibatnya terjadi bentrokan senjata dan beberapa petani terbunuh. Intinya peristiwa Tanjung Morawa merupakan peristiwa bentrokan antara aparat kepolisian dengan para petani liar mengenai persoalan tanah perkebunan di Sumatera Timur (Deli). Akibat peristiwa Tanjung Morawa muncullah mosi tidak percaya dari Serikat Tani Indonesia terhadap kabinet Wilopo. Sehingga Wilopo harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 2 Juni 1953.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO I (31 Juli 1953 – 12 Agustus 1955)

Kabinet keempat adalah kabinet Ali Sastroamidjojo, yang terbentuk pada tanggal 31 Juli 1953. Betapapun kabinet ini tanpa dukungan Masyumi, namun kabinet Ali ini mendapat dukungan yang cukup banyak dari berbagai partai yang diikutsertakan dalam kabinet, termasuk partai baru NU. Kabinet Ali ini dengan Wakil Perdana Menteri Mr. Wongsonegoro (partai Indonesia Raya PIR). Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo I adalah:



Gambar 7: Suasana Tanjung Morawa
(pembentuk-pikiran.blogspot.com)

1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran serta segera menyelenggarakan Pemilu.
2. Pembebasan Irian Barat secepatnya.
3. Pelaksanaan politik bebas-aktif dan peninjauan kembali persetujuan KMB.
4. Penyelesaian Pertikaian politik.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo I yaitu.

1. Persiapan Pemilihan Umum untuk memilih anggota parlemen yang akan diselenggarakan pada 29 September 1955.
2. Menyelenggarakan Konferensi Asia-Afrika tahun 1955.
3. Konferensi Asia-Afrika I ini diselenggarakan di Bandung pada tanggal 18-24 April 1955. Konferensi dihadiri oleh 29 negara–negara Asia dan Afrika, terdiri 5 negara pengundang dan 24 negara yang diundang.

Konferensi Asia – Afrika I ini menghasikan beberapa kesepakatan yaitu : *Basic peper on Racial Discrimination* dan *basic peper on Radio Activity*. Kesepakatan yang lain terkenal dengan dasa sila Bandung, dengan terlaksananya Konferensi Asia Afrika I merupakan prestasi tersendiri bagi bangsa Indonesia.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

1. Menghadapi masalah keamanan di daerah yang belum juga dapat terselesaikan, seperti DI/TII di Jawa Barat, Sulawesi Selatan, dan Aceh.
2. Terjadi peristiwa 27 Juni 1955 suatu peristiwa yang menunjukkan adanya kemelut dalam tubuh TNI-AD. Masalah TNI –AD yang merupakan kelanjutan dari Peristiwa 17 Oktober 1952. Bambang Sugeng sebagai Kepala Staf AD mengajukan permohonan berhenti dan disetujui oleh kabinet. Sebagai gantinya menteri pertahanan menunjuk Kolonel Bambang Utoyo tetapi panglima AD menolak pemimpin baru tersebut karena proses pengangkatannya dianggap tidak menghiraukan norma-norma yang berlaku di lingkungan TNI-AD. Bahkan ketika terjadi upacara pelantikan pada 27 Juni 1955 tidak seorangpun panglima tinggi yang hadir meskipun mereka berada di Jakarta. Wakil KSAD-pun menolak melakukan serah terima dengan KSAD baru.
3. Keadaan ekonomi yang semakin memburuk, maraknya korupsi, dan inflasi yang menunjukkan gejala membahayakan.
4. Memudarnya kepercayaan rakyat terhadap pemerintah.
5. Munculnya konflik antara PNI dan NU yang menyebabkan, NU memutuskan untuk menarik kembali menteri-mentrinya pada tanggal 20 Juli 1955 yang diikuti oleh partai lainnya.

Pada akhirnya NU, menarik dukungan dan menterinya dari kabinet sehingga keretakan dalam kabinetnya inilah yang memaksa Ali harus mengembalikan mandatnya pada presiden pada tanggal 24 Juli 1955.

KABINET BURHANUDDIN HARAHAP (12 Agustus 1955 – 3 Maret 1956)

Kabinet Ali selanjutnya digantikan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap. Burhanuddin Harahap berasal dari Masyumi., sedangkan PNI membentuk oposisi. Program pokok dari Kabinet Burhanuddin Harahap adalah:

1. Mengembalikan kewibawaan pemerintah, yaitu mengembalikan kepercayaan Angkatan Darat dan masyarakat kepada pemerintah.
2. Melaksanakan pemilihan umum menurut rencana yang sudah ditetapkan dan mempercepat terbentuknya parlemen baru.
3. Masalah desentralisasi, inflasi, pemberantasan korupsi.
4. Perjuangan pengembalian Irian Barat.
5. Politik Kerjasama Asia-Afrika berdasarkan politik luar negeri bebas aktif.

Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Burhanuddin Harahap yaitu.

1. Penyelenggaraan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955 (memilih anggota DPR) dan 15 Desember 1955 (memilih *konstituante*). Terdapat 70 partai politik yang mendaftar tetapi hanya 27 partai yang lolos seleksi, dan menghasilkan 4 partai politik besar yang memperoleh suara terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI.

Tabel 1: Hasil Pemilu pertama Indonesia tahun 1955

Nama Partai	Jumlah Suara Sah	% Suara Sah	Jumlah Kursi di Parlemen	% Kursi di Parlemen
PNI	8.434.653	22.3	57	22.2
Masyumi	7.903.886	21.9	51	22.2
NU	6.955.141	18.4	45	17.5
PKI	6.176.914	16.4	39	15.2
PSII	1.091.160	2.9	8	3.1
Parkindo	1.003.325	2.6	8	3.1
Partai	770.740	2.0	6	2.3

Katolik				
PSI	753.191	2.0	5	1.9
Partai Murba	199.588	0.5	2	0.8
Lain-lain	4.486.701	12	30	11.7
Jumlah	37.785.299	100	257	100

2. Perjuangan Diplomasi Menyelesaikan masalah Irian Barat dengan pembubaran Uni Indonesia-Belanda.
3. Pemberantasan korupsi dengan menangkap para pejabat tinggi yang dilakukan oleh polisi militer.
4. Terbinanya hubungan antara Angkatan Darat dengan Kabinet Burhanuddin.
5. Menyelesaikan masalah peristiwa 27 Juni 1955, yang mana menjadi penyebab kegagalan dari kabinet Ali dengan mengangkat Kolonel AH Nasution sebagai Staf Angkatan Darat pada 28 Oktober 1955.

Kendala atau masalah yang dihadapi oleh kabinet ini adalah banyaknya mutasi dalam lingkungan pemerintahan dianggap menimbulkan ketidaktenangan. Dengan berakhirnya pemilu, maka tugas kabinet Burhanuddin dianggap selesai. Pemilu tidak menghasilkan dukungan yang cukup terhadap kabinet sehingga kabinetpun jatuh. Akan dibentuk kabinet baru yang harus bertanggungjawab pada parlemen yang baru pula.

KABINET ALI SASTROAMIJOYO II (20 Maret 1956 – 4 Maret 1957)

Ali Sastroamijoyo kembali disertai mandat untuk membentuk kabinet baru pada tanggal 20 Maret 1956. Kabinet ini merupakan hasil koalisi 3 partai yaitu PNI, Masyumi, dan NU. Program pokok dari Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah:

1. Program kabinet ini disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun yang memuat program jangka panjang, sebagai berikut. (a) Perjuangan pengembalian Irian Barat, (b) Pembentukan daerah-daerah otonomi dan mempercepat terbentuknya anggota-anggota DPRD, (c) Mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh dan pegawai, (d) Menyejahterakan perimbangan keuangan negara, dan (e) Mewujudkan

perubahan ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional berdasarkan kepentingan rakyat.

2. Pembatalan KMB.

3. Pemulihan keamanan dan ketertiban, pembangunan lima tahun, menjalankan politik luar negeri bebas aktif.

4. Melaksanakan keputusan KAA. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Ali Sastroamijoyo II adalah kabinet ini mendapat dukungan penuh dari presiden dan dianggap sebagai titik tolak dari periode planning and investment, hasilnya adalah Pembatalan seluruh perjanjian KMB.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut.

1. Berkobarnya semangat anti Cina di masyarakat.

2. Muncul pergolakan/kekacauan di daerah yang semakin menguat dan mengarah pada gerakan sparatisme dengan pembentukan dewan militer seperti Dewan Banteng di Sumatera Tengah, Dewan Gajah di Sumatera Utara, Dewan Garuda di Sumatra Selatan, Dewan Lambung Mangkurat di Kalimantan Selatan, dan Dewan Manguni di Sulawesi Utara.

3. Memuncaknya krisis di berbagai daerah karena pemerintah pusat dianggap mengabaikan pembangunan di daerahnya.

4. Pembatalan KMB oleh presiden menimbulkan masalah baru khususnya mengenai nasib modal pengusaha Belanda di Indonesia. Banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya pada orang Cina karena memang merekalah yang kuat ekonominya. Muncullah peraturan yang dapat melindungi pengusaha Nasional.

5. Timbulnya perpecahan antara Masyumi dan PNI. Masyumi menghendaki agar Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya sesuai tuntutan daerah, sedangkan PNI berpendapat bahwa mengembalikan mandat berarti meninggalkan asas demokrasi dan parlementer.

Mundurnya sejumlah menteri dari Masyumi membuat kabinet hasil Pemilu I ini jatuh dan menyerahkan mandatnya pada presiden.

KABINET DJUANDA (9 April 1957- 5 Juli 1959)

Kabinet ini merupakan zaken kabinet yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar yang ahli dalam bidangnya. Dibentuk karena Kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-undang Dasar pengganti UUDS 1950. Serta terjadinya perebutan kekuasaan antara partai politik. Dipimpin oleh Ir. Juanda. Program pokok (Panca Karya) dari Kabinet Djuanda adalah: (1) Membentuk Dewan Nasional, (2) Normalisasi keadaan Republik Indonesia, (3) Melancarkan pelaksanaan Pembatalan KMB, (4) Perjuangan pengembalian Irian Jaya, dan (5) Mempercepat proses Pembangunan.

Semua itu dilakukan untuk menghadapi pergolakan yang terjadi di daerah, perjuangan pengembalian Irian Barat, menghadapi masalah ekonomi serta keuangan yang sangat buruk. Hasil atau prestasi yang berhasil dicapai oleh Kabinet Djuanda yaitu:

1. Mengatur kembali batas perairan nasional Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, yang mengatur mengenai laut pedalaman dan laut teritorial. Melalui deklarasi ini menunjukkan telah terciptanya Kesatuan Wilayah Indonesia dimana lautan dan daratan merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat.
2. Terbentuknya Dewan Nasional sebagai badan yang bertujuan menampung dan menyalurkan pertumbuhan kekuatan yang ada dalam masyarakat dengan presiden sebagai ketuanya. Sebagai titik tolak untuk menegakkan sistem demokrasi terpimpin.
3. Mengadakan Musyawarah Nasional (Munas) untuk meredakan pergolakan di berbagai daerah. Musyawarah ini membahas masalah pembangunan nasional dan daerah, pembangunan angkatan perang, dan pembagian wilayah RI.
4. Diadakan Musyawarah Nasional Pembangunan untuk mengatasi masalah krisis dalam negeri tetapi tidak berhasil dengan baik.

Kendala/ Masalah yang dihadapi oleh kabinet ini sebagai berikut:

1. Kegagalan Menghadapi pergolakan di daerah sebab pergolakan di daerah semakin meningkat. Hal ini menyebabkan hubungan pusat dan daerah menjadi terhambat. Munculnya pemberontakan seperti PRRI/Permesta.
2. Keadaan ekonomi dan keuangan yang semakin buruk sehingga program pemerintah sulit dilaksanakan. Krisis demokrasi liberal mencapai puncaknya.

3. Terjadi peristiwa Cikini, yaitu peristiwa percobaan pembunuhan terhadap Presiden Sukarno di depan Perguruan Cikini saat sedang menghadiri pesta sekolah tempat putra-purinya bersekolah pada tanggal 30 November 1957.

Peristiwa Cikini, menyebabkan keadaan negara semakin memburuk karena mengancam kesatuan Negara. Kabinet Djuanda berakhir saat presiden Sukarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mulailah babak baru sejarah RI yaitu Demokrasi Terpimpin.

Demokrasi Terpimpin

Sejak berakhirnya Pemilu 1955, Presiden Soekarno sudah menunjukkan gejala ketidak senangnya kepada partai-partai politik. Hal ini dikarenakan, partai politik lebih mementingkan kepentingan ideologinya sendiri, dari pada kepentingan politik Nasional. Demokrasi terpimpin merupakan kebalikan dari masa demokrasi parlementer. Demokrasi pada saat demokrasi terpimpin merupakan perwujudan dari kepentingan dan kehendak presiden sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia.



Gambar 8 : Pembacaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959
(planetkentr.blogspot.com)

Dalam pidato pada peringatan hari kemerdekaan 17 Agustus 1956, Soekarno kemudian menguraikan tentang ide demokrasi Terpimpin yang dinamakan Manifesto Politik, yang disingkat dengan Manipol. Manipol berisi seruan untuk dibangkitkannya kembali semangat revolusi dan perlunya dilengkapi Lembaga dan Organisasi

Negara demi Revolusi. Idiologi yang saat itu masih belum jelas, ditambahkan kata Usdek, yang merupakan akronim dari UUD 1945, Sosialisme ala Indonesia, Demokrasi Terpimpin, ekonomi terpimpin, dan kepribadian Indonesia. Pelaksanaan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 tersebut, mendapat dukungan dari kalangan militer, Kasad Jenderal Nasution dalam perintah hariannya , menginstruksikan kepada seluruh jajaran TNI-AD untuk melaksanakan dan mengamankan Dekrit tersebut.

Hal pertama yang dilakukan Presiden Soekarno adalah, menyusun Kabinet Kerja. Kabinet Kerja I dipimpin oleh Presiden Soekarno dengan mengangkat Ir. Djuanda sebagai menteri pertama. Anggota Kabinet Kerja I dilantik pada tanggal 19 Juli 1959 dengan program kerjanya yang dikenal dengan Tri Program Kabinet Kerja, yang meliputi masalah sandang dan pangan. serta keamanan dan pengambilan Irian Barat. program ini dijalankan bersama dengan program yang diuraikan Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul Penemuan Kembali Revolusi Kita yang selanjutnya dikenal sebagai Manifesto Politik Republik Indonesia (Manipol). Pidato ini oleh DPAS diusulkan menjadi Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan pada akhirnya ditetapkan dalam Tap MPRS No. I/MPRS/1960 yang berintikan USDEK yaitu UUD 1945, sosialis Indonesia, demokrasi terpimpin, ekonomi terpimpin dan Kepribadian Indonesia.

Selain itu Presiden juga menyusun Lembaga-lembaga Negara. Pada tanggal 22 Juli 1959 keluar penetapan Presiden No. 1 tahun 1959 yang menetapkan bahwa sebelum terbentuk DPR berdasarkan UUD 1945, maka DPR yang telah dibentuk berdasarkan Ulu no. 37 tahun 1953 menjalankan tugasnya sebagai DPR. Tetapi penolakan DPR terhadap RAPBN tahun 1960 mengakibatkan Presiden membubarkan lembaga tersebut berdasarkan penetapan Presiden No. 3 Tahun 1960, tanggal 5 Maret 1960. Pada tanggal 24 Juni 1960 DPR diganti dengan DPR GR yang anggotanya berasal dari tiga partai besar (PNI, NU, PKI). Ketiga partai ini dianggap telah mewakili semua golongan seperti nasional, agama dan Komunis yang sesuai dengan konsep Nasakom. DPAS dipimpin oleh Presiden dan Roeslan Abdul Gani sebagai wakil ketuanya. MPRS dibentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 2 tahun 1959 yang diketahui oleh Chaerul Shaleh, dan pada tanggal 10 November - 7 Desember 1960 mengadakan Sidang Umum pertama di Bandung. Disamping dua ketetapan di atas MPRS juga mengangkat Presiden Soekarno sebagai Pemimpin Besar Revolusi.

Dalam bidang ekonomi dipraktekkan sistem ekonomi Terpimpin, Presiden Soekarno secara langsung terjun dan mengatur perekonomian yang terpusat pada pemerintah pusat. Sistem ekonomi mengarah pada sistem ekonomi *etelisme*, yang menyebabkan menurunnya kegiatan ekonomi. Pada akhirnya keadaan perekonomian mengalami invlasi yang cukup parah. Pada akhir tahun 1965 inflasi telah mencapai 650 persen. Terjadinya inflansi dikarenakan Negara tidak dapat mengendalikan peredaran

uang dan tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan uang, khususnya untuk mendanai pembangunan penyelenggaraan proyek mercusuar, seperti *Games of The New Emerging Forces* (Ganefo) dan *Conference of The New Emerging Forces* (Conefo)

Pada awal pelaksanaan Demokrasi terpimpin, Indonesia cukup berperan aktif dalam menciptakan perdamaian dan hubungan Internasional. Hal ini tampak pada kebijakan-kebijakan presiden dalam politik luar negerinya, antara lain sebagai berikut :

- Ikut ambil bagian dalam upaya perdamaian di Kongo dengan mengirimkan Misi Garuda II yang bergabung dengan pasukan perdamaian PBB yang bernama *United Nations Operation of Congo* (UNOC).
- Pada tanggal 30 September 1960, presiden Soekarno berpidato dalam sidang umum PBB yang menguraikan tentang Pancasila, perjuangan merebut Irian Barat, Kolonialisme, meredakan ketegangan dunia Timur dan Barat serta usaha memperbaiki organisasi PBB. Pidato presiden Soekarno ini berjudul *To Build The World a New* (membangun dunia baru)
- Ikut memprakarsai berdirinya Gerakan Nonblok
- Berhasil menyelenggarakan pesta olah raga bangsa-bangsa Asia (Asian Games IV) di Jakarta 24 4 September 1962.

Akan tetapi hubungan Indonesia dengan negara-negara Barat semakin merenggang setelah Barat bersifat pasif dalam masalah pengembalian Irian Barat kepada Indonesia. Sebaliknya hubungan dengan negara-negara sosialis komunis erat, karena Uni Soviet bersedia memberi kredit dalam pembelian peralatan militer. Politik luar negeri bebas-aktif diganti dengan politik luar Negeri poros Jakarta - Pnom Pghen-Peking. Presiden Soekarno mempertentangkan Nefo - Oldefo Indonesia dengan negara-negara Komunis termasuk dalam Blok Nefo (*New Emerging Forces*) terdiri dari negara-negara Eropa Barat, Inggris dan Amerika Serikat. Sebagai bagian terhadap aksi menentang oldefo-Indonesia melakukan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini disebabkan pemerintah tidak setuju dengan pembentukan negara federasi Malaysia yang dianggap membahayakan eksistensi Indonesia dan negara-negara Blok Nefo.

Dalam rangka konfrontasi tersebut, Presiden Soekarno mengucapkan Dwi Komando Rakyat (DWIKORA) pada tanggal 3 Mei 1964 yang isinya sebagai berikut :

1. Perhebat Ketahanan revolusi Indonesia

2. Bantu perjuangan rakyat Malaysia untuk membebaskan diri dari Nekolim Malaysia

Pelaksanaan Dwikora diawali dengan pembentukan Siaga di bawah pimpinan Marsek Omar Dahi, yang bertugas mengirimkan sukarelawan ke Malaysia Timur dan Barat. Hal ini menunjukkan adanya campur tangan Indonesia terhadap masalah-masalah negeri Malaysia. Terpilihnya Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB pukulan berat bagi Indonesia sehingga PBB dianggap telah dikuasai oleh kekuatan Blok Aldefo, dan pada tanggal 7 Januari 1965 Indonesia menyatakan ke luar dari keanggotaan PBB. Aksi upaya damai untuk mengakhiri konfrontasi Indonesia - Malaysia dilakukan dengan menyelenggarakan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tiga negara, meliputi Indonesia, Filipina dan Malaysia di Tokyo, tetapi tidak memperoleh kesepakatan.

Kegiatan lainnya dalam Politik Luar Negeri Indonesia, pada masa Demokrasi Terpimpin, adalah dibentuknya Poros Jakarta, Phnom Penh, Hanoi, Peking (Beijing), dan Pyong Yang sebagai poros dari Negara-Negara anti imperialisme dan kolonialisme. Politik poros ini, menimbulkan dampak bagi Indonesia, yaitu, ruang gerak diplomasi di forum internasional menjadi sempit, terjadi penyimpangan secara prinsipil dari dasar-dasar politik luar Negeri Indonesia yang bebas dan aktif, dan memasukkan Indonesia ke dalam lingkungan strategis politik Tiongkok. Kedekatan dengan Tiongkok, melalui persekutuan Jakarta-Tiongkok diresmikan pada bulan Januari 1965 saat Subandrio sebagai menteri Luar Negeri mengadakan kunjungan ke China. Perdana Menteri Zhou Enlai sempat menawarkan persenjataan untuk mempersenjatai milisi rakyat, sebagai kekuatan baru, yang mungkin dapat diorganisasi oleh PKI. Hal ini pula yang membuat Aidit, mengusulkan kepada Soekarno agar dibentuk angkatan kelima, yang terdiri dari golongan buruh dan tani yang dipersenjatai. Hal ini tentu saja, mendapat tantangan dari pihak Angkatan Darat. Pada tanggal 27 September 1965, Jenderal Ahmad Yani akhirnya mengumumkan bahwa AD menentang pembentukan Angkatan kelima. Puncak peristiwa yang kemudian akan mengubah konstelasi politik Indonesia, selanjutnya adalah peristiwa terjadinya percobaan kudeta di Jakarta, Gerakan 30 September 1965.

Pemberontakan antara tahun 1945-1965

Pemberontakan di dalam Negeri terjadi karena dipicu oleh beberapa masalah berikut : (1) Keinginan untuk mendirikan Negara sendiri yang lepas dari RI, (2) Mempertahankan Negara agar tetap berbentuk Negara Federal, (3) Keengganan APRIS di Negara Bagian, bergabung dengan TNI dan menolak kebijakan pemerintahan Hatta untuk melakukan Reorganisasi dan Rasionalisasi dalam tubuh militer yang menekankan profesionalisme. Berikut ini diuraikan satu persatu tentang pemberontakan yang membahayakan integrasi bangsa dari Indonesia merdeka tahun 1945-1965.

PKI MADIUN 1948

Pada awal Januari 1948 Kabinet Amir Syarifudin dibubarkan. Presiden Sukarno menunjuk Muhammad Hatta untuk mengatur susunan kabinet baru. Namun Muhammad Hatta menyusun kabinet tanpa memasukkan seorangpun menteri dari golongan kiri (sosialis-komunis). Pada bulan Agustus 1948 Musso, salah seorang tokoh pendiri PKI kembali dari Moskow. Ia bermukim di Moskow sejak tahun 1926. Kembalinya Musso ke Indonesia membuat kebijakan baru bagi PKI. Kebijakan ini sering disebut jalan baru Musso⁹. Kebijakan Musso selanjutnya adalah menentang susunan kabinet Muhammad Hatta yang menurutnya telah menjual negara kepada imperialis Belanda. Pertentangan politik ini berubah menjadi insiden bersenjata. Front Demokrasi Rakyat (FDR) bentukan PKI semakin meningkatkan kegiatan pengacauan. Di Solo misalnya, terjadi pemberontakan antara FDR/PKI dengan lawan-lawan politiknya dan bahkan dengan TNI. Puncaknya adalah ketika PKI mengambil alih kekuasaan di Madiun. FDR/PKI lalu memproklamasikan berdirinya Negara Sovyet Indonesia pada 18 September 1948. Selain di Madiun, PKI juga berhasil menguasai Pati, Jawa Tengah.

Di Pati PKI juga membentuk pemerintahan baru. Sementara itu Musso menyerang pemerintah dan mengatakan bahwa Sukarno-Hatta telah menjalankan politik kapitulasi kepada Inggris dan Belanda dan memprovokasikan bahwa negara tengah dijual kepada kapitalis. Pemerintah segera mengambil tindakan untuk menumpas pemberontakan PKI dengan melancarkan Operasi Militer I yang dipimpin oleh Kolonel Abdul Haris Nasution. Pada tanggal 30 September 1948 Madiun berhasil direbut kembali oleh TNI. Dalam operasi itu, Musso berhasil ditembak mati, sementara Amir Syarifuddin dan tokoh-tokoh lainnya ditangkap dan dijatuhi hukuman mati.

DI/TII

Pendirian Negara Islam Indonesia (NII) oleh Sekarmadji Maridjan Kartosoewirjo pada 7 Agustus 1949. NII atau juga dikenal sebagai Darul Islam yang artinya Rumah Islam diproklamasikan di Cisampah, Ciawiligar Tasikmalaya dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya dikatakan bahwa " Hukum yang berlaku dalam Negara Islam Indonesia adalah Hukum Islam ". Lebih jelas lagi dalam Undang - Undangnya dinyatakan bahwa Negara Berdasarkan Islam dan Hukum yang tertinggi adalah Al Qur'an dan Hadits. Proklamasi Negara Islam Indonesia menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi Undang-undang yang berlandaskan syari'at Islam dan penolakan keras terhadap ideologi selain Al Qur'an dan Hadits Shahih yang mereka sebut " Hukum Kafir " sesuai dalam Qur'an Surah 5 Al-Maidah, ayat 145. NII atau DI dalam perkembangannya menyebar ke beberapa wilayah seperti Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan dan Aceh. Setelah SM Kartosoewirjo ditangkap dan dieksekusi oleh TNI pada tahun 1962, gerakan ini terpecah namun tetap eksis secara diam-diam dan dianggap sebagai organisasi ilegal oleh pemerintah Indonesia.

APRA (Angkatan Perang Ratu Adil)

Pemberontakan ini dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling bekas tentara KNIL, tujuannya agar pemerintah RIS dan Negara Pasundan mengakui APRA sebagai tentara negara Pasundan dan agar negara Pasundan tidak dibubarkan/dilebur ke dalam NKRI. Aksi Westerling dimulai pada tanggal 12 Desember 1946, dengan melakukan penggeledahan rumah-rumah penduduk, dengan alasan mencari pemberontak dan mengancam rakyat untuk tidak melakukan perlawanan. Aksi ini menewaskan banyak korban, dan berdasarkan laporan delegasi Indonesia untuk PBB, tercatat korban jiwa mencapai 20.00-40.00 jiwa. Ketika Westerling melakukan pembantaian, ada seorang pemuda yang bernama Robert Wolter Monginsidi yang berani melakukan perlawanan dengan cara gerilya melawan pasukan khusus Westerling.

ANDI AZIS

Pemberontakan Andi Azis di Makassar, 5 April 1950. Pemberontakan ini bermula saat Dr. Soumoukil bersikeras untuk mendirikan atau mempertahankan Negara Indonesia Timur. Pemerintah kemudian mengirimkan Batalyon Worang untuk menumpas gerakan tersebut, rupanya kedatangan batayon Worang tersebut membuat Dr. Soumoukil khawatir dan menghasut Kapten Andi Azis untuk melakukan pemberontakan. Pemberontakan tersebut meletus pada 5 April 1950 di Sulawesi Selatan dengan dipimpin oleh Kapten Andi Azis, yang merupakan mantan tentara Koninklijk Nederlands Indisch Leger (KNIL). Kapten Andi Azis bersama pasukannya menyerang pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat (APRIS) dan menawan Pejabat Panglima Tentara Territorium Indonesia Timur, Letnan Kolonel Mokoginta beserta staffnya, sehingga kota Makassar bisa mereka kuasai. Untuk menguasai keadaan ini, pemerintah pusat pada tanggal 7 April 1950 mengirimkan pasukan TNI dibawah pimpinan Kolonel Alex Kawilarang dan mengultimatum Andi Azis agar segera menyerah dan



Gambar 9 : Robert Wolter Monginsidi (id.wikipedia.org)

mempertanggungjawabkan perbuatannya, tapi Andi Azis menolak sehingga terjadi beberapa kali pertempuran. Pada tanggal 8 Agustus 1950 alhirnya ditandatangani persetujuan gencatan senjata antara kedua belah pihak, sehingga kota Makassar bisa dikuasai kembali dan pada 8 April 1953, Andi Azis dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun potong masa tahanan.

Republik Maluku Selatan (RMS)

Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS) di Maluku, pada 25 April 1950 di Ambon dengan tokoh pemberontak adalah Mr. Dr. Soumoukil. Pada tanggal tersebut di Ambon diproklamasikan berdirinya Republik Indonesia Maluku Selatan/ RMS dan menyatakan diri lepas dari Republik Indonesia Serikat oleh Dr. Soumoukil, bekas Menteri Kehakiman Negara Indonesia Timur. Untuk mengatasi pemberontakan tersebut, Kolonel Kawilarang menyerang hingga ke Kepulauan Buru yang dikuasai pemberontak hingga ke Pulau Seram bagian Utara. Serangan terhadap Pulau Ambon sendiri dilaksanakan pada 28 September 1950, dan dalam pertempuran tersebut benteng Victoria dapat direbut pasukan TNI pada 6 November 1950, sehingga pemberontakan RMS bisa digagalkan.

PRRI/Permesta

Pemberontakan PRRI/Permesta, pada tahun 1958. Penyebabnya adalah adanya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah dalam pembangunan daerah. Tidak meratanya pembangunan serta semakin melebarinya gerakan komunisme menjadi dasar bagi pemerintah daerah di Sumatera dan Sulawesi Utara untuk mendirikan Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia/ Perjuangan Rakyat Semesta atau lebih dikenal sebagai PRRI/Permesta. Di Sumatera, para pemimpin PRRI seperti Dr. Syafruddin Prawiranegara, Dahlan Djambek, Soemitro Djojohadikoesoemo dll, melakukan pemberontakan sebagai koreksi atas kebijakan pemerintah pusat. Sementara di Sulawesi Utara, Permesta melakukan pemberontakan dengan ditunggangi kepentingan negara asing, dalam hal ini adalah Amerika Serikat, terbukti dengan ditembak jatuh pesawat AS yang dipiloti oleh penerbang Amerika bernama Pope.

Gerakan 30 September 1965

Peristiwa G30S baru dimulai pada tanggal 1 Oktober pagi, dimana kelompok pasukan bergerak dari Lapangan Udara Halim Perdana Kusuma menuju daerah selatan Jakarta untuk menculik 7 jenderal yang semuanya merupakan anggota dari staf tentara. Tiga dari seluruh korban yang direncanakan, mereka bunuh di rumah mereka yaitu Ahmad Yani, M.T. Haryono, dan D.I. Panjaitan. Ketiga target lain yaitu Soeprapto, S. Parman, dan Sutoyo ditangkap hidup-hidup, sementara target utama mereka, Jenderal Abdul Harris Nasution berhasil kabur setelah melompati dinding yang berbatasan dengan taman di kedutaan besar Iraq. Meski begitu, Pierre Tendean yang menjadi ajudan pribadinya ditangkap, dan anak putrinya yang berusia lima tahun, Ade Irma Suryani Nasution, tertembak oleh regu sergap dan tewas pada 6 Oktober. Korban tewas bertambah ketika regu penculik menembak dan membunuh seorang polisi yang menjadi penjaga rumah tetangga Nasution, Karel Satsuit Tubun. Korban tewas terakhir adalah Albert Naiborhu, keponakan dari Pandjaitan, yang tewas saat menyerang rumah jenderal tersebut. Mayat dan jenderal yang masih hidup kemudian dibawa ke Lubang Buaya, dan semua dibunuh serta mayatnya dibuang di sumur dekat markas tersebut.

G30S baru berakhir ketika pada pukul 7 malam, pasukan yang dipimpin oleh Soeharto berhasil mengambil kembali kontrol atas semua fasilitas yang sebelumnya direbut oleh Gerakan 30 September. Ketika sudah berkumpul bersama Nasution, pada

pukul 9 malam Soeharto mengumumkan bahwa ia sekarang mengambil alih tentara dan akan berusaha menghancurkan pasukan kontra-revolusioner dan menyelamatkan Soekarno. Ia kemudian melayangkan ultimatum lagi yang kali ini ditujukan kepada pasukan yang berada di Halim. Tidak berapa lama, Soekarno meninggalkan Halim dan tiba di istana presiden lainnya yang berada di Bogor. Untuk jasad ke-7 orang yang terbunuh dan dibuang di Lubang Buaya sendiri baru ditemukan pada tanggal 3 Oktober, dan dikuburkan secara layak pada tanggal 5 Oktober. Para pemimpin PKI kemudian dikumpulkan, beberapa dari mereka, termasuk Aidit, langsung dieksekusi. Lainnya diadili, banyak lainnya dieksekusi. Tentara pun menguasai media dan mengorganisir pemakaman dramatis dari para perwira yang terbunuh, menyulut api kemarahan terhadap PKI. Beberapa minggu sesudahnya, setelah tentara mendapat kepastian kekuasaan, pembunuhan mulai terjadi. Dalam empat bulan saja, 500 ribu orang tewas. Peristiwa Gerakan 30 September, kemudian mengakhiri kekuasaan Soekarno dan sekaligus menandai berakhirnya Demokrasi Terpimpin di Indonesia.

F. Daftar Pustaka

April Carter. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*, Terjemahan: Sahat Simamora. Jakarta. Rajawali Press

Afan Gaffar. 2001. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar

Horowitz, Donald L. 2014. *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Kardiyat. Wiharyanto. 2011. *Sejarah Indonesia dari Proklamasi Sampai Pemilu 2009*. Yogyakarta. Univ Sanata Darma

Robert A. Dahl. 1985. *Democracy and Its Critics*. New York. Yale University Press

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB IX
PAHAM-PAHAM BESAR DAN
NASIONALISME BANGSA ASIA-AFRIKA



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 9

PAHAM-PAHAM BESAR DAN NASIONALISME BANGSA ASIA-AFRIKA

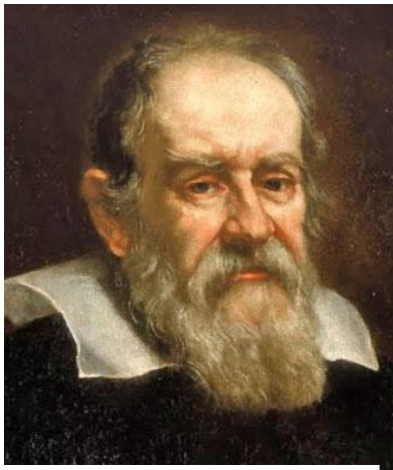
- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menganalisis hubungan pemikiran-pemikiran (Renaissance dan Merkantilisme) yang melandasi peristiwa-peristiwa di Eropa
- : Menganalisis revolusi-revolusi yang ada di dunia
 - : Menganalisis lahir dan berkembangnya paham demokrasi, nasionalisme, liberalism, sosialisme dan Pan Islamisme
 - : Menganalisis hubungan paham-paham yang berkembang di dunia dengan gerakan nasionalisme di Asia dan Afrika
- C. KKD : -
- D. Materi

Middle Age merupakan zaman dimana Eropa sedang mengalami masa suram, berbagai kreativitas sangat diatur dan dibatasi oleh gereja. Dominasi gereja sangat kuat dalam berbagai aspek kehidupan. Agama Kristen sangat mempengaruhi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, seolah raja tidak mempunyai kekuasaan, justru malah gereja yang mengatur pemerintahan. Berbagai hal diberlakukan demi kepentingan gereja, dan hal-hal yang merugikan gereja akan mendapat balasan yang sangat kejam. Contohnya, pemikiran Copernicus mengenai teori tata surya yang menyebutkan bahwa matahari pusat dari tata surya, hal ini bertolak belakang dengan gereja sehingga Copernicus dibunuh. Pemikiran tentang ilmu pengetahuan banyak diarahkan kepada theologi. Pemikiran filsafat yang berkembang pada masa itu sangat dipengaruhi oleh gereja sehingga lahir *filsafat scholastik* yaitu suatu pemikiran filsafat yang dilandasi pada agama dan untuk alat pembenaran agama. Oleh karena itu disebut *Dark Age* atau Zaman Kegelapan.

Zaman Renaissance adalah zaman kelahiran-kembali (Renaissance, bahasa Perancis) kebudayaan Yunani-Romawi di Eropa pada abad ke-15 dan ke-16 M. Sesudah mengalami masa kebudayaan tradisional yang sepenuhnya diwarnai oleh ajaran kristiani. Zaman renaissance ini sering juga disebut sebagai zaman humanisme. Maksud

ungkapan ini adalah manusia diangkat dari abad pertengahan. Pada abad pertengahan itu manusia dianggap kurang dihargai sebagai manusia. Kebenaran diukur berdasarkan ukuran dari gereja (kristen), bukan menurut ukuran yang dibuat oleh manusia. Humanisme menghendaki ukuran haruslah dari manusia. Karena manusia mempunyai kemampuan berfikir, maka humanisme menganggap manusia mampu mengatur dirinya dan dunia. Jadi ciri utama renaissance adalah *humanisme*, *individualisme* lepas dari Agama (tidak mau di atur oleh agama), *empirisme* (zaman kebebasan dalam pengembangan ilmu pengetahuan) dan *rasionalisme* (kebebasan dalam mengembangkan pikiran).

Menurut Ernst Gombrich munculnya renaissance sebagai suatu gerakan kembali di



Gambar 1 : GALILEO GALILEI
(www.glogster.com)

dalam seni, artinya bahwa renaissance tidak dipengaruhi oleh ide-ide baru. Misalnya, gerakan *Pra-Raphaelite* atau *Fauvist* merupakan gerakan kesederhanaan primitif setelah kekayaan gaya Gotik Internasional yang penuh hiasan. Renaissance muncul dari timbulnya kota-kotadagangyangmakmur akibat perdagangan mengubah perasaan *pesimistis* (zaman Abad Pertengahan) menjadi *optimistis*. Hal ini juga menyebabkan dihapusannya sistem stratifikasi sosial masyarakat agraris yang feodalistik. Maka kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan teodal menjadi masyarakat yang bebas. Termasuk kebebasan untuk melepaskan diri dari ikatan agama sehingga menemukan dirinya sendiri dan menjadi fokuspadakemajuandirisendiri. *Antroposentrisme* menjadi pandangan hidup dengan *humanisme* menjadi pegangan sehari-hari. Para keluarga kaya Italia merupakan pendukung utama renaissance, karena dari merekalah semangat “penghargaan kepada karya manusia” mengemuka.

Renaissance memicu kemunculan aliran pemikiran yang mementingkan kebebasan akal seperti aliran baru Eropa hingga abad ke 18 seperti *humanisme*, *rasionalisme*, *nasionalisme* dan *absolutisme* berani mempersoalkan kepercayaan dan cara pemikiran lama yang diamalkan selama ini secara langsung melemahkan kekuasaan golongan gereja. Itali telah menjadi pusat ilmu yang terkenal di Eropa pada abad ke 15,

hal ini terjadi ketika Kota Konstantinopel yang dikuasai oleh Islam jatuh ke tangan Barat pada tahun 1453. Keadaan ini telah menyebabkan ramainya para ilmuwan Islam berhijrah ke pusat-pusat perdagangan di Itali, dan menyebabkan Itali menjadi pusat intelektual terkenal di Eropa pada masa itu.

Renaissance telah membentuk masyarakat perdagangan yang berdaya maju, dan keadaan ini telah melemahkan kedudukan dan kekuasaan golongan gereja yang senantiasa berusaha menyekat perkembangan ilmu dan masyarakat di Eropa. Renaissance juga telah melahirkan tokoh-tokoh pemikir seperti Leonardo da Vinci yang terkenal sebagai pelukis, pemusik dan ahli falsafah serta jurutera. Michelangelo merupakan tokoh seni, arkitek, jurutera, penyair dan ahli anatomi. Melahirkan ahli-ahli sains terkenal seperti Copernicus dan Galileo, melahirkan ahli matematika seperti Tartaglia dan Cardan yang berusaha menghuraikan persamaan ganda tiga. Tartaglia orang pertama yang menggunakan konsep matematika dalam ketenteraan yaitu mengukur tembakan peluru mariam. Cardan terlibat dalam penghasilan ilmu algebra.

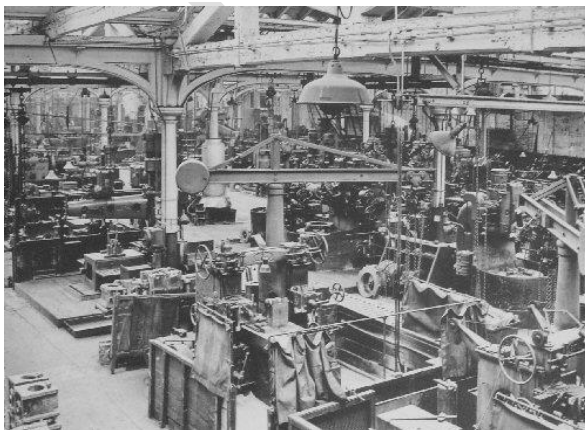
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa jasa-jasa renaissance bagi perkembangan peradaban manusia adalah sebagai berikut: (1) Tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu, (2) Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya, (3) Munculnya faham pemikiran baru seperti *humanisme*, *rasionalisme*, *empirisme*, dan *materealisme*, (4) Runtuhnya dominasi gereja, (5) Menguatnya kedudukan kaum bourgeois sehingga mereka tumbuh menjadi kelas penguasa, dan (6) Mendorong pencarian daerah baru sehingga berkobarlah era penjajahan samudera.

Dampak lainnya dari masa renaissance, adalah diberlakukannya Reformasi Gereja. Awal terjadinya reformasi gereja ini muncul atau terjadi di Jerman. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya reformasi gereja di Jerman yaitu, sekitar abad 15-16 Jerman masih merupakan negara agraris yang terbelakang dibandingkan negara-negara Eropa lainnya, kuatnya pengaruh katolisme yang bersifat konservatif di Jerman, banyaknya penjualan surat-surat pengampunan dosa di Jerman melebihi negara-negara Eropa lainnya, sebagian besar rakyat Jerman yang berprofesi sebagai petani yang merupakan kelompok sosial yang paling menderita akibat kekuasaan katolisme salah satunya dengan adanya pajak-pajak yang sangat memberatkan rakyat.

Selain itu juga faktor yang paling mendasari terjadinya reformasi di Jerman adanya fase transisi ekonomi di Jerman dimana pada waktu itu terjadi proses perubahan dari masyarakat feodal menuju masyarakat ekonomi profit atau menuju masyarakat kapitalis. Dari sinilah muncul satu tokoh yaitu Marthin Luther yang dari pemikiran-pemikirannya itu kemudian terlahir sebuah reformasi gereja yang nantinya tidak hanya berkembang di Jerman melainkan meluas ke wilayah-wilayah Eropa lainnya.

Memasuki abad ke 18, di Jerman memasuki zaman yang disebut Zaman *Aufklarung* atau zaman pencerahan yang di Inggris dikenal dengan *Enlightenment*, yaitu suatu zaman baru dimana seorang ahli pikir yang cerdas mencoba menyelesaikan pertentangan antara rasionalisme dengan empirisme. Zaman ini muncul dimana manusia lahir dalam keadaan belum dewasa dalam pemikiran filsafatnya, namun setelah Immanuel Kant mengadakan penyelidikan dan kritik terhadap peran pengetahuan akal barula manusia terasa bebas dari otoritas yang datang dari luar manusia demi kemajuan peradaban manusia. Pemberian nama ini juga dikarenakan pada zaman itu manusia mencari cahaya baru dalam rasionya. Sebagai latar belakangnya, manusia melihat adanya kemajuan ilmu pengetahuan (ilmu pasti, biologi, filsafat dan sejarah) telah mencapai hasil yang menggembirakan .

Karena kemajuan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, dan juga kebutuhan ekonomi dalam skala besar, di Inggris terjadi revolusi produksi atau yang biasa dikenal dengan revolusi industri. Pengertian revolusi industri mengacu pada dua hal. Pertama, adalah perubahan cepat dalam teknologi pembuatan barang-barang. Kedua, adalah perubahan dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat dunia. Pada pengertian pertama dapat dikatakan bahwa revolusi industry telah merubah



Gambar 2 : Penggunaan mesin pada masa revolusi industry
(wandayogaambi.blogspot.com)

proses dan cara kerja manusia dalam menghasilkan suatu barang. Sebelumnya pembuatan barang-barang dilakukan secara manual dengan hanya menggunakan tangan dan kaki manusia, sedangkan pasca revolusi industry pembuatan barang-barang menggunakan bantuan alat-alat mekanik dan otomatis.

Pembuatan barang-barang yang pada awalnya hanya mengandalkan kecepatan tangan dan kaki mengalami perubahan paska revolusi industri. Tenaga manusia hanya sedikit diperlukan karena proses pengerjaan lebih banyak dilakukan oleh alat-alat yang bekerja secara otomatis dan digerakkan oleh tenaga mesin. Hasilnya pun akan sangat berbeda. Secara manual hanya dihasilkan barang dalam jumlah sedikit dan lama, sedangkan dengan bantuan mesin, barang-barang yang dihasilkan pun akan lebih banyak dan prosesnya cepat.

Pengertian kedua yaitu perubahan dalam bidang sosial dan ekonomi berkaitan dengan terjadinya perubahan yang besar dan cepat dari pola ekonomi agraris menjadi pola ekonomi industri. Pada masa sebelum berkembangnya revolusi industri, mata



Gambar 3: Kereta uap yang menjadi salah satu latar belakang terjadinya revolusi industri (pointof-history.blogspot.com)

pencaharian yang umumnya berkembang di masyarakat adalah pertanian. Tentu saja hal ini akan menghasilkan budaya masyarakat pertanian, tetapi pasca revolusi industri, mata pencaharian masyarakat semakin beragam dan lebih banyak berada pada sektor industri. Kegiatan produksi yang dilakukan pada masa sebelum dikenalnya revolusi industri lebih bersifat

industri rumahan.

Istilah revolusi industri diperkenalkan untuk pertama kalinya oleh FriedrichEngels dan Louis-Auguste Blanqui pada pertengahan abad ke-19. Tidak jelas penanggalan secara pasti tentang kapan dimulainya revolusi industri. Tetapi T.S. Ashton mencatat permulaan revolusi industri terjadi kira-kira antara tahun 1760-1830. Revolusi ini kemudian terus berkembang dan mengalami puncaknya pada pertengahan abad ke-19 , sekitar tahun 1850, ketika kemajuan teknologi dan ekonomi mendapatkan momentum dengan perkembangan mesin tenaga-uap, rel, dan kemudian di akhir abad tersebut berkembang mesin kombusi dalam serta mesin pembangkit tenaga listrik.

Merkantilisme.Pengertian Merkantilisme adalah suatu kebijakan politik ekonomi negara imperialis yang bertujuan untuk menumpuk kekayaan berupa logam mulia sebanyak-banyaknya sebagai ukuran kekayaan, kesejahteraan dan

kekuasaan. Berawal dari penjelajahan samudra, hubungan luar negeri antara negara Eropa (Portugis, Spanyol, Inggris, Perancis dan Belanda) menjadi luas melalui jalur perdagangan di Samudra Atlantik. Keuntungan diperoleh negara-negara tersebut. Dalam perdagangan mereka sudah menggunakan uang. Pada saat berlakunya politik merkantilisme abad ke-16 – 18 uang sama nilainya dengan emas. Gerakan merkantilisme mendorong lahirnya imperialisme kuno, yaitu ambisi untuk mencari daerah jajahan dengan tujuan menguasai perdagangan secara monopoli. Dalam perkembangan selanjutnya banyak negara Eropa membentuk persekutuan dagang, contohnya VOC oleh Belanda, EIC oleh Inggris dan Kompeni Dagang Hindia Barat oleh Perancis.

Masuknya persekutuan dagang ke Negara-Negara Asia dan Afrika, menimbulkan reaksi untuk melakukan perlawanan. Inspirasi perlawanan tersebut muncul seiring dengan masuknya paham-paham baru dari Eropa, seperti nasionalisme, liberalisme, sosialisme, demokrasi, komunisme serta paham Pan-Islamisme

Nasionalisme

Paham nasionalisme berkembang dari Eropa dan sejak abad ke-19 menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Nasionalisme diartikan sebagai suatu sikap politik dan sosial dari kelompok suatu bangsa yang memiliki kesamaan kebudayaan, bahasa, dan wilayah serta persamaan cita-cita dan tujuan. Dengan demikian, kelompok tersebut merasakan adanya kesatuan mendalam terhadap kelompok bangsa itu. Negara-negara pemula penganut paham nasionalisme adalah Inggris, Jerman, dan Italia. Tokoh-tokoh Asia yang menjadi pelopor paham Nasionalisme antara lain adalah Soekarno dari Indonesia, Jawaharlal Nehru dari India, Dr. Sun Yat Sen dari Cina, dan lain-lain.

Liberalisme

Liberalisme merupakan paham yang mengutamakan kemerdekaan, terutama kemerdekaan individu. Paham ini berkembang sangat pesat di kota-kota besar Eropa. Pendukungnya adalah kaum Borjuis dan kaum terpelajar kota. Aliran liberalisme tidak memiliki ikatan yang kuat. Peranan kaum Borjuis semakin besar setelah industri dan perdagangannya menjadi mata pencaharian penting.

Panislamisme

Pan Islamisme adalah suatu paham yang bertujuan untuk mempersatukan umat Islam sedunia. Paham ini dalam bahasa Arabnya disebut dengan *Al Jami'ah al*

Islamiyah yang dicetuskan oleh seorang Afghanistan bernama Jamaluddin al Afgani (1839–1897). Namun, ada yang berpendapat bahwa paham ini telah ada pada diri tokoh perubahan dari Mesir bernama Al-Tahtawi (1801 – 1873). Jamaluddin al Afghani menyaksikan bagaimana bangsa Barat terutama Inggris ikut campur dalam urusan negara-negara Islam. Oleh karena itu, beliau mengajak kaum muslim untuk kembali pada Alquran dan Hadits, juga menyerukan untuk berjuang melawan imperialisme Barat untuk merebut kemerdekaan bangsa dan tanah air.

PERGERAKAN ASIA AFRIKA

Di kawasan Asia, kesadaran nasional baru bangkit sekitar permulaan abad ke-20 untuk melepaskan cengkeraman dari kekuasaan Barat. Misalnya, gerakan nasional India yang dipelopori oleh Mahatma Gandhi, gerakan nasional Cina yang dipelopori oleh Sun Yat Sen, gerakan nasional Turki yang dipelopori oleh Mustafa Kemal Pasha.

Pergerakan Nasionalisme di Cina

Cina merupakan negara yang memiliki sejarah cukup tua. Negara ini diperintah oleh berbagai dinasti. Kepala pemerintahannya disebut kaisar. Salah satu dinasti asing yang pernah menguasai Cina adalah dinasti Manchu (dinasti Ching) 1644 – 1912 yang berasal dari Manchuria. Nasionalisme Cina tersulut setelah rakyat kecewa terhadap penguasa Manchu yang dinilai bukan dinasti keturunan Cina. Kebencian itu semakin memuncak setelah bangsa Inggris mengungguli pasukan kaisar dalam Perang Candu



Gambar 4: Dr. Sun Yat Sen
(en.wikipedia.org)

tahun 1842. Kaisar dinilai lemah dan bertanggung jawab atas penderitaan rakyat Cina akibat penjajahan bangsa Eropa, AS dan Jepang. Akhirnya revolusi pun pecah, Kaisar Manchu tahun 1911 digulingkan oleh rakyatnya sendiri dan Cina menjadi republik. Namun republik ini rapuh karena panglima perangnya saling bertikai. Dr. Sun Yat Sen merupakan tokoh nasionalis Cina ternama. Ia mencita-citakan Cina baru yang didasarkan San Min Chu I (Tiga Sendi Kedaulatan Rakyat) yaitu nasionalisme, demokrasi dan sosialisme. Revolusi nasional di bawah pengaruhnya meletu di Wuchang 11 Oktober 1911. Mulanya revolusi ini berperan di Cina Selatan, sementara Cina Utara masih dikuasai orang Manchu (kaisar Pu Yi) dan para Warlord (panglima perang).

Demi membentuk Cina bersatu (utara dan selatan) ia rela menjadi presiden jendral Yuan Shih Kai 1911-1916 (salah satu Warlord yang berpengaruh). Sementara Dr. Sun Yat Sen mengundurkan diri ke Kanton dan mendirikan KuoMinTang (Partai Nasionalis). Antara 1916-1922 di Cina terjadi kekacauan dan akhirnya dapat dipadamkan dan Dr. Sun Yat Sen menjadi preesiden sampai akhir hayatnya 1924. Pengganti Dr. Sun Yat Sen adalah Chuang Kai Shek.

Chiang berhasil mengalahkan panglima perang. Keberhasilan Chiang ditopang oleh cara agen komunis yang mempengaruhi rakyat (petani di Utara) untuk menentang para panglima perang. Tetapi Chiang khawatir kaum komunis akan berbalik menentanginya. Kemudian, dia memerintahkan pembantaian para pendukung kaum komunis. Jenderal Chiang Kai Sek dan kaum komunis walaupun telah berjuang bersamasama, tetapi satu sama lain tidak saling percaya. Salah seorang komunis yang bernama Mao Zedong



Gambar 5: Mao Zedong
(en.wikipedia.org)

selamat dari pembantaian itu. Kemudian dia memimpin perlawanan dengan membentuk pemerintahan yang berkiblat kepada Soviet. Akhirnya pasukan Mao berjaya. Tahun 1949, Mao mendirikan Republik Rakyat Cina (RRC). Sementara Chiang Kai Shek yang di dukung Amerika Serikat namun tidak di dukung oleh rakyat (petani) beserta pendukungnya meninggalkan Cina daratan maupun lautan melanjutkan pemerintahan menurut

garis politik kuo Min Tang.

Pergerakan Nasionalisme di Turki

Turki pernah menjadi negara adidaya, pada jamannya dimana wilayah kekuasaannya meliputi jazirah Belkan, Afrika Utara dan jazirah Arab. Nasionalisme dan revolusi bangsa Turki terjadi setelah Perang Dunia I, dimana Turki berada dipihak yang kalah dan harus tunduk pada keputusan sekutu antara lain menyeragkan wilayah kekuasaannya. Prancis, Inggris dan Italia mendapatkan wilayah Turki di Afrika dan Jazirah Arab. Sementara Yunani di Belkan memperoleh kemerdekaannya dari Turki. Nasionalisme Turki semakin tumbuh setelah negara-negara sekutu berusaha terus melemahkan Turki dengan cara membantu gerakan nasionalis Yunani merebut wilayah Turki di bagian Barat Balkan tahun 1919.



Gambar 6: Mustapha Kemal Pasha
(en.wikipedia.org)

Dalam perang melawan agresi Barat, tampil Mustapha Kemal Pasha (tokoh militer Turki) yang bersimpati pada gerakan Turki Muda. Gerakan ini dianggap sebagai realisasi dari nasionalisme Turki, karena terbentuk atas dasar semangat kebangsaan yang berusaha mengusir kekuasaan Barat atau asing dan menentang rezim lama yang lemah (Sultan hamid II). Gerakan tersebut berhasil mengusir sekutu dan memaksanya untuk duduk dimeja perundingan

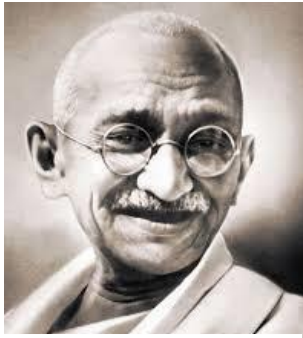
Perjanjian Laussane 1923 berisikan : “ *Turki tetap berdaulat, hanya kehilangan daerah pendudukannya di jazirah Arab*” Kemal Pasha berhasil mempengaruhi Majelis nasional (semacam Parlemen) untuk membuktikan memberhentikan Sultan serta mendirikan negara Republik Turki. Ia menjadi presiden pertama pada 29 Oktober 1923 dan memindahkan ibukota dari Istambul (wilayah Eropa) ke Ankara (di Asia).

Pergerakan Nasionalisme di India

India sejak abad ke-18 dijajah Inggris. Rakyat India tidak tinggal diam. Tahun 1857 terjadi perlawanan oleh kaum Sepoy. Peristiwa pemberontakan ini terkenal dengan sebutan **Indian Mutiny** atau **Pemberontakan Sepoy**. Tokoh-tokohnya antara lain: Raja Bahadur Syah, Ranee Laksmi Bai, Nana Sahib dan Tantia Topi. Pemberontakan tersebut ditumpas secara kejam oleh kolonial Inggris. Kegagalan tersebut tidak membuat surut perjuangan rakyat India. Mereka semakin gencar mengobarkan perlawanan-perlawanan. Gerakan perlawanan bangsa India tersebut antara lain:

1. **Gerakan Bersifat sosial keagamaan : Brahma Samadzj**, Gerakan ini mengatakan pembaharuan agama Hindu, disesuaikan dengan tuntutan zaman. Dicituskan oleh Ram Mohan Roy. **Rama Krishna**, Gerakan ini ingin kembali kepada kemurnian agama Hindu. Pencetusnya adalah Svami Vivekananda. **Arya Samak**, dipimpin Dayanada Saraswati. **Santiniketan**, dipimpin Rabindranath Tagore. **Theosofi**, dipimpin Annie Besant.

2. **Gerakan Kebangsaan India : Gerakan Mahatma Gandhi**



Gambar 7: Mahatma Gandhi (khurpi.com)

Tokoh ini mengerjakan pembaharuan manusia, melalui ajaran-ajaran yang menentang tindak kekerasan, yakni: (1) **Ahimsa**: Gerakan perlawanan tanpa kekerasan, (2) **Hartal**: Mogok sebagai tanda protes terhadap peraturan yang tidak baik, (3) **Satya Graha**(*Non Kooperasi*): Tidak melakukan kerjasama dengan pemerintah Inggris, (4) **Swadesi**: Memakai produk dalam negeri (Produk sendiri), (5) **Purna**

Swaraj: Gerakan untuk memiliki pemerintah sendiri yang didasarkan pada corak kebudayaan sendiri

3. Liga Muslim (Muslim League), Organisasi ini dipimpin oleh Muh. Ali Jinnah dan Liat Khan

4. All India Congress (AINC), AINC dalam wadah perjuangan gerakan-gerakan di India yang bertujuan menuntut kemerdekaan India. Pendirinya Allan O. Hume. Tokoh-tokoh AINC yang sangat terkenal diantaranya: Banerji, Motilal Nehru dan Jawaharlal Nehru.

Pergerakan rakyat India tersebut akhirnya membuahkan hasil. Pada tanggal 15 Agustus 1947, India mendapatkan kemerdekaan dari Inggris.

Munculnya pergerakan kebangsaan Indonesia

Kota memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia dan selalu menjadi tujuan masyarakat dari berbagai daerah. Kehidupan dan mentalitas masyarakat kota, biasanya mencari dan menemukan identitas baru, pluralistik (suku, agama, profesi), modern (relatif maju dan toleran). Oleh karena itu, kota menjadi tempat yang sangat strategis dalam upaya memunculkan dan mengembangkan pergerakan nasional Indonesia. Dari kota-kota tersebut muncullah golongan-golongan elite baru dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti golongan terpelajar, golongan profesional, dan golongan pers.

Golongan terpelajar termasuk ke dalam kelompok elite minoritas dari bangsa Indonesia, tetapi kedudukan dan peranannya sangat besar dalam lingkungan masyarakat. Dikatakan minoritas karena di dalam susunan masyarakat jumlahnya relatif kecil apabila dibandingkan dengan kelompok-kelompok di bawahnya. Golongan ini muncul pada kota,

khususnya kota-kota besar yang dijadikan pusat dan tempat untuk mengadu nasib, juga merupakan tempat bertemunya ide-ide para pelajar, mahasiswa, sarjana dan pemuda lain dari berbagai daerah dengan adat istiadat yang berbeda-beda.

Para pemuda pelajar mulai menyadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam menghadapi penjajah Belanda. Mereka juga melihat pentingnya perluasan pengajaran bagi kemajuan bangsa seperti yang ditegaskan oleh para pelajar STOVIA di Batavia. Begitu pula di dalam menghadapi kaum kapitalis asing, tidak ada jalan yang lebih baik kecuali jika para pedagang pribumi bersatu seperti yang dinyatakan oleh pendiri Sarekat Islam, yaitu Haji Samanhudi.

Golongan Profesional, lebih banyak muncul dan mengembangkan profesinya pada daerah perkotaan. Pada masa kekuasaan pemerintahan kolonial Belanda, golongan profesional ini memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat di daerah perkotaan. Golongan profesional terdiri atas berbagai profesi seperti profesi guru, dokter, dan sebagainya.

Peranan Pers Indonesia, Pada abad ke-19, pers masuk ke wilayah Indonesia dan sangat besar pengaruhnya terhadap perkembangan kota-kota di Indonesia. Wujud perkembangan pers itu dalam bentuk surat kabar ataupun majalah. Munculnya surat kabar dimodali oleh orang-orang Cina dengan menggunakan bahasa Melayu. Dengan demikian, surat kabar yang diterbitkan secara tidak langsung ikut serta di dalam mempopulerkan penggunaan bahasa Melayu. Surat kabar juga memuat isu-isu politik yang sedang berkembang, sehingga secara tidak langsung telah banyak memberikan pendidikan politik pada masyarakat Indonesia. Surat kabar berbahasa Melayu berkembang sejak awal abad ke-20, antara lain sebagai berikut.

- a. Sumatra: Sinar Soematra, Tjahaja Soematra, Pemberita Atjeh, Pertja Barat.
- b. Jawa: Bromantani, Pewarta Soerabaja, Kabar Perniagaan, Pemberitaan Betawi, Pewarta Hindia, Bintang Pagi, Sinar Djawa, Hampaet, Melayu, Poetera Hindia.
- c. Kalimantan: Pewarta Borneo.
- d. Sulawesi: Pewarta Manado.

Surat kabar mempunyai fungsi sosial dasar, yaitu memperluas pengetahuan bagi para



Gambar 8: Pelajar STOVIA
(satutimor.wordpress.com)

pembacanya dan dapat membentuk opini umum. Akan tetapi, ruang gerak persuratkabaran pada zaman kolonial Belanda dibatasi dan dikontrol ketat. Selain surat kabar yang membawa suara nasionalisme, terbit surat kabar yang merupakan pembawa suara pemerintah kolonial Hindia Belanda, seperti Pantjaran Warta dan Bentara Hindia di Jakarta, Sinar Matahari di Makassar, dan Medan Priyayi di Bandung.

F. Daftar Pustaka

Budi. Hardiman . 2011. *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*. Jakarta. Erlangga

Djaja. Wahjudi. 2012. *Sejarah Eropa dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern*. Yogyakarta : Ombak

Nyoman. Dekker. 1993. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Diawali Kebangkitan Nasional Pada Permulaan Abad XX*. Malang . IKIP MALANG

Soekarno, Ir. 1963. *"Dibawah Bendera Revolusi"* djilid satu. Djakarta: dibawah bendera revolusi

Soemardjo . *Sejarah Sosialisme di Eropa Dari Abad ke-19 Sampai 1914* . Jakarta . Harapan Masa

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB X

PERANG DINGIN
KOMPETISI ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN UNI SOVIET



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 10
PERANG DINGIN
KOMPETISI ANTARA AMERIKA SERIKAT DAN UNI SOVIET

- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menganalisis permasalahan Perang Dingin dan dampaknya terhadap politik dan ekonomi global
: Menganalisis pengaruh Glasnot da Perestroika terhadap perdamaian dunia
- C. KKD : -
- D. Materi

Perang Dingin

Perang dingin (*cold war*), adalah istilah yang menggambarkan konflik antara Blok Barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet. Istilah “Perang Dingin” sendiri diperkenalkan pada tahun 1947 oleh Bernard Baruch dan Walter Lippman dari Amerika Serikat untuk menggambarkan hubungan yang terjadi di antara kedua negara adikuasa tersebut. Penyebab langsungnya adalah perpecahan dalam aliansi antara Uni Soviet, AS dan Inggris. Mereka tidak sepakat mengenai penyelesaian masalah rekonstruksi negara-negara yang dikalahkan dalam Perang Dunia II , upaya memelihara ketertiban dan keamanan dunia, dan masalah penanganan perubahan sosial ekonomi yang diakibatkan oleh PD II. Ternyata aliansi antara Uni Soviet dan AS selama berlangsungnya perang hanya bersifat semu belaka yang didasarkan atas kepentingan bersama untuk menghadapi negara-negara Axis (Jerman, Italia dan Jepang). Selama berlangsungnya perang, tidak terdapat kesepakatan bulat di antara mereka mengenai isu-isu jangka panjang serta penyelesaian perbedaan pendapat di antara keduanya.

Amerika Serikat (AS) dan Uni Soviet (US) merasa berjasa dalam memenangkan PD II, dan keduanya sama-sama merasa berhak untuk memperoleh wilayah di bawah pengaruh mereka. Hal inilah yang menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet

terlibat konflik tidak langsung karena mereka menghindari perang terbuka untuk memperebutkan suatu wilayah. Keduanya



Gambar 1: Seorang anak Korea melintas di depan tank M-46 (id.wikipedia.org)

memilih untuk melakukan perang proksi, yaitu memanfaatkan pihak ketiga (Negara-negara dunia ketiga) untuk mengalahkan musuhnya masing-masing. Contohnya, US membantu beberapa Negara di Amerika Latin dan Asia Tenggara dalam menjalankan revolusi Komunis. Dan kemudian AS juga ikut campur dalam mengirimkan bantuan

tentara dan logistik agar paham Komunis tidak berhasil menyebar di Negara-negara tersebut. Beberapa intervensi politik yang dilakukan US dan AS dalam rangka memperebutkan pengaruh di Negara-negara dunia ketiga, adalah konflik Tiongkok yang terjadi antara Tentara Pembebasan Rakyat (Komunis) pimpinan Mao Zedong yang didukung oleh US dan Pemerintahan Nasionalis Kuomintang, pimpinan Chiang Kai-shek yang didukung AS. Konflik ini dimenangkan oleh Komunis, dan Chiang Kai-shek mundur ke kepulauan Taiwan, dan mendirikan Negara Taiwan. Salah satu persaingan



Gambar 2: US AF menyerang rel kereta Api di Wonson Selatan, pantai Timur Korea Utara (id.wikipedia.org)

yang sangat jelas terjadi antara US dan AS, adalah dalam Perang Korea. Perang Korea terjadi pada bulan Juni 1950, yang ditandai dengan invasi Tentara Rakyat Korea Utara pimpinan Kim Il-Sung terhadap Korea Selatan. Peran Joseph Stalin sangat besar, karena seluruh rancangan untuk menyerang Korea Selatan berasal dari Stalin.

Genjatan senjata baru disetujui pada tahun 1953, setelah kematian Stalin. Berakhirnya Perang Korea, membuat Korea Utara menciptakan suasana kediktatoran yang terpusat dan brutal, dan Korea Selatan mendapat bantuan dari Amerika untuk membangun negerinya.

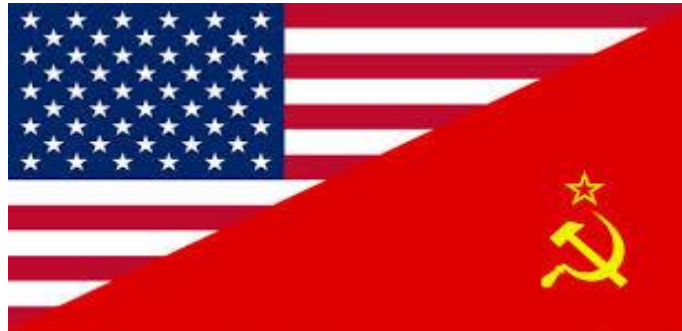
Selain keikutsertaan AS dan US dalam dua perang besar, seperti yang disebutkan diatas, perebutan pengaruh atau persaingan juga terjadi dalam beberapa bidang, meliputi bidang politik, ekonomi, militer, dan ruang angkasa. Dalam bidang Politik, pihak AS berusaha menjadikan negara-negara yang baru merdeka, dan negara-

negara sedang berkembang menjadi sebagai negara demokrasi, dengan tujuan agar hak-hak asasi manusia dapat terjamin. Untuk negara yang kalah perang yaitu Jerman dan Jepang dikembangkan paham demokrasi dan sistem hubungan perekonomian kapitalisme. Sedangkan pihak US mengembangkan paham sosialisme-komunisme dengan pembangunan ekonomi rencana lima tahun dengan cara diktator, tertutup. Dengan sistem ini US dikenal sebagai “Negara Tirai Besi”, sedangkan negara di bawah pengaruhnya di Asia yaitu Cina mendapat julukan “Negara Tirai Bambu”.

Dalam bidang Ekonomi, AS dan US saling memperebutkan pengaruhnya dengan menjadi pahlawan ekonomi yaitu menjadi negara kreditur dengan memberikan bantuan, pinjaman kepada negara-negara berkembang, seperti *Mashall Plan (Eropean Recovery Program)* yakni bantuan ekonomi dan militer kepada negara-negara di kawasan Eropa Barat. Selain itu Presiden Henry S Truman memberikan bantuan teknis dan ekonomi khusus kepada Turki dan Yunani, yang dikenal dengan *Truman Doctrin*. Dalam bidang Militer, perebutan pengaruh antara AS dengan US dalam bidang militer dalam bentuk pakta pertahanan militer. Berlangsungnya Perang Dingin menyebabkan Amerika Serikat dan Uni Soviet saling curiga satu dengan yang lain. Untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya perang terbuka, kedua negara adidaya beserta para sekutunya saling memperkuat pertahanan dan militernya.

Di kawasan Atlantik Utara, Amerika Serikat bersama sekutunya Inggris, Prancis, Belanda, Belgia, Luksemburg, Norwegia, dan Kanada, setuju untuk membentuk persekutuan militer bersama. Persekutuan militer itu disebut *North Atlantic Treaty Organization* (NATO) yang berdiri tahun 1949. Keanggotaan NATO diperluas lagi dengan masuknya Italia dan Islandia, Yunani, dan Turki pada tahun 1952 dan Jerman Barat tahun 1955. Terdapat beberapa ketentuan di dalam NATO bahwa serangan terhadap salah satu negara anggota dianggap sebagai serangan terhadap seluruh anggota, sehingga semua negara anggota wajib saling memberi bantuan. Amerika Serikat juga berusaha menggelar kekuatan militernya di kawasan Timur Tengah dan Asia Selatan. Untuk keperluan itu, Amerika Serikat bersama Turki, Irak, Iran, dan Pakistan membentuk kerja sama militer. Nama kerja sama militer itu adalah *Middle East Treaty Organization* yang disingkat METO atau dikenal dengan CENTO (*Central*

Treaty Organization) yang berdiri tahun 1959 yang semula bernama Pakta Bagdad (1955).



Gambar 3: Bendera Amerika Serikat dan Uni Soviet (www.amazine.co)



Gambar 4 : Mikhail Gorbachev
(www.globalsecurity.org)

Untuk menahan laju perluasan komunis di Asia Tenggara, Amerika Serikat membentuk kerja sama militer yang disebut *South East Asia Treaty Organization* atau SEATO. Pada tahun 1954, SEATO beranggotakan negara Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Australia, Thailand, Filipina, dan Selandia Baru. Sementara itu, perkembangan komunis di Pasifik Selatan dihambat Amerika Serikat dengan membentuk kerja sama militer. Kerja sama pertahanan di Pasifik Selatan disebut ANZUS (*Australia, New Zealand, and United States*) yang beranggotakan AS, Australia dan New Zealand. Sedangkan Uni Soviet berusaha mengimbangi kekuatan militer Blok Barat dengan membentuk kerja sama militer. Pada 14 Mei 1955 Uni Soviet bersama Mongolia, Polandia, Cekoslowakia, Bulgaria, Rumania, dan Jerman Timur membentuk *Pact of Mutual Assistance and Unifield Command* yang dikenal dengan sebutan Pakta Warsawa. Dan dalam bidang ruang angkasa, perebutan pengaruh antara AS dengan US juga melanda pada kecanggihan teknologi ruang angkasa lebih lanjut di bahas pada subbab eksploitasi teknologi ruang angkasa.

Berakhirnya Perang Dingin

Pada tahun 1985, Mikhail Gorbachev diangkat menjadi Sekretaris Jenderal Partai Komunis. Gorbachev dilantik pada saat perekonomian US yang sedang stagnan, dan penerimaan valuta asing menurun tajam, akibat dari turunnya harga minyak dunia. Sebagai presiden Uni Soviet, Gorbachev berusaha memperbaiki keadaan

negara dengan meluncurkan berbagai program pembaruan dalam rangka merevitalisasikan ideologi komunis yakni *perestroika* (restrukturisasi), *glasnost* (keterbukaan). Pembaruan ini dimaksudkan untuk penyelesaian berbagai macam masalah ekonomi dan politik di Uni Soviet yang sedang merosot.

Perestroika diluncurkan untuk mengefisienkan sistem kuota produksi, kepemilikan usaha (sektor swasta), dan membuka peluang masuknya investor asing. Hal ini dilakukan untuk mengarahkan sumber daya Negara ke pengembangan sektor sipil yang lebih produktif, bukan pembiayaan militer yang boros. Sedangkan Glasnot, merupakan kebijakan yang memungkinkan meningkatnya kebebasan pers dan transparansi lembaga-lembaga Negara. Glasnot juga memiliki tujuan untuk mengurangi korupsi dalam partai komunis, mencegah penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Komite Sentral, dan juga untuk meningkatkan hubungan Uni Soviet dengan Negara Barat. Kebijakan ini menimbulkan pro dan kontra namun Mikhail Gorbachev dengan kualitas kepimpinannya dapat menghadapi penentang perestroika. Beberapa ini adalah akibat dari kebijakan yang dikeluarkan:

Bidang ekonomi

Pemerintahan melakukan perluasan idependensi perusahaan-perusahaan negara,serta memperkuat perkembangan sektor koperasi. Pada musim panas tahun 1990 pemerintah memperbolehkan sistem kepemilikan pribadi dan privitasi. Dimulailah “Ekonomi Pasar” di mana salah satu program yang cukup terkenal “Program 500 hari”. Namun langkah tersebut tidak dapat memperbaiki keadaan, justru menambah beban hidup dan kecemasan di masyarakat.

Bidang Budaya

Glasnost dan demokratisasi membawa perubahan yang berarti bagi kehidupan intelektual dan perkembangan ilmu pengetahuan, seni dan budaya. Dihapuskannya sensorship terhadap pers yang bersifat ideologis yang selama ini mengekang kebebasan berpikir dan berekspresi. Para pecinta seni sastra, dapat membaca karya-karya Aleksandr Solzhenitsyn, Boris Pasternak, Losif Brodsky, Isak Babel, Sergei Bulgakov, Andrei Platonov dan karya-karya satrawan Rusia lainnya yang selama ini

tidak diperkenankan untuk dimiliki dan dibaca di Uni Soviet. Ruang gerak para seniman avant-grade kembali dibuka. Dunia perfilman pun tak kalah menggeliat. Musik rock yang sebelumnya dilarang dan dianggap sebagai musik kapitalis mengalami perkembangan di kalangan kaum muda Rusia.

Kehidupan spiritual keagamaan juga mengalami perubahan, banyak terjadinya restorasi tempat-tempat beribadah dan tempat-tempat suci berbagai agama.

Bidang Politik

Glasnost (keterbukaan) dan Demokratizatsiya (demokratisasi). Pemikiran Politik Baru termasuk inisiatif diakhirinya Perang Dingin. Glasnost (keterbukaan) berasal dari kata 'glas' yang artinya suara. Ini mengisyaratkan bahwa pembungkaman yang tersistemasi selama tujuh dasawarsa telah mengakibatkan tidak terakomodasinya partisipasi publik dalam proses kehidupan politik dan sosial. Glasnost (keterbukaan) memungkinkan masyarakat Soviet mengetahui tak hanya sisi baik, tapi juga sisi buruk masyarakat Soviet. Gorbachev (1988) tentang Glasnost (keterbukaan) menyatakan, "Kita berusaha mencapai keterbukaan yang lebih besar dalam semua aspek kehidupan masyarakat."

Kebijakan Luar negeri

Arah kebijakan baru Uni Soviet di bawah Gorbachev ini membawa angin segar bagi hubungan Uni Soviet dengan negara-negara Barat dan AS. Uni Soviet yang selama ini dianggap tertutup, dianggap telah memunculkan wajah baru yang ramah pada masa kepemimpinan Gorbachev. Dengan adanya memperbaiki hubungan dengan lawan politik Perang Dingin ini dapat mengurangi ketegangan antara hubungan antara dua kekuatan adidaya yang menguasai dunia secara tidak langsung pasca Perang Dunia II. Namun di sisi lain, porsi perhatian Moskow terhadap sekutu tradisional yang tergabung dalam Pakta Warsawa menjadi berkurang.

Gorbachev berhasil meredakan ketegangan internasional, dengan cara berpergian ke luar negeri dengan berpakaian barat, emigrasi orang Yahudi

diringkankan; perusahaan-perusahaan asing diundang untuk merangsang ekonomi soviet. Pada tahun 1988, Gorbachev menarik tentara Uni Soviet dari Afganistan dan mengakui pada invansi pada tahun 1979 adalah sebuah kesalahan. Pada tahun 1989, Perestroika dan glasnost menyebar di kalangan masyarakat Eropa Barat yang membenci dominasi Uni Soviet. Selama tahun 1989 dan 1990, diseluruh Eropa Timur rakyat memperlihatkan kebencian mereka kepada kepemimpinan Komunis dan menuntut pembaharuan demokratis.

Kebijakan Glasnost dan Perestroika yang dijalankan pemerintah Gorbachev ternyata membawa pengaruh bagi semakin menguatnya gerakan separatisme, akibat semangat keterbukaan dan demokratisasi yang menjadi inti dari kebijakan tersebut. Berbagai konflik antar etnis yang selama ini bersembunyi, mulai muncul menjadi konflik terbuka. Ketidakmampuan pemerintah pusat dalam menangani masalah ekonomi juga semakin mendorong ketidakpuasaan di republik-republik konstituen Uni Soviet. Ketidakpuasaan ini pada gilirannya mendorong munculnya kekuatan oposisi setempat yang mulai menyerukan ide-ide separatisme. Pada tanggal 19 Agustus diumumkan "Maklumat Pemimpin Uni Soviet" yang mengumumkan tentang pemberhentian Mikhail Gorbachev dari jabatan Presiden karena alasan kesehatan dan penyerahan mandat kepada Wapres Gennady Yanaev, serta dibentuknya Komite Negara untuk Keadaan Darurat (GKCP) dan pengumuman keadaan darurat di daerah-daerah.

Pada tanggal 21 Agustus terjadi bentrokan antara demonstran pro-Yeltsin dan tentara pendukung kudeta. Setelah jatuhnya korban di pusat kota Moskow itu kekuatan kudeta dapat dipatahkan. Kekuatan kudeta dapat dipatahkan namun disintegrasikan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah pusat terus berlanjut.

Tanggal 8 Desember beberapa pemimpin republik mengadakan pertemuan rahasia tanpa mengundang Gorbachev. Pemimpin ketiga negara bagian yakni: Boris Yeltsin (RSFSR), Leonid Kravchuk (Ukraina SSR) dan S. Shushkevich (Belarus SSR) mengumumkan berakhirnya Uni Soviet dan negara-negara bekas konstituennya membentuk apa yang disebut *Sodruzhestvo* (Persemakmuran Negara-Negara Merdeka). Tanggal 24 Desember 1991 Mikhail Gorbachev secara resmi mengundurkan

diri sebagai presiden Uni Soviet dan secara otomatis mengakhiri eksistensi Uni Soviet. Revolusi yang terjadi akhir dekade abad 20 telah membawa kehancuran Uni Soviet yang telah dibangun selama lebih kurang tujuh dasawarsa. Uni Soviet runtuh, menyisakan kepingan-kepingan negara-negara berdaulat. Rusia bersama republik lainnya (minus negara-negara Baltik) bekas raksasa komunis ini membentuk sebuah “uni” baru dengan hubungan yang lebih longgar yang menjamin kedaulatan masing-masing. Dengan ini Uni Soviet telah runtuh sebagai kekuatan utama di dalam urusan-urusan dunia.

Dampak Perang Dingin

Paska Perang Dingin yang ditandai dengan runtuhnya Uni Soviet sebagai salah satu negara adi kuasa, telah mengawali babak baru dalam tatanan studi hubungan internasional. Studi Hubungan Internasional yang semula berkisar pada tataran isu politik dan keamanan yang bersifat bipolar dan *state centric*, kini justru telah bergeser ke dalam isu-isu alternatif seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokratisasi, gender, lingkungan hidup dan isu-isu lainnya.

Dalam bidang ekonomi, Amerika Serikat hadir sebagai kekuatan utama dengan mengusung paham neoliberalisme. Hal ini terlihat dari bagaimana situasi ekonomi kini ditandai dengan tingginya tingkat *economic inter dependence* antar negara, mulai dari sektor industri, jasa, tenaga kerja, hingga investasi. Fleksibilitas kemudian menjadi istilah yang sangat mendominasi sebagaimana berbagai sumber ekonomi dapat dikelola dengan cara-cara yang tidak rigid karena aspek-aspek produksi pun dapat bergerak dengan sangat bebas. Gertler (1998, 421) menyatakan bahwa fleksibilitas tersebut ditandai dengan adanya sektor baru dalam produksi, cara baru dalam menyediakan pelayanan bisnis dan finansial, pasar baru, komersialisme, serta inovasi organisasional dan teknologikal. Tidak dapat dipungkiri bahwa neoliberalisme dengan kekhasan fleksibilitasnya yang kemudian didukung oleh kemajuan globalisasi semakin membuat batas-batas antar negara memudar atau *borderless*. Hal inilah yang kemudian menyebabkan peta geopolitik negara-negara di dunia mengalami pergeseran.

Selain itu, berakhirnya Perang Dingin ditandai dengan munculnya negara super power. Dengan adanya negara super power, maka perekonomian dunia banyak dikuasai oleh para pemegang modal. Mereka saling berlomba untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menginvestasikan modal mereka ke negara-negara berkembang, yang upah buruhnya masih relatif rendah. Sehingga keuntungan mereka juga melambung tinggi, namun bagi Negara yang ditempati juga membawa dampak positif, karena diberi kesempatan untuk membuka usah, sehingga pertumbuhan ekonomi di negara itu juga akan tumbuh pesat. Jadi keduanya diuntungkan dalam usaha ekonomi ini.

Perubahan sistem perekonomian paska Perang Dingin juga membawa dampak negative, karena pemilik modal berlomba-lomba untuk menguasai dunia perekonomian, secara tidak langsung juga membawa unsur politik didalamnya. Sehingga pemilik modal besar mendapatkan keuntungan besar, sementara negara yang modalnya terbatas keuntungannya juga kecil. Karena itu munculah istilah globalisasi ekonomi di masyarakat. Untuk mengatasi hal tersebut maka dilakukanlah beberapa tindakan seperti misalnya menyatukan mata uang, contoh yang sangat terlihat adalah negara-negara di kawasan eropa yang menyatukan mata uang mereka menjadi euro.

Dalam bidang Politik, paska Perang Dingin memunculkan AS sebagai negara *super power* tunggal yang selanjutnya memunculkan tatanan baru dunia (*New World Order*). Kesuksesan AS disebabkan karena paham kapitalis yang dianut AS menyebabkan tidak adanya akhir dari akumulasi kapital, sehingga membuat AS secara perlahan dapat membangun diri menjadi negara dengan perekonomian terbesar. Hal ini secara tidak langsung menjelaskan bahwa paham liberalis-kapitalis cocok bagi pembangunan perekonomian dunia yang kemudian melahirkan institusi-institusi perekonomian internasional dengan menerapkan paham liberal-kapitalis tersebut. Sedangkan munculnya AS sebagai hegemon tunggal yang memiliki perekonomian baik dan cenderung stabil serta militer yang kuat dapat diidentifikasi sebagai meningkatnya supermasi. Akan tetapi munculnya banyak negara-negara baru yang mendominasi pasar seperti Tiongkok, Jepang, Korea Selatan, bahkan bangkitnya

Jerman dan Perancis menandai munculnya aktor baru dalam geopolitik. Munculnya kekuatan-kekuatan baru tersebut tengah bersiap untuk menjadi kekuatan dunia yang baru sehingga sumber kekuatan dunia tidak hanya berasal dari satu kekuatan tunggal saja kemudian dinamakan sebagai *multipolar* sebagai periode ketiga dalam *new world order* (Krauthammer 1991, 5-6). Walaupun posisi AS sebagai hegemon tunggal belum terkalahkan hingga saat ini, negara-negara seperti Tiongkok, Jerman, Jepang dan negara-negara lainnya telah mengalami kemajuan perekonomian yang luar biasa serta sudah mampu memberikan pengaruhnya pada negara lain melalui kekuatan perekonomiannya. Maka dari itu negara-negara tersebut kemudian dinamakan sebagai *shadow hegemon* yaitu negara-negara yang secara tidak langsung menjadi hegemon tanpa harus menyatakan secara langsung seperti AS dan Uni Soviet pada era Perang Dingin.

F. Daftar Pustaka

Gentler, Meric S. 1998. The Limits to Flexibility: Comments on the post-Fordist Vision of Production and Its Geography dalam Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 13, No, 4, Hal.419-432

Joseph L. Nogee and Robert H. Donaldson,(1981),” *Soviet Foreign Policy Since Word War II*”, New York, Pergamon Press

Krauthammer, Charles. 1991. “*The Unipolar Moment Revisited*”, dalam *The National Interest*, Vol. 03, hlm. 5-7

Nainggolan,Poltak Partogi. 2004. “ *Konflik dan Perkembangan Kawasan paska Perang Dingin*”. Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi,.

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB XI

INDONESIA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 11

INDONESIA MASA ORDE BARU DAN REFORMASI

- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menjelaskan latar belakang lahirnya Orde Baru
 - : Menganalisis kebijakan sosial-politik pemerintahan Orde Baru
 - : Menganalisis tumbangnya rezim Orde Baru
 - : Menganalisis Indonesia masa reformasi
 - : Menganalisis kondisi politik, ekonomi, dan sosial Indonesia sesudah 21 Mei 1998
- C. KKD : -
- D. Materi

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. Melalui Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar), Soeharto mulai berkuasa dan memperkenalkan sistem politik barunya yang disebut dengan Demokrasi Pancasila. Pemerintahan ini, secara formal berlandaskan ada Pancasila, UUD 1945, dan Tap MPRS. Orde baru berencana merubah kehidupan sosial dan politik dengan landasan ideal Pancasila dan UUD 1945. Tahapan yang dijalani orde baru adalah merumuskan dan menjadikan Pancasila sebagai ideologi Negara, sehingga pancasila membudaya di masyarakat. Ideologi pancasila bersumber pada cara pandang integralistik yang mengutamakan gagasan tentang Negara yang bersifat persatuan. Sehingga pancasila diformalkan menjadi satu-satunya asas bagi organisasi kekuatan politik dan organisasi keagamaan-kemasyarakatan lainnya. Dan kesetiaan kepada ideologi-ideologi selain pancasila.

Pada prakteknya banyak terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan demokrasi pancasila, seperti rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan hampir tidak pernah terjadi, kecuali yang terdapat pada jajaran yang lebih rendah, seperti Gubernur, Bupati atau Walikota, Camat, dan Kepala Desa. Selama Orde Baru hanya terjadi perubahan pada

jabatan wakil presiden, sementara pemerintahan secara esensial masih tetap sama. Rekrutmen politik tertutup, Pengisian jabatan di Lembaga Tinggi Negara, seperti MA, BPK,DPA, dan jabatan-jabatan dalam birokrasi, dikontrol sepenuhnya oleh lembaga kepresidenan. Pemilu pada masa Orde Baru dilangsungkan sebanyak enam kali, dengan frekuensi yang teratur, yaitu lima tahun sekali. Tetapi apabila kita berbicara mengenai kualitas penyelenggaraannya, masih jauh dari unsur demokrasi. Pemilu pertama sampai dengan yang terakhir, dibuat sedemikian rupa sehingga Golkar memenangkan pemilihan dengan mayoritas mutlak (afan Gaffar, 2001:33)

Di bidang politik, Presiden Soeharto melakukan penyatuan [partai-partai politik](#) sehingga pada masa itu dikenal tiga partai politik yakni [Partai Persatuan Pembangunan](#) (PPP), [Golongan Karya](#) (Golkar) dan [Partai Demokrasi Indonesia](#) (PDI)



Pengangkatan Jend. Soeharto sebagai presiden
(brainly.co.id)

dalam upayanya menyederhanakan kehidupan berpolitik di Indonesia sebagai akibat dari politik masa presiden Soekarno yang menggunakan sistem multipartai yang berakibat pada jatuh banggunya kabinet dan dianggap penyebab mandeknya pembangunan. Kemudian dikeluarkan UU Politik dan

Asas tunggal Pancasila yang mewarnai kehidupan politik saat itu. Namun dalam perjalanannya, terjadi ketimpangan dalam kehidupan politik di mana muncullah istilah "mayoritas tunggal" di mana Golkar dijadikan partai utama dan mengebirikan dua parpol lainnya dalam setiap penyelenggaraan pemilu.

Selama Orde Baru, pemerintah melarang pembentukan partai baru dan juga melarang partai-partai politik membentuk kepengurusannya di pedesaan, serta melarang para pegawai negeri sipil serta militer menjadi anggota atau pengurus partai politik. Sejumlah larangan ini, bertujuan membebaskan masyarakat Indonesia dari pengelompokkan berdasarkan keberpihakan kepada salah satu partai, sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Lama. Namun, peraturan ini ternyata menguntungkan Golkar, karena didalam UUD Golkar tidak disebutkan sebagai partai

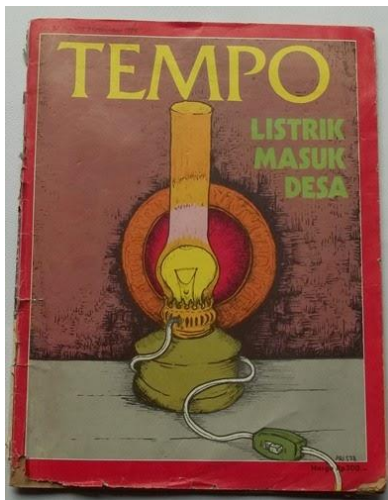
politik, tetapi mewakili golongan karya. Akibatnya, Golkar menguasai birokrasi pemerintahan, ABRI, dan wilayah pedesaan, melalui kepala desa yang berada dibawah koordinasi kementerian Dalam Negeri. Selama orde baru, hak-hak politik warga negara tidak diberi tempat. Tidak ada kebebasan pers. Pemerintah melakukan control yang sangat ketat . Sementara itu, masyarakat yang mempunyai pendapat berbeda dengan pemerintah maka akan dicap sebagai makar dan dapat dipenjarakan.

Pada era Orde Baru, kebijakan luar negeri yang condong ke negara-negara blok Timur ditinggalkan oleh Soeharto. Sebagai langkah pertama, Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB. Hal ini dilakukan sebagai usaha untuk mencegah agar Indonesia tidak menjadi Negara yang terkucil dari masyarakat Internasional, dan juga sebagai langkah perdamaian dengan Malaysia. Perubahan politik luar negeri Indonesia, memang menghilangkan ketegangan di kawasan Asia, khususnya di Asia Tenggara. Apalagi ketika kawasan ini melahirkan sebuah organisasi regional, pada 8 Agustus 1967 yang dinamakan ASEAN di Bangkok Thailand.

Perkembangan dan pertumbuhan media massa atau pers di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan pertumbuhan sistem politik dinegara ini. Bahkan sistem pers di Indonesia merupakan sub sistem dari sistem politik yang ada (Muis, 2000 : 23) Di negara dimana sistem persnya mengikuti sistem politik yang ada, maka pers cenderung bersikap dan bertindak sebagai “balancer” (penyeimbang) antara kekuatan yang ada. Tindakan atau sikap ini bukan tanpa alasan mengingat pers di negara berkembang seperti di Indonesia mempunyai banyak pengalaman bagaimana mereka mencoba mempertahankan keberadaannya sebagai pers yang bebas dan bertanggung jawab. Tetapi pers pada masa Orde Baru kebebasannya sangat dikekang oleh pemerintah.

Pers tidak diperbolehkan memberitakan mengenai berita miring yang berada di seputar pemerintahan, jika ada yang berani mengkritik atau mempublikasikan mengenai pemerintahan pada saat itu ada sebuah ancaman keras dan tentu juga akan mengancam penerbitannya. Selain itu adanya televisi sebagai pendukung kekuasaan pemerintah, misalnya saja stasiun televisi yang dikuasai oleh pemerintah yaitu TVRI. Di ranah media cetak, pemerintah dengan berbagai peraturannya membredel media yang berseberangan dengan pemerintah. Juga poster, atau pamflet, bahkan grafiti sekalipun,

yang bernada mengancam pemerintah akan segera ditindak. Apa yang mereka tulis atau mereka gambar dianggap mengganggu stabilitas atau tindakan subversif. Bentuk lain dari



Gambar 2: Majalah Tempo yang merupakan salah satu majalah yang tidak boleh terbit (www.tempo.co)



kekuasaan negara atas media pers di tanah air adalah munculnya SIUPP yakni Surat Izin untuk Penerbitan Pers.

Tanggal 21 Juni 1994, beberapa media massa seperti Tempo, detik, dan editor dicabut surat izin penerbitannya atau dengan kata lain dibredel setelah mereka mengeluarkan laporan investigasi tentang berbagai masalah penyelewengan oleh pejabat-pejabat Negara. Pembredelan itu diumumkan langsung oleh Harmoko selaku Menteri Penerangan pada saat itu. Meskipun pada saat itu pers benar-benar diawasi secara ketat oleh pemerintah, namun ternyata banyak media massa yang menentang politik serta kebijakan-kebijakan pemerintah, dan perlawanan itu ternyata belum berakhir. Tempo misalnya, berusaha bangkit setelah pembredelan bersama para pendukungnya yang anti rezim Soeharto.

Pada masa Orde Baru, Indonesia melaksanakan pembangunan dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuannya adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila. Pelaksanaan pembangunan bertumpu pada Trilogi Pembangunan, yang isinya meliputi hal-hal berikut : (1) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menuju terciptanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, (2) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, dan (3) Stabilitas nasional yang sehat dan dinamis.

Pembangunan Nasional pada hakikatnya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Berdasarkan Pola Dasar Pembangunan Nasional disusun Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang

yang meliputi kurun waktu 25-30 tahun. Pembangunan Jangka Panjang (PJP) 25 tahun pertama dimulai tahun 1969 – 1994. Sasaran utama PJP I adalah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan tercapainya struktur ekonomi yang seimbang antara industri dan pertanian. Selain jangka panjang juga berjangka pendek, setiap tahap berjangka waktu lima tahun. Tujuan pembangunan dalam setiap pelita adalah pertanian, yaitu meningkatnya penghasilan produsen pertanian sehingga mereka akan terangsang untuk membeli barang kebutuhan sehari-hari yang dihasilkan oleh sektor industri. Sampai tahun 1999, pelita di Indonesia sudah dilaksanakan sebanyak enam kali.

Dalam membiayai pelaksanaan pembangunan, tentu dibutuhkan dana yang besar. Di samping mengandalkan devisa dari ekspor nonmigas, pemerintah juga mencari bantuan kredit luar negeri. Dalam hal ini, badan keuangan internasional IMF berperan penting. Dengan adanya pembangunan tersebut, perekonomian Indonesia mencapai kemajuan. Meskipun demikian, laju pertumbuhan ekonomi yang cukup besar hanya dinikmati para pengusaha besar yang dekat dengan penguasa. Pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan dan landasan ekonomi yang mantap sehingga ketika terjadi krisis ekonomi dunia sekitar tahun 1997, Indonesia tidak mampu bertahan sebab ekonomi Indonesia dibangun dalam fondasi yang rapuh. Bangsa Indonesia mengalami krisis ekonomi dan krisis moneter yang cukup berat. Bantuan IMF ternyata tidak mampu membangkitkan perekonomian nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab runtuhnya pemerintahan Orde Baru tahun 1998.

Pemerintah orde baru memperluas kekuasaan mereka atas kehidupan sosial masyarakat melalui tentara. TNI memiliki struktur organisasi yang menempatkan mereka sampai ke desa-desa. Dengan begitu, TNI mengawasi dan mempengaruhi seluruh kehidupan sosial warga Negara. Mereka juga menyusup ke kelompok-kelompok sosial untuk memastikan bahwa tidak membahayakan Negara. Sementara itu, rakyat Indonesia makin tidak memiliki kesadaran akan politik, sehingga hubungan antar warga bersikap steril terhadap politik. Apalagi masyarakat lebih menggemborkan masalah pembangunan dan ekonomi daripada masalah politik.

Pada Orde Baru Warga keturunan [Tionghoa](#) juga dilarang berekspresi. Sejak tahun 1967, warga keturunan dianggap sebagai warga negara asing di Indonesia dan



Gambar 4 : Kebudayaan Barongsai, yang pada masa Orde Baru dilarang untuk ditampilkan. (www.kaskus.co.id)

kedudukannya berada di bawah warga pribumi, yang secara tidak langsung juga menghapus hak-hak asasi mereka. Kesenian barongsai secara terbuka, perayaan hari raya Imlek, dan pemakaian [Bahasa](#)

[Mandarin](#) dilarang meski kemudian hal ini diperjuangkan oleh komunitas [Tionghoa Indonesia](#) terutama dari komunitas pengobatan Tionghoa tradisional karena pelarangan sama sekali akan berdampak pada resep obat yang mereka buat yang hanya bisa ditulis dengan bahasa Mandarin. Mereka pergi hingga ke Mahkamah Agung dan akhirnya Jaksa Agung Indonesia waktu itu memberi izin dengan catatan bahwa Tionghoa Indonesia berjanji tidak menghimpun kekuatan untuk memberontak dan menggulingkan pemerintahan Indonesia.

Satu-satunya surat kabar berbahasa Mandarin yang diizinkan terbit adalah Harian Indonesia yang sebagian artikelnya ditulis dalam bahasa Indonesia. Harian ini dikelola dan diawasi oleh militer Indonesia dalam hal ini adalah ABRI meski beberapa orang Tionghoa Indonesia bekerja juga di sana.

Agama tradisional Tionghoa dilarang, akibatnya agama [Konghucu](#) kehilangan pengakuan pemerintah. Pemerintah Orde Baru berdalih bahwa warga Tionghoa yang populasinya ketika itu mencapai kurang lebih 5 juta dari keseluruhan rakyat Indonesia dikhawatirkan akan menyebarkan pengaruh komunisme di Tanah Air. Padahal, kenyataan berkata bahwa kebanyakan dari mereka berprofesi sebagai pedagang, yang tentu bertolak belakang dengan apa yang diajarkan oleh komunisme, yang sangat mengharamkan perdagangan dilakukan. Orang Tionghoa dijauhkan dari kehidupan politik praktis. Sebagian lagi memilih untuk menghindari dunia politik karena khawatir akan keselamatan dirinya.

Pemerintah mengontrol bidang kebudayaan yang dianggap bertentangan atau membahayakan kebudayaan Nasional akan dihapus. Selain itu juga mengontrol kerja dan

produksi kebudayaan. Seniman tidak bisa seenaknya menghasilkan karya seni, demikian juga puisi dan pementasan-pementasan seperti teater koma, harus ada izin tertulis dari aparat keamanan.

Berakhirnya Orde Baru

Pemerintahan Orde Baru yang dipimpin Presiden Suharto selama 32 tahun, ternyata tidak konsisten dan konsekuen dalam melaksanakan cita-cita Orde Baru. Pada awal tahun 1966, Orde Baru bertekad untuk menata kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Namun dalam pelaksanaannya, pemerintahan Orde Baru banyak melakukan penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dan ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam UUD 1945 yang sangat merugikan rakyat kecil. Bahkan, Pancasila dan UUD 1945 hanya dijadikan legitimasi untuk mempertahankan kekuasaan. Penyimpangan-penyimpangan itu melahirkan krisis multidimensional yang menjadi penyebab umum lahirnya gerakan reformasi.

Krisis politik yang terjadi pada tahun 1998 merupakan puncak dari berbagai kebijakan politik pemerintahan Orde Baru. Berbagai kebijakan politik yang dikeluarkan pemerintahan Orde Baru selalu dengan alasan dalam kerangka pelaksanaan demokrasi Pancasila, namun yang sebenarnya terjadi adalah dalam rangka mempertahankan kekuasaan Presiden Suharto dan kroni-kroninya. Artinya, demokrasi yang dilaksanakan pemerintahan Orde Baru bukan demokrasi yang semestinya, melainkan demokrasi rekayasa. Dengan demikian, yang terjadi bukan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk rakyat, melainkan demokrasi yang berarti dari, oleh, dan untuk penguasa. Pada masa Orde Baru, kehidupan politik sangat represif, yaitu adanya tekanan yang kuat dari pemerintah terhadap pihak oposisi atau orang-orang yang berpikir kritis.

Rekayasa-rekayasa yang dibangun pemerintahan Orde Baru tidak terbatas pada bidang politik, dalam bidang hukum pun, pemerintah juga melakukan intervensi. Artinya, kekuasaan peradilan harus dilaksanakan untuk melayani kepentingan para penguasa, bukan untuk melayani masyarakat dengan penuh keadilan. Bahkan, hukum sering dijadikan alat pembenaran para penguasa, kenyataan itu bertentangan dengan

ketentuan pasal 24 UUD 1945 yang menyatakan bahwa “kehakiman memiliki kekuasaan yang merdeka dan terlepas dari kekuasaan pemerintah (eksekutif)”.



Gambar 5: Grafik turunya pertumbuhan ekonomi periode 1997/1998

Krisis moneter yang melanda negara-negara Asia Tenggara sejak Juli 1996 mempengaruhi perkembangan perekonomian Indonesia. Ternyata, ekonomi Indonesia tidak mampu menghadapi krisis global yang melanda dunia. Krisis ekonomi Indonesia diawali dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat, dan pada tanggal 1 Agustus 1997, nilai tukar rupiah turun dari Rp 2,575.00 menjadi Rp 2,603.00 per dollar Amerika Serikat. Pada bulan Desember 1997, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat turun menjadi Rp 5,000.00 per dollar, dan bulan Maret 1998, nilai tukar rupiah terus melemah dan mencapai titik terendah, yaitu Rp 16,000.00 per dollar.

Krisis politik, hukum, dan ekonomi merupakan penyebab terjadinya krisis sosial. Pelaksanaan politik yang represif dan tidak demokratis menyebabkan terjadinya konflik politik maupun konflik antar etnis dan agama. Semua itu berakhir pada meletusnya berbagai kerusuhan di beberapa daerah. Ketimpangan perekonomian Indonesia memberikan sumbangan terbesar terhadap krisis sosial. Pengangguran, persediaan sembako yang terbatas, tingginya harga-harga sembako, dan rendahnya daya beli masyarakat merupakan faktor-faktor yang rentan terhadap krisis sosial. Krisis

multidimensional yang melanda bangsa Indonesia telah mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan Presiden Suharto. Ketidakmampuan pemerintah dalam membangun kehidupan politik yang demokratis, menegakkan pelaksanaan hukum dan sistem peradilan, dan pelaksanaan pembangunan ekonomi yang berpihak kepada rakyat banyak telah melahirkan krisis kepercayaan. Terjadinya ketimpangan sosial yang sangat mencolok menyebabkan munculnya kerusuhan sosial. Muncul demonstrasi yang digerakkan oleh mahasiswa, tuntutan utama demonstrasi adalah perbaikan ekonomi dan reformasi total. Demonstrasi besar-besaran dilakukan di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998. Pada saat itu terjadi peristiwa Trisakti, yaitu meninggalnya empat mahasiswa Universitas Trisakti akibat bentrok dengan aparat keamanan. Empat mahasiswa tersebut adalah Elang Mulya Lesmana, Hery Hariyanto, Hendriawan, dan Hafidhin Royan. Keempat mahasiswa yang gugur tersebut kemudian diberi gelar sebagai “Pahlawan Reformasi”.



Gambar 6: kerusuhan Mei 1998 (infoindonesiakita.com)

Menanggapi aksi reformasi tersebut, Presiden Soeharto berjanji akan mereshuffle Kabinet Pembangunan VII menjadi Kabinet Reformasi. Selain itu juga akan membentuk Komite Reformasi yang bertugas menyelesaikan UU Pemilu, UU Keparitatan, UU Susduk MPR, DPR, dan DPRD, UU Antimonopoli, dan UU Antikorupsi. Dalam perkembangannya, Komite Reformasi belum bisa terbentuk karena 14 menteri menolak untuk diikutsertakan dalam Kabinet Reformasi. Adanya penolakan tersebut menyebabkan Presiden Soeharto mundur dari jabatannya.



Gambar 7 : Gerakan Reformasi 1998 ditandai dengan pendudukan Gedung MPR/DPR RI oleh ribuan mahasiswa (sejarahku2011.blog.com)

Akhirnya pada tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden RI dan menyerahkan jabatannya kepada wakil presiden B.J. Habibie. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan Orde Baru dan dimulainya Orde Reformasi.

Masa Reformasi

Reformasi adalah sebuah gerakan yang menuntut perubahan mendasar untuk memperbaiki keadaan. Oleh karena itu, untuk memperbaiki keadaan, perlu dilakukan perubahan yang mendasar terhadap segala bidang. Setelah presiden Soeharto turun tahta pada tanggal 12 Mei 1998, dimulailah era reformasi di Indonesia. Setelah Soeharto turun, pemerintahan dipegang oleh Presiden B.J. Habibie, yang tidak berlangsung lama, karena rakyat dan anggota MPR/DPR menganggap Habibie masih merupakan warisan Orde Baru. Untuk mereformasi DPR, tanggal 7 Juni 1999, diselenggarakan pemilihan umum anggota DPR yang diikuti 48 partai.

Pada era Presiden Habibie, timor timur yang menjadi provinsi ke-27, memisahkan diri dari NKRI. Terlepasnya timor timur menjadi factor utama penolakan MPR atas pidato pertanggungjawabannya pada bulan oktober 1999 dan B J Habibie

akhirnya mengundurkan diri dari bursa calon presiden. Tetapi pada hakekatnya, sidang umum tersebut, bermaksud untuk menurunkan pemerintahan Habibie, dan hasil sidang tersebut menolak pertanggungjawaban Habibie. Praktis masa pemerintahan Presiden Habibie merupakan yang paling singkat, lebih kurang 1 tahun.

Jabatan presiden dilanjutkan kepada Abdurrahman Wahid, yang dilantik pada tanggal 20 Oktober 1999. Terpilihnya Abdurrahman Wahid-Megawati secara legalitas formal telah menandakan lahirnya periode baru. Pasangan Gus Dur –Megawati sebenarnya dinilai ideal dilihat dari aspek wawasan. Pasangan ini membentuk Kabinet Persatuan Nasional yang dilantik tanggal 28 oktober 1999. Terlepas dari adanya kekecewaan karena dihapusnya Departemen Penerangan dan Departemen sosial, kabinet ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan. Pada masa orde baru persoalan yang sangat menonjol adalah masalah korupsi, kolusi, nepotisme (KKN), pemulihan ekonomi, masalah BPPN, kinerja BUMN, pengendalian inflasi, mempertahankan kurs rupiah, masalah jaringan pengamanan social (JPS), munculnya masalah disintegrasi, konflik etnis antar umat beragama, penegakan hukum, dan penegakan hak asasi manusia(HAM).

Muncul kasus Brunigate yang mengakibatkan kredibilitas rakyat terhadap Gus Dur turun drastis dan puncak kekecewaan DPR terbukti dengan dikeluarkannya Memorandum pertama untuk presiden Gus Dur, pada tanggal 1 Februari 2001 yang



Gambar 8 : Kabinet Persatuan Nasional
(www.kaskus.co.id)

disusul dengan Memorandum kedua pada tanggal 30 april 2001. Presiden Gus Dur terkenal dengan sikapnya yang *controversial*, bukan memberi laporan tetapi mengeluarkan maklumat yang isinya membekukan lembaga MPR dan DPR. Puncak jatuhnya Gus Dur dari kursi kepresidenan terjadi ketika MPR atas

usulan DPR untuk mempercepat sidang istimewa MPR, yang menilai presiden Gus Dur telah melanggar Tap No.VII/MPR/2000, karena menetapkan Komjen (pol) Chaerudin sebagai pemangku sementara jabatan Kapolri.

Pada sidang Istimewa tanggal 23 juli 2001, Megawati Soekarno Putri terpilih sebagai Presiden RI menggantikan Gus Dur berdasarkan TAP MPR No.3 Tahun 2001 dan Hamzah Has ketua umum PPP terpilih sebagai wakil presiden RI. Pada pemerintahanya banyak persoalan yang harus dihadapi salah satunya pemulihan ekonomi dan penegakan hukum. Untuk mengatasi persoalan tersebut: Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US\$5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ke-3 tanggal 12 april 2002. Melalui kebijakan pemulihan keamanan, situasi Indonesia menjadi tenang, dan Presiden Megawati berhasil menaikkan pendapatan per kapita cukup signifikan.

Untuk pertama kalinya Indonesia melaksanakan pemilu sebanyak dua kali yaitu untuk memilih anggota legislative dan memilih presiden secara langsung. Pemilu 2004 yang diselenggarakan pada 5 April 2004 diikuti oleh 24 partai politik, setelah melaksanakan pemilu legislative, dilanjutkan dengan pemilihan Calon presiden



Gambar 10 : Kabinet Gotong Royong
(www.kaskus.co.id)

dan wakil presiden. Kandidat Presiden dan juga Wakil Presiden pada pemilu 2004 adalah Megawati-Hasyim Muzadi didukung oleh PDIP, Wiranto-Salahudin Wahid didukung partai Golkar, Amien Rais-Siswono didukung Partai Amanat Nasional, Hamzah Haz-Agum Gumelar didukung Partai Persatuan Pembangunan, Susilo Bambang Yudhoyono – Jusuf Kalla didukung partai Demokrat. Pemilu tersebut dimenangkan oleh pasangan SBY-Jusuf Kalla dan Mega Hasyim, akhirnya dilaksanakan pemilu putaran ke2 dan dimenangkan oleh pasangan SBY –Jusuf Kalla.

Susilo Bambang Yudhoyono dilantik sebagai presiden ke-6 Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004, kebijakan yang ditempuh pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono : (1) Ketika dilantik sebagai presiden, ekspor hingga oktober 2004 menjadi naik jika dibandingkan dengan



Gambar 11: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (politik.news.viva.co.id)

p

periode yang sama pada tahun 2003, (2) Kebijakan soal Aceh ditunjukkan oleh presiden dengan memperpanjang status darurat sipil, (3) Pelunasan utang terhadap IMF pada bulan oktober 2006 dilaksanakan dalam dua tahap, (4) Pada masa pemerintahannya presiden SBY menaikkan

harga BBM sebanyak tiga kali, dan (5) Kenaikan harga BBM dilakukan guna mengurangi subsidi BBM. Pada masa pemerintahannya dilaksanakan pemilihan umum yang dilaksanakan dari pemilu legislatif dan pemilihan presiden secara langsung.

F. Daftar Pustaka

Brata Trisnu Nugroho. 2006. *Prahara Reformasi Mei 1998*. Semarang. UPT UNNES Press.

Farchan. Bulkin. 1998. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.

Muis. A. 2000. *Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik*. Jakarta. Penerbit Kompas

Yusuf. Winandi. 2014. *Menyibak Tabir Orde Baru (memoar politik Indonesia 1965-1998)*. Jakarta. Penerbit Kompas.

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB XII

KONFLIK DAN ORGANISASI REGIONAL-INTERNASIONAL



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 12

KONFLIK DAN ORGANISASI REGIONAL-INTERNASIONAL

- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menganalisis konflik-konflik di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Asia Selatan
: Menganalisis munculnya organisasi-organisasi bersifat regional dan global
- C. KKD : -
- D. Materi

TIMUR TENGAH

Kawasan Timur Tengah telah sejak lama memiliki nilai strategis kawasan semenjak masa kolonialisme, hal ini terbukti dengan adanya teori penguasaan lautan oleh Alfred Thayer Mahan pada tahun 1902. Mahan melihat nilai strategis kawasan di Teluk Persia, dalam tulisannya, *The Persian Gulf and International Relations*, Mahan menyarankan Inggris untuk memperkuat armada lautnya, demi untuk mengamankan jalur perdagangan dan komunikasi Inggris, yang saat itu menjajah India dan juga Mesir. Apa yang diungkapkan oleh Mahan, bukan berarti tanpa alasan, laut dipilih, dikarenakan untuk menghadapi ancaman ekspansi Rusia, serta pengembangan rel kereta api Jerman, Berlin-Baghdad. Sehingga Mahan memikirkan upaya *balance of power* saat itu, dengan menciptakan fokus utama geopolitik bukanlah di daratan melainkan di lautan (Hazbun t.t, 6).

Kawasan Timur Tengah pun relatif menjadi kawasan yang tertutup, hal ini dibuktikan dengan tidak adanya signifikansi keterlibatan secara langsung negara-negara di Timur Tengah, pada masa Perang Dunia II. Sehingga kawasan ini memiliki keunikan tersendiri baik dalam sistem pemerintahan maupun kehidupan masyarakatnya. Pada masa akhir dari Perang Dingin, merupakan era yang dinamakan sebagai era kebebasan dengan kemenangan Amerika Serikat. Era tahun 1990-an merupakan tahapan awal dari keumnuhan globalisasi, yang ditandai dengan kemajuan teknologi, dan naiknya sistem perekonomian neoliberal. Doktrin yang dibawa oleh globalisasi ini adalah bagaimana negara mendapatkan keuntungan dari integrasi ekonomi, dalam jaringan pasar bebas,

dan aliansi daripada dengan mengguakan kontrol wilayah secara tradisional. Amerika Serikat sebagai ujung tombak yang menahbiskan diri sebagai pemimpin dunia bebas, berkepentingan untuk memasukkan negara-negara di dunia yang belum tergabung dalam globalisasi yang dimaksudkan oleh Amerika Serikat.

Timur Tengah dalam pandangan Amerika Serikat juga memiliki nilai strategisnya, selain untuk mengamankan jalur perdagangan, Timur Tengah juga memiliki cadangan minyak yang luar biasa. Amerika Serikat melihat hal ini sebagai kawasan untuk ditaklukkan, hal ini disebabkan kawasan Timur Tengah sebagai kawasan yang relatif tertutup dan belum terintegrasi sepenuhnya dengan apa yang dikatakan sebagai *the free world*. Terkait dengan rendahnya tingkat demokratisasi di kawasan Timur Tengah, pada tahun 2011 terjadi sebuah fenomena revolusi damai menuntut adanya pemerintahan yang demokratis, diawali di Tunisia. Dimana peristiwa ini kemudian menjalar ke negara-



Gambar 1: Konflik Israel dan Palestina
(zonanikir.wordpress.com)

negara di sekitarnya, seperti Libya, Mesir, Syria, Jordan. Konflik yang ada di Timur Tengah, dan sampai sekarang (tahun 2016), masih berlangsung adalah Konflik Israel dan Palestina.

Konflik ini dimulai setelah Perang Dunia kedua, ketika masyarakat Israel (yahudi) berpikir untuk memiliki negara sendiri (menurut sejarah mereka keluar dari tanah Israel setelah Perang Salib karena dituduh pro-Kristen oleh tentara Islam, yang kemudian ditinggali oleh orang-orang Filistin atau Palestine). Pilihan letak negara itu tentu saja adalah, tanah leluhur mereka yang pada saat itu merupakan tanah jajahan Inggris karena secara leluhur mereka memilikinya tapi juga secara religius beberapa tempat keagamaan Yahudi ada disana. Meskipun tidak secara terbuka, negara-negara barat setuju dan mendukung (alasananya karena sebelum orang Palestina tinggal disana, tanah itu adalah milik Israel). Sebaliknya negara-negara Arab berargumen bahwa adalah karena Jerman yang melakukan genosida maka tanah Jermanlah yang harus disisihkan untuk dijadikan negara Yahudi. Dibalik semua intrik politik dan keuntungan dan kerugian politik, strategis, dan lain-lain Inggris secara sukarela mundur dari negara dan memberikan siapa saja untuk mengklaimnya. Berhubung Isreal

lebih siap, maka mereka lebih dahulu memproklamirkan negara. Sebaliknya orang-orang Palestina yang telah tinggal dan besar disana tidak mau terima mejadi bagian negara Yahudi (dalam literatur doktrin Islam pemimpin negara harus seorang Muslim), sehingga bangsa Israel kemudian melihat orang Palestina sebagai ancaman dalam negeri, begitu juga dengan bangsa Palestina yang menganggap Israel sebagai penjajah baru. Hasilnya bisa ditebak, perang dan konflik yang telah berbelit-belit. yang sebenarnya adalah urusan antara dua negara/bangsa menjadi konflik antara agama (Yahudi vs Islam) belum lagi stabilitas kawasan timur tengah dan ikut campur Amerika dengan kebijakan minyak mereka.

Konflik yang juga ada di kawasan Timur Tengah adalah , konflik antara Sunni maupun Syiah adalah konflik fundamental yang menajdi dasar dari segala konflik yang terjadi di Timur Tengah (Muttaqien 2014). Sehingga satu kubu dengan kubu yang lain akan senantiasa selalu berusaha untuk mengalahkan. Bahkan apabila ada sekelompok Syiah hendak beribadah, maka sekelompok Sunni yang berada di tempat ibadah tersebut segera meninggalkan tempat. Ulama Saudi Arabia pun telah mengeluarkan fatwa bahwa apabila Syiah bukan bagian dari Islam. Dengan demikian peranan Saudi adalah untuk membendung pengaruh Syiah dengan mensuplai senjata kepada kelompok-kelompok di negara Timur Tengah untuk melawan pemerintahan yang memiliki haluan berbeda dengan Saudi Arabia.

ASIA SELATAN

Geopolitik Asia Selatan lebih banyak didominasi oleh konflik India dan Pakistan mengenai perbatasan Kashmir dan Jammu. Meskipun Asia Selatan tidak hanya terdiri dari dua negara itu saja, masih ada Bhutan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Maladewa. Sebelumnya seluruh kawasan tersebut berada di bawah jajahan Inggris hingga sampai tahun 1947, dengan kemerdekaan India dari Britania Raya. Kawasan Semenanjung India pun terbagi menjadi dua kubu yang bertentangan secara identitas, dimana ada pertentangan antara Islam dan Hindu. Hingga terpecahlah kawasan tersebut, kelompok Islam mengelompokkan diri menjadi Pakistan, dan keluar dari India. Pakistan pun terbagi menjadi dua yaitu Pakistan Barat dan Pakistan Timur. Pemisahan tersebut

sudah berlangsung sejak tahun 1930. Baik India maupun Pakistan sama-sama mempersengketakan wilayah Kashmir dan Jammu. Kawasan tersebut memiliki nilai strategis, dikarenakan siapa yang mampu untuk menduduki kawasan tersebut akan dapat mengontrol wilayah sekitarnya. Kawasan Kashmir maupun Jammu, terletak diantara China, Iran, India dan Pakistan. India maupun Pakistan kembali terlibat pertempuran sebagai akibat adanya pemisahan Pakistan Timur dari Pakistan Barat pada tahun 1971 (Pant2011, 86).



Gambar 2. Konflik Kashmir (atimes.com)

Selain itu kepemilikan senjata nuklir juga berpengaruh dalam percaturan geopolitik di kawasan Asia Selatan, baik India maupun Pakistan sama-sama memiliki senjata nuklir. Nuklir yang didapatkan oleh Pakistan merupakan hasil dari warisan dari Uni Soviet semasa Perang Dingin. Sehingga di kawasan Asia Selatan, Pakistan memiliki fungsi sebagai *balance of power* dari India. Selain dengan India, Pakistan juga memiliki hubungan yang relatif tidak baik dengan tetangganya, yaitu Afghanistan. Hal ini terkait dengan adanya permusuhan yang disebabkan oleh milisi Taliban. Bahkan pada tahun 1947, Afghanistan menjadi satu-satunya negara yang menolak keanggotaan Pakistan di PBB (Siddiqi 2008, 95). Masalah penyusupan Al Qaeda ke Pakistan juga menjadi kendala serius dalam hubungan kedua negara hingga saat ini. Pakistan meskipun memiliki kekayaan sumber daya alam berupa batu bara dan tembaga, namun Pakistan juga memiliki ketergantungan dan kepentingan untuk mendapatkan suplai minyak. Sebagai buktinya adalah strategi pengamanan sumber daya energi minyak oleh Pakistan dengan menjalin hubungan dengan negara-negara di Asia Tengah, dan juga Iran yang mendapatkan sanksi

oleh Barat. Iran dan Pakistan bekerjasama dalam pembangunan pipa gas antara India dan Pakistan (Stewart-Ingersoll & Frazier 2011, 77).

ASIA TENGGARA

Kawasan Asia tenggara juga memegang peranan penting dalam kancah geopolitik internasional, hal ini disebabkan lima dari tujuh selat tersibuk ada di kawasan Asia Tenggara (Wahyudi 2014). Kawasan Asia Tenggara juga memiliki latar belakang sejarah yang berbeda pada masa kolonialisme. Dimana ada negara-negara di Asia Tenggara, ada pandangan bahwa kolonialisme bersifat positif maupun negatif. Seperti Kamboja yang menganggap bahwa kolonialisme merupakan hal yang positif, karena dengan kedatangan Perancis maka Kamboja bisa terhindar dari agresi Siam, dan Vietnam (Cipto 2007, 6).



Gambar 3 : Peta Asia Tenggara (www. Aseanvisa com)

Kawasan Asia Tenggara juga memiliki sejarah panjang dalam proses regionalisme. ASEAN adalah sebuah kerjasama kawasan yang dibentuk oleh negara-negara yang berada di kawasan Indochina. Kerjasama kawasan ini adalah di latarbelakangi oleh berbagai dinamika yang terjadi di kawasan. Kawasan ini merupakan sebuah kawasan yang strategis yang menjadi sebuah perebutan kekuatan-kekuatan besar untuk memperlancar dan meraih kepentingan Nasional mereka. Masa Perang Dingin antara dua kubu besar, antara Blok Timur yang dipimpin oleh Uni Sovyet yang memiliki haluan ideologi Komunismenya melawan Amerika Serikat sebagai Blok Barat yang memiliki haluan Liberalisme. Meskipun selama Perang Dingin berlangsung, tidak pernah terjadi

sebuah kontak senjata secara langsung, akan tetapi yang terjadi sesungguhnya adalah mereka “bertempur” menggunakan negara-negara lain yang di gunakan sebagai kaki tangan (ASEAN Selayang Pandang 2012).

Dalang yang berada dibalik perpecahan tersebut adalah dua kubu besar Sovyet dan Amerika. Hal yang sama pun merambah pula di kawasan Indochina. Terjadi pada Vietnam yang terbelah menjadi dua pula, antara Vietnam Utara dan juga Vietnam Selatan. Stabilitas kawasan menjadi terganggu, begitu pula konflik bilateral, seperti konflik Vietnam-Kamboja, dan Indonesia-Malaysia. Meskipun sebelumnya beberapa organisasi telah berdiri di kawasan ini, namun pada kenyataanya beberapa organisasi tersebut belumlah mampu untuk mengakomodasi kepentingan negara-negara di



Gambar 4: Lambang ASEAN (sukasosial.blogspot.com)

kawasan. Organisasi tersebut antara lain, SEATO (*South East Asia Treaty Organization*) pada tahun 1954, ASA (*Association of South East Asia*) pada tahun 196, kemudian Malaysia-Philiphina-Indonesia pada tahun 1963. Akan tetapi semangat para pemimpin negara-negara di kawasan, masih tinggi untuk memebentuk sebuah idealisme kerjasama demi kemajuan kawasan yang tanya. Sehingga pada tanggal 8 Agusutus 1967 melalui Deklarasi Bangkok atau Deklarasi ASEAN. Untuk kembali membentuk kerjasama yang baik ini, diperlukan penyelarasan pemahaman bersama terhadap tujuan-tujuan bersama (ASEAN Selayang Pandang 2012).

ORGANISASI-ORGANISASI YANG BERSIFAT REGIONAL DAN GLOBAL

ASEAN

ASEAN yang merupakan sebuah akronim dari *Association of Souteast Asian Nations* adalah Perhimpunan Negara-negara yang Berada dikawasan Asia Tenggara. Organisasi ASEAN yang pada awalnya hanya berjumlah lima negara saja sekarang sudah tumbuh berkembang menjadi 10 negara antara lain Indonesia, Malaysia, Singapura,

Thailand, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos dan Kamboja dimana lima negara pertama adalah pendirinya.

ASEAN merupakan sebuah organisasi internasional kewilayahan yang begitu besar, jika dijumlahkan secara keseluruhan luas wilayahnya mencapai 1,7 juta mil persegi atau sekitar 4,5 juta kilometer persegi dengan jumlah populasi yang ada didalamnya sekitar setengah milyar orang. ASEAN dibentuk dengan maksud dan tujuan kepentingan negara-negara didalamnya seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. ASEAN sebagai organisasi kerja sama regional, di Asia Tenggara menganut asas keanggotaan terbuka, ini berarti bahwa ASEAN memberi kesempatan kerja sama kepada negara-negara lain yang berada di kawasan Asia Tenggara, seperti Timor Leste.

Deklarasi Bangkok dijadikan dasar didirikannya ASEAN, didalamnya, ditulis mengenai tujuan didirikannya ASEAN yaitu sebagai berikut:

1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi, sosial, dan kebudayaan di negara-negara Kawasan Asia Tenggara.
2. Meningkatkan stabilitas keamanan di Asia Tenggara.
3. Meningkatkan kerja sama aktif dan bantuan bersama antara negara-negara anggota ASEAN dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, teknologi, dan ilmu pengetahuan.
4. Mengadakan pembahasan bersama tentang masalah-masalah bersama yang terjadi di kawasan Asia Tenggara.
5. Memajukan kerja sama antara negara-negara ASEAN dalam bidang pertanian, industri, perdagangan, komunikasi, dan peningkatan kemakmuran rakyat.
6. Menyediakan bantuan dalam bentuk fasilitas latihan dan penelitian bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara
7. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi regional dan organisasi internasional yang lain.

Lambang ASEAN menggambarkan seikat batang padi berwarna cokelat bertuliskan ASEAN dan biru pada bagian bawah. Warna dasarnya kuning dengan lingkaran warna biru. Tiga warna dari lambang ASEAN adalah cokelat, kuning, dan biru. Warna

coklat melambangkan kekuatan dan stabilitas, kuning melambangkan kemakmuran dan biru melambangkan persahabatan.

GERAKAN NONBLOK (GNB)

GNB berdiri saat diselenggarakannya Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) I GNB di Beograd, Yugoslavia, 1 - 6 September 1961. KTT I GNB dihadiri oleh 25 negara yakni Afghanistan, Algeria, Yaman, Myanmar, Kamboja, Sri Lanka, Kongo, Kuba, Cyprus, Mesir, Ethiopia, Ghana, Guinea, India, Indonesia, Irak, Lebanon, Mali, Maroko, Nepal, Arab Saudi, Somalia, Sudan, Suriah, Tunisia, dan Yugoslavia. Dalam KTT I tersebut, negara-negara pendiri GNB ini berketetapan untuk mendirikan suatu gerakan, bukan suatu organisasi untuk menghindarkan diri dari implikasi birokratis dalam membangun upaya kerja sama di antara mereka. Pada KTT I juga ditegaskan bahwa GNB tidak diarahkan pada suatu peran pasif dalam politik internasional, tetapi untuk menformulasikan posisi sendiri secara independen yang merefleksikan kepentingan negara-negara anggotanya.



Gambar 5 : Pelopor gerakan Nonblok (nahason-bastin.blogspot.com)

GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA merupakan bukti peran dan kontribusi penting Indonesia dalam mengawali pendirian GNB. Secara khusus,

Presiden Soekarno juga diakui sebagai tokoh penggagas dan pendiri GNB. Indonesia menilai penting GNB tidak sekadar dari peran yang selama ini dikontribusikan, tetapi juga mengingat prinsip dan tujuan GNB merupakan refleksi dari perjuangan dan tujuan kebangsaan Indonesia sebagaimana tertuang dalam UUD 1945.

Tujuan utama GNB semula difokuskan pada upaya dukungan bagi hak menentukan nasib sendiri, kemerdekaan nasional, kedaulatan, dan integritas nasional negara-negara anggota. Tujuan penting lainnya adalah penentangan terhadap apartheid; tidak memihak pada pakta militer multilateral; perjuangan menentang segala bentuk dan manifestasi imperialisme; perjuangan menentang kolonialisme, neo-kolonialisme, rasisme, pendudukan, dan dominasi asing; perlucutan senjata; tidak mencampuri urusan dalam negeri negara lain dan hidup berdampingan secara damai; penolakan terhadap penggunaan atau ancaman kekuatan dalam hubungan internasional; pembangunan ekonomi-sosial dan restrukturisasi sistem perekonomian internasional; serta kerja sama internasional berdasarkan persamaan hak. Sejak pertengahan 1970-an, isu-isu ekonomi mulai menjadi perhatian utama negara-negara anggota GNB. Untuk itu, GNB dan Kelompok 77 (Group of 77/G-77) telah mengadakan serangkaian pertemuan guna membahas masalah-masalah ekonomi dunia dan pembentukan Tata Ekonomi Dunia Baru (New International Economic Order).

Menyusul runtuhnya Tembok Berlin pada tahun 1989 dan kekuatan militer-politik komunisme di Eropa Timur, muncul perdebatan mengenai relevansi, manfaat dan keberadaan GNB. Muncul pendapat yang menyatakan bahwa dengan berakhirnya sistem bipolar pada konstelasi politik dunia, eksistensi GNB menjadi tidak bermakna. Namun, sebagian besar negara mengusulkan agar GNB menyalurkan energinya untuk menghadapi tantangan-tantangan baru dunia pasca-Perang Dingin, di mana ketegangan Utara-Selatan kembali mengemuka dan jurang pemisah antara negara maju dan negara berkembang menjadi krisis dalam hubungan internasional. Perhatian GNB pada masalah-masalah terkait dengan pembangunan ekonomi negara berkembang, pengentasan kemiskinan dan lingkungan hidup, telah menjadi fokus perjuangan GNB di berbagai forum internasional pada dekade 90-an.

Dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta pada tahun 1992, sebagian besar ketidakpastian dan keraguan mengenai peran dan masa depan GNB berhasil ditanggulangi. Pesan Jakarta, yang disepakati dalam KTT GNB ke-10 di Jakarta, adalah dokumen penting yang dihasilkan pada periode kepemimpinan Indonesia dan memuat visi baru GNB, antara lain: (1) Mengenai relevansi GNB setelah Perang Dingin dan meningkatkan kerja sama konstruktif sebagai komponen integral hubungan internasional, (2) Menekankan pada kerja sama ekonomi internasional dalam mengisi kemerdekaan yang berhasil dicapai melalui perjuangan GNB sebelumnya, (3) Meningkatkan potensi ekonomi anggota GNB melalui peningkatan kerja sama Selatan-Selatan.

APEC

Sumber: en.wikipedia.org



Asia-Pacific Economic Cooperation

Asia-Pacific Economic Cooperation

(APEC) adalah forum kerja sama antar 21 Ekonomi di lingkaran Samudera Pasifik yang berdiri tahun 1989. Saat ini terdapat 21 Ekonomi yang menjadi anggota APEC, yaitu Australia, Brunei Darussalam, Canada, Chile, China, Hong Kong-China, Indonesia, Japan, South Korea, Malaysia, Mexico, New Zealand, the Philippines, Peru, PNG, Russia, Singapore, Chinese Taipei, Thailand, the United States, dan Viet Nam. Kerja sama di APEC merupakan kerja sama non-politis, ditandai dengan keanggotaan Hong Kong-China dan Chinese Taipei. Anggota APEC disebut "Ekonomi" mengingat setiap anggota saling berinteraksi sebagai entitas ekonomi, dan bukan sebagai negara. APEC memiliki tiga pengamat (observer), yaitu ASEAN Secretariat, Pacific Economic Cooperation Council (PECC), dan Pacific Islands Forum (PIF) Secretariat.

Prinsip Kerja Sama APEC, dibangun berdasarkan beberapa prinsip yaitu: (1) *Consensus*, yang berarti bahwa semua keputusan di APEC harus disepakati oleh dan bermanfaat bagi 21 Ekonomi Anggota, (2) *Voluntary and non-binding* yang berarti semua kesepakatan dalam forum APEC dilakukan secara sukarela dan tidak mengikat, (3) *Concerted unilateralism*, yang berarti pelaksanaan keputusan dilakukan secara bersama-sama sesuai dengan kemampuan tiap Ekonomi, tanpa syarat resiprositas, dan (4)

Differentiated time frame yaitu bahwa setiap Ekonomi maju diharapkan melakukan liberalisasi terlebih dahulu.

Prinsip-prinsip tersebut terbukti telah membuat anggota APEC melaksanakan komitmen secara lebih efektif. Fleksibilitas yang diberikan memberikan ruang kepada anggota APEC yang beragam kapasitasnya, untuk berimprovisasi, melakukan uji coba, dan



Gambar 7 : KTT APEC tahun 1994 yang diadakan di Bogor. Jawa Barat. Indonesia (www.bbc.com)

mengembangkan pelatihan bersama secara bertahap hingga memenuhi kesepakatan yang diinginkan. Tujuan utama APEC adalah mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan di Asia Pasifik. Hal ini dilakukan dengan mendorong dan memfasilitasi perdagangan dan investasi yang lebih bebas dan terbuka di kawasan, serta meningkatkan kerja sama pengembangan kapasitas Ekonomi anggota. Untuk itu, telah ditetapkan suatu target *“the Bogor Goals”*, sebagai hasil kesepakatan Konferensi Tingkat Tinggi APEC di Bogor pada tahun 1994 dengan komitmen sebagai berikut:

“... with the industrialized economies achieving the goal of free and open trade and investment no later than the year 2010 and developing economies no later than the year 2020.”

Peranan APEC bagi Indonesia dan Kawasan

1. Manfaat APEC bagi Indonesia:

- Sarana untuk membangun kepercayaan dan hubungan yang saling menguntungkan dengan Negara/Ekonomi mitra strategis Indonesia di kawasan.

- Sarana untuk meningkatkan kapasitas dan daya saing Indonesia, melalui proyek-proyek pelatihan teknis dan *capacity building* serta *sharing of best practices*.
- Sarana untuk memastikan bahwa pasar Asia-Pasifik tetap terbuka bagi produk ekspor unggulan Indonesia. Terjadi peningkatan total perdagangan Indonesia dengan Ekonomi APEC lainnya, yaitu sebesar US\$ 276,589.1 Milyar pada tahun 2013 dibandingkan US\$ 29,9 Milyar pada tahun 1989¹ pada saat Indonesia turut mendirikan APEC
- Sarana peningkatan investasi. Pada tahun 2012 tercatat total investasi portofolio yang masuk ke Indonesia dari anggota APEC lainnya adalah sebesar US\$ 245,200.5 Milyar dibandingkan US\$ 45,7. Milyar pada tahun 2001.

2. Manfaat APEC bagi Kawasan:

- Turut menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi di kawasan melalui pertukaran informasi kebijakan. Sebagaimana tercantum dalam laporan World Bank 2013: kawasan Asia Pasifik tetap merupakan lokomotif pertumbuhan ekonomi global di tengah ketidakpastian ekonomi dunia akibat krisis Eropa, hal ini terlihat dari estimasi tingkat pertumbuhan di APEC yang lebih tinggi dari dunia:
 - APEC: 4,2% (2013); 4,7% (2014)
 - Dunia: 3,1% (2013); 3,8% (2014)
- Menciptakan kondisi yang mendukung peningkatan perdagangan kawasan:
 - Tarif rata-rata turun dari 16,9% tahun 1989 menjadi 6,6% tahun 2008, dan 5,8% tahun 2010 serta turun tipis menjadi 5.7% pada tahun 2012.
- Sarana pembahasan isu-isu *behind the border* dan *across the border* terkait perdagangan dan investasi, maupun isu-isu yang kerap menjadi ancaman perekonomian seperti kesiaptanggapan bencana, ancaman terorisme,
- Mendorong paradigma pertumbuhan yang berkualitas melalui *five growth strategy: balance, inclusive, sustainable, innovative, dan secure*.
- Mempermudah dan memfasilitasi dunia usaha antara lain melalui skema *APEC Business Travel Card* (ABTC).

OPEC (*Organization of the petroleum Exporting Countries*), yang merupakan negara pengekspor minyak bumi. OPEC memiliki tujuan untuk menegosiasikan masalah tentang produksi, harga dan hak konsesi dengan perusahaan minyak bumi. OPEC didirikan pada tanggal 14 September 1960 di Bagdad, Irak. Kemudian di pindahkan ke Wina Austria pada tanggal 1 September 1965. Venezuela merupakan negara pertama yang memprakarsai pembentukan OPEC dengan cara mendekati negara Gabon, Iran, Libya, Saudi Arabia dan Kuwait pada tahun 1949. Venezuela menyarankan untuk menukar pandangan dan mengeksplorasi jalan yang lebar dan komunikasi lebih dekat dengan negara penghasil minyak. Pada tanggal 10 sampai 14 September 1960, gagasan dari Menteri Pertambangan dan Energi Venezuela, dan Menteri Pertambangan dan Energi Saudi Arabia, pemerintahan Irak, Kuwait, dan Persia bertemu di Baghdad untuk bermusyawarah bagaimana cara untuk meningkatkan harga minyak mentah yang telah dihasilkan oleh negara masing-masing.

Kelima negara tersebut dikenal sebagai pendiri organisasi OPEC, OPEC didirikan untuk mengkoordinasikan dan menggabungkan kebijakan dari negara anggota sebagai kelanjutan yang telah dilakukan. Berdirinya organisasi OPEC dipicu karena keputusan sepihak dari perusahaan minyak multinasional pada tahun 1959 sampai 1960. *The Seven Sister* lah yang menguasai industri minyak dan menetapkan harga minyak dipasar internasional. Meskipun OPEC sering dianggap sebagai berlaku “jahat” dalam arena politik, organisasi ini juga memiliki tujuan yang bisa dijustifikasi. OPEC berfungsi mencegah anggotanya dimanfaatkan oleh negara-negara industri dengan memastikan bahwa negara-negara pengekspor minyak mendapatkan harga minyak yang adil.

Pada Mei 2008, Indonesia mengumumkan telah mengajukan surat untuk keluar dari keanggotaan OPEC. Hal ini, karena Indonesia telah berubah menjadi Negara importer minyak sejak tahun 2003. Setelah keluar dari OPEC, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menawarkan kerja sama dengan OPEC, dengan saling bertukar informasi dan pengetahuan, dan manajemen perminyakan.

F Daftar Pustaka

Chapman, Graham P. 2009. *The Geopolitics of South Asia*.

Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012. *ASEAN Selayang Pandang*.

- Emmerson, David P. 2005. *Security, Community, and Democracy in Southeast Asia: Analyzing ASEAN*, dalam Japanese Journal of Political Science 6 (2) 165–185. United Kingdom: Oxford University Press.
- Pant, Harsh V. 2011. *India's Relations with China*, dalam: Scott, D (ed.). Handbook of India's International Relations. London: Routledge.
- Purnomo, Wahyudi, 2014. *Geopolitik dan Geostrategi Asia Selatan*. Materi dibahas dan didiskusikan pada kuliah Geopolitik dan Geostrategi, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.

PLPG 2017

SUMBER BELAJAR PENUNJANG PLPG 2017
MATA PELAJARAN/PAKET KEAHLIAN
SEJARAH INDONESIA

BAB XIII
REVOLUSI TEKNOLOGI ABAD KE – 20



Dra. Sri Mastuti Purwaningsih, M.Hum.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
2017

BAB 13

REVOLUSI TEKNOLOGI ABAD KE – 20

- A. KI : Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- B. KD : Menganalisis perkembangan revolusi teknologi di abad ke 20
: Mengevaluasi dampak perkembangan IPTEK bagi kehidupan manusia
- C. KKD : -
- D. Materi

Revolusi adalah perubahan mendasar dalam berbagai bidang yang berlangsung cepat dan berkaitan dengan fondasi atau unsure-unsur kehidupan bermasyarakat. Ukuran kecepatan suatu perubahan adalah relative karena revolusi pun dapat memakan waktu yang lama. Tujuan dari revolusi adalah, upaya untuk merobohkan dan menjebol sistem yang lama menuju sistem yang baru. Sedangkan, teknologi adalah ilmu atau pengetahuan tentang keahlian yang berguna. Menurut Prof. Dr.Ing.Iskandar Alisjahbana, teknologi adalah cara melakukan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan bantuan alat dan akal (*hardware dan software*), sehingga seakan-akan dapat memperpanjang, memperkuat, atau membuat lebih baik anggota tubuh, pancaindra, ataupun otak manusia.

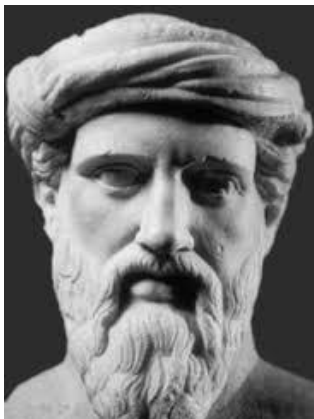
Berangkat dari definisi tersebut, maka teknologi lahir karena adanya kebutuhan mendesak manusia untuk memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan revolusi teknologi adalah perubahan sosial secara drastic dalam struktur-stuktur penting yang terjadi secara relative cepat sebagai akibat dari penemuan teknologi. Contoh-contoh revolusi teknologi tersebut, di antaranya dikenalnya pertanian, temuan mesin cetak, bom atom, dan internet. Perkembangan IPTEK dapat dibuat periodisasi sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai berikut .

Jaman Purba

Di dalam kehidupan prasejarah dikenal adanya zaman batu. Ciri-ciri ilmu yang dikembangkan adalah kemampuan mengamati, kemampuan membedakan, kemampuan memilih, dan kemampuan melakukan percobaan, sekalipun masih terbatas pada proses

trial dan error. Berdasarkan proses tersebut lambat laun terjelma suatu kemampuan dalam melakukan pekerjaan, misalnya pembuatan alat-alat batu yang tadinya lunak sampai akhirnya terbuat dari batu yang keras. Kemudian bentuk alat-alat itu lebih disempurnakan.

Semula penduduk masih nomaden, berburu dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Kemudian melalui trial dan error, mulai mengenal api untuk memasak. Hal ini mendorong mereka membuat periuk dan barang pecah belah lainnya. Dalam perkembangannya mereka juga mulai mengenal bercocok tanam dan bertani dengan segala peralatannya yang meningkat dari batu sampai alat-alat perunggu dan besi. Hal yang bersifat khusus lagi adalah kemampuan menulis dan berhitung yang mendorong perkembangan ilmu pengetahuan pada masa itu. Mereka juga mulai



Gambar 1: Pythagoras
(www.universaltheosophy.com)

mengenal hal-hal yang berkaitan dengan perbintangan dalam sistem kalender, pada fase ini dikembangkan, oleh orang-orang Mesir Kuno, Sumeria, dan Babilonia. Kemudian menyusul orang-orang Hindu.

Jaman Yunani

Sementara itu, sejarah mencatat adanya kemajuan berpikir umat manusia dalam lapangan ilmu dan teknologi yang berpusat di Yunani. Pada waktu itu terjadi perubahan besar pada cara berpikir umat manusia, sebelum itu manusia cukup puas dengan menerima kenyataan sehari-hari, bahwa di alam ini terdapat tanah, air, api, awan, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Tetapi kemudian manusia mulai mengajukan pertanyaan yang amat sangat penting, yaitu dari apakah benda-benda yang berjenis-jenis itu dibuat? Mungkinkah ada bahan dasar yang menjadi inti dari sekalian benda-benda yang ada di alam itu? Dengan pertanyaan itu, maka manusia mulai berpikir dan berusaha mengungkap kabut rahasia alam dan tersusunlah ilmu serta teknologi. Sementara itu Pythagoras seorang ahli filsafat berhasil menemukan berbagai dasar ilmu. Dia telah menemukan Hukum atau Dalil Pythagoras, yaitu $a+b = c$ yang berlaku bagi segitiga siku-siku, sedangkan jumlah sudut suatu segitiga siku-siku adalah 180. Penemuan Pythagoras itu mendasari ilmu matematika.

Sedangkan Socrates melalui percakapan atau dialog dengan murid-muridnya telah meletakkan metode berpikir. Socrates merumuskan suatu perkataan atau pengertian, mengadakan analisa sosial dengan diskusi dan memantapkan suatu norma dalam bidang etika. Masih banyak pemikir-pemikir Yunani yang berjasa menyusun ilmu. Plato (427-347 SM) adalah seorang pemikir yang menganggap bahwa yang berada di balik semua benda di alam ini adalah ide, yang bersifat abadi. Kemudian Aristoteles (384-322 SM) sebagai murid Plato, telah berjasa menulis banyak buku yang berisi berbagai ilmu.

Buku peninggalan Aristoteles yang penting bagi ilmu dan teknologi antara lain Logika, Biologi, dan Metafisika. Sebenarnya Aristoteles masih banyak menulis kitab-kitab yang penting dalam bidang politik, etika, dan estetika. Pada bidang Biologi Aristoteles telah mempelajari embriologi, khususnya mengenai perkembangan telur ayam sampai terbentuknya kepala ayam. Demikian pula anatomi badan hewan sudah diselidiki. Aristoteles mengamati alam sekitar dengan teliti dan hasilnya dituliskannya dalam sebuah ensiklopedi. Aristoteles tidak hanya mempelajari logika dan biologi tetapi juga memikirkan masalah filsafat dan keagamaan. Untuk jangka waktu yang lama karya-karya Aristoteles itu dipelajari orang. Pengaruhnya besar sekali, sehingga selama lebih dari 2000 tahun pikirannya dianut masyarakat. Sebenarnya tidak semua pikiran Aristoteles itu benar. Pandangannya tentang bumi dan hubungannya dengan matahari ternyata tidak tepat. Aristoteles beranggapan bahwa matahari mengitari bumi sesuai dengan asas geometrisme, padahal bumi yang mengitari matahari (heliosentris).

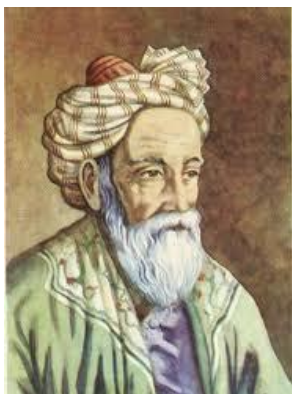
Selanjutnya Ptolemeus (+ 200 M) juga menyusun peta bumi sebagaimana dikenalnya pada zamannya itu dengan mencantumkan 5000 tempat berdasarkan koordinat-koordinat yang hingga sekarang masih berlaku. (Sardiman , 1996: 76)

Jaman Pertengahan

Pada zaman pertengahan oleh para ilmuwan sering dinamakan Abad Kegelapan. Hal ini disebabkan perkembangan ilmu pengetahuan yang sudah ada sejak zaman Yunani-Romawi menjadi terhenti di Eropa. Pada waktu itu agama Kristen berkembang di Eropa.. Kekuasaan gereja begitu dominan dan sangat menentukan kehidupan di Eropa. Semua kehidupan harus diatur dengan doktrin gereja atau hukum

dan ketentuan Tuhan. Gereja tidak memberikan kebebasan berpikir. Hal ini telah menyebabkan kemunduran bagi perkembangan ilmu pengetahuan. Apabila di Eropa mengalami Abad Kegelapan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi di timur, di dunia Islam mengalami perkembangan. Perkembangan kekuasaan Islam di timur (di Asia Barat) telah membawa perkembangan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di dunia Islam mulai menonjol terutama setelah terjadi masa penerjemahan yang terjadi pada tahun 750-850 di masa kekhalifahan Abasiyah. Pada waktu itu para cendekiawan muslim dan cendekiawan Barat melakukan penerjemahan karya-karya klasik dari Yunani, Romawi Kuno, dan Persia. Setelah dipadu dengan pemahaman terhadap kandungan Al-Qur'an telah melahirkan pemikiran-pemikiran baru dalam bidang ilmu pengetahuan. Para cendekiawan itu juga melakukan penyelidikan. Fase ini mendorong perkembangan ilmu pengetahuan di masa-masa berikutnya.



Gambar 2: Omar Khayam
(wiki.cultured.com)

Tokoh ahli ilmu Islam itu antara lain ialah Al Khawarizmi (825 M), yang menyusun buku Aljabar, yang menjadi standar hingga dewasa ini. Ia juga menegaskan dan memantapkan perhitungan desimal, dengan mengganti angka Romawi dengan angka Arab seperti yang dipakai dewasa ini. Penulisan desimal jauh lebih unggul daripada penulisan angka Romawi. Sebenarnya Al Khawarizmi mengembangkan perhitungan desimal itu dari para ahli matematika Hindu seperti Aryabhata (476 M) dan Brahmagupta (628 M). Pada bidang aljabar Al Khawarizmi menemukan perhitungan akar negative. Kemudian Omar Khayam (1043-1132), juga seorang ahli sastra (penyair) dan matematikus. Ia berhasil menemukan pemecahan persamaan pangkat tiga.

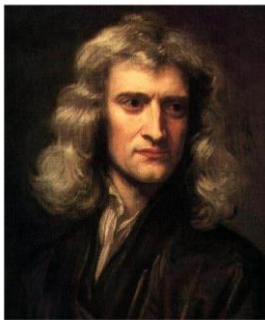
Selama zaman Islam itu, penelitian kimia mulai dirintis, walaupun mula-mula dimaksudkan untuk percobaan membuat logam emas. Percobaan itu sendiri tidak pernah berhasil, tetapi efek sampingnya menumbuhkan ilmu kimia atau al Kimia, umpamanya pembuatan salmiak yang berguna bagi ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran pada zaman Islam memang mengalami kemajuan. Nama-nama seperti Al Razi (Razes, 850-923 M), dan Ibnu Sina (Avicenna, 980-1037 M), menghiasi dunia kedokteran. Ibnu Sina menulis kitab

kedokteran yang sampai tahun 1650 menjadi buku standar. Abu Qasim juga menulis ensiklopedi kedokteran dan telah mendalami ilmu bedah.

Ibnu Rusd (Averoes, 1126-1198) telah menterjemahkan kitab-kitab Aristoteles. Pada zaman Islam cabang-cabang ilmu lainnya seperti astronomi, matematika, dan filsafat juga berkembang. Sebuah peta yang memuat 70 daerah yang dikenal waktu itu sudah disusun oleh Al Idrisi (1100-1166).

Jaman Modern (658 M-Sekarang)

Perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern didorong atau diawali dengan berkembangnya jaman Renaissans. Masa ini merupakan fase lahir dan berkembangnya kembali budaya Yunani - Romawi Kuno. Perkembangan Renaissance



Gambar 3 : Issac Newton (www.BrightHub.com)

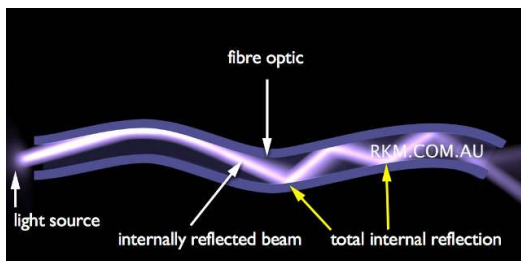
tidak terlepas dari fase sebelumnya yakni, perkembangan ilmu pengetahuan pada masa penerjemahan di masa Islam. Setelah zaman Romawi, ilmu pengetahuan tidak hanya mengklasifikasikan atau menentukan sesuatu itu termasuk kelas atau kelompok tertentu, tetapi memahami sesuatu atau benda-benda itu memiliki susunan dan aturan yang ada hukum-hukumnya. Leonardo Pisa ahli aljabar dari Italia, terus melakukan penyelidikan sehingga menemukan tiga akar dari persamaan pangkat tiga. Ilmu-ilmu alam terus berkembang. Kemudian tampil ilmuawan-ilmuwan seperti Copernicus, Galileo, dan Keppler. Mereka telah melakukan penelitian tentang tata surya.

Copernicus dan Galileo telah memantapkan prinsip heliosentris (matahari sebagai pusat tata surya), merombak teori geosentrisme (bumi sebagai pusat). Bumi ini bulat, bukan datar. Francis Bacon juga merupakan ilmuwan penting saat itu. Ia telah mengembangkan ilmu alam dan kegiatan eksperimental (empiriame). Perkembangan di zaman Renaissans terus bertambah maju. Memasuki jaman Aufklarung (jaman Pencerahan), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terus berkembang. Orang mulai mengandalkan kekuatan akal dan meninggalkan dogma-dogma agama. Fase jaman Aufklarung merupakan fase yang amat penting bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Para filsuf dan ilmuwan besar pada masa Aufklarung, antara lain Issac Newton. Ia telah mengembangkan ilmu pengetahuan alam berdasarkan prinsip-prinsip matematika. Newton yang mendorong perkembangan teori gravitasi, perhitungan Calculus, dan Optika. Tokoh lain, seperti Montesquieu, J.J Rousseau. Dalam perkembangannya, ilmu pengetahuan seolah-olah tidak dapat dikendalikan oleh manusia, mengingat begitu cepat kemajuannya. Aplikasi dari ilmu pengetahuan yang mengembangkan teknologi pun semakin berkembang. Pada abad ke-20, perkembangan iptek semakin menakjubkan. Dari zaman atom dan nuklir, berkembang pula teknologi informasi, komunikasi, telekomunikasi, dan kini kita kenal jaman komputer dan internet.

Perkembangan Teknologi Dalam Abad Ke-20

1. Sinar Laser



Gambar 4: pembengkokan jalannya cahaya pada serat optic

Laser adalah akronim atau kependekan dari *Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation* (penguatan cahaya melalui emisi radiasi yang dirancang). Sinar laser ini banyak digunakan dalam dunia kedokteran sebagai alat

pemotong atau operasi mikro. Teori dasarnya telah dikemukakan oleh Albeirt Einstein (1879-1955) pada tahun 1917. Pada tahun 1951 seorang ahli fisika Amerika melakukan eksperimen dengan menggunakan gelombang mikro sebagai energi yang diperkuat.

2. Pembangkit Listrik tenaga Nuklir

Rekasi nuklir pertama yang telah dilakukan secara berkesinambungan terjadi pada 1942. Setelah digunakan sebagai senjata berupa bom atom di Nagasaki dan Hiroshima. Energi Nuklir digunakan sebagai sumber energi listrik. Negara Amerika mulai membangun reaktor nuklir pembangkit listrik atau pembangkit listrik tenaga nuklir pada tahun 1951.

3. Serat optik

Serat Optik mempunyai keistimewahan yaitu dapat membengkokkan jalannya cahaya, sebagaimana yang kita ketahui jalan cahaya bergerak dengan satu garis lurus. Serat optik yang bersifat fleksibel atau flamen plastik transparan yang memancarkan cahaya melalui serangkaian pantulan internal. Jhon Tyhidall, ahli fisika Inggris 1870 S. Kapani dia menempatkan dalam sebuah endoskop yaitu instrumen optikal yang digunakan oleh para dokter untuk melakukan pemeriksaan terhadap bagian dalam tubuh manusia. Pada 1970 digunakan untuk mengirim telex, telepon dan sinyal televisi kabel dengan efisien dari pada kabel logam.

4. Satelit Komunikasi

Satelit komunikasi sangat penting dalam kehidupan kita karena telah membuat komunikasi global menjadi wajar dan murah, radio dan tv dilakukan melalui satelit pertama yang telah diluncurkan pada tahun 1957. Dan pada tahun 1962 NASA telah meluncurkan satelit komunikasi komersial pertama, Telstar I.

5. Penerbangan Luar Angkasa

Penerbangan luar angkasa merupakan salah satu penemuan yang sangat menakjubkan dari penemuan teknologi abad ke 20. Penemuan roket yang dapat meluncurkan kendaraan dan juga manusia, ke luar angkasa telah mengajarkan manusia tentang sesuatu yang lebih besar melampaui apa yang terlihat dari bumi. Perjalanan ruang angkasa telah menyediakan sarana untuk meluncurkan satelit, pesawat antariksa, teleskop canggih, dan stasiun luar angkasa.

6. Radar

Radar (yang dalam bahasa Inggris merupakan singkatan dari **Radio Detection and Ranging**, yang berarti deteksi dan penjarakan radio) adalah suatu sistem gelombang elektromagnetik yang berguna untuk mendeteksi, mengukur jarak dan membuat map benda-benda seperti pesawat terbang, berbagai kendaraan bermotor dan informasi cuaca (hujan). Panjang gelombang yang dipancarkan radar adalah beberapa milimeter hingga satu meter. Gelombang radio/sinyal yang dipancarkan dan dipantulkan dari suatu benda tertentu akan ditangkap oleh radar. Dengan menganalisa sinyal yang

dipantulkan tersebut, pemantul sinyal dapat ditentukan lokasinya dan kadang-kadang dapat juga ditentukan jenisnya. Meskipun sinyal yang diterima relatif lemah/kecil, namun radio sinyal tersebut dapat dengan mudah dideteksi dan diperkuat oleh radar.

Penggunaan modern radar sangat beragam, termasuk kontrol lalu lintas, astronomi radar, sistem pertahanan udara, sistem antiraket, radar laut yang dipergunakan untuk menemukan landmark dan kapal lainnya, sistem pengawasan laut, dan pengawasan luar angkasa. Tinggi sistem radar berteknologi berhubungan dengan pemrosesan sinyal digital dan mampu untuk penggalian informasi yang berguna dari tingkat kebisingan yang sangat tinggi.

Dampak Perkembangan Teknologi Pada Masyarakat

Perkembangan mesin uap yang ditemukan oleh James. E. Watt ternyata membawa dampak pada Industri. Lahirnya teknologi itu berdampak pada industrialis dengan menggunakan mesin. Mesin-mesin berbahan dasar besi diciptakan di Inggris pada 1780 menjadi fenomena yang disebut “Revolusi industri” di bidang pertekstilan. Perkembangan iptek yang demikian pesatnya telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut fisik sekarang telah menggunakan robot dan perangkat mesin yang telah mengalihkan fungsi manusia dengan kecepatan yang menakjubkan, begitu juga dengan ditemukannya kefasiran komputer yang telah menggeser kemampuan otak manusia dalam berbagai bidang ilmu dan aktivitas manusia. Perkembangan iptek dianggap sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Iptek diyakini akan memberi umat kesehatan, kebahagiaan dan immortalitas. Sumbangan iptek terhadap peradaban manusia tidak dapat dipungkiri, namun manusia tidak bisa memungkiri kenyataan bahwa iptek mendatangkan dampak yang negatif terhadap manusia.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) di Indonesia berkembang dari tahun ke tahun sejak Indonesia masih dalam penjajahan Belanda. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia pada masa penjajahan dipelopori dan diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Pada waktu itu masyarakat diperkenalkan pada persenjataan modern baik yang ringan maupun yang berat. Teknologi

lain yang diperlihatkan dan digunakan oleh Belanda berupa kendaraan tempur dan alat-alat transportasi lainnya. Teknologi-teknologi tersebut berasal dari negara-negara di Eropa. Kemudian pemerintah kolonial Belanda menanamkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan di sekolah-sekolah maupun dengan cara penggunaan secara langsung kepada masyarakat di Indonesia.

Perkembangan IPTEK di Indonesia

Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi dari barat di Indonesia membawa dampak bagi kemajuan negara Indonesia. Masyarakat Indonesia mulai melakukan pergerakan untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Di samping itu penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia juga membawa dampak bagi semangat juang bangsa Indonesia. Mereka memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi modern untuk mencari informasi-informasi terkini mengenai keadaan dunia. Oleh karena itu masyarakat Indonesia benar-benar terbantu dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pada masa kolonial perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi belum begitu maksimal. Pemerintah koloniallah yang menjadi penyebab perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Pemerintah kolonial menghalangi akses-akses masuknya ilmu pengetahuan dan teknologi dari barat ke Indonesia. Mereka juga melakukan pelarangan terhadap pendidikan bagi masyarakat Indonesia untuk mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya Indonesia tertinggal jauh dengan negara-negara di sekitarnya. Secara keseluruhan penyebab lain dari ketertinggalan Indonesia dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah sebagai berikut : (a) Terbatasnya jumlah orang Indonesia yang mendapat pendidikan terutama pendidikan tinggi, (b) Masyarakat Indonesia jarang terlibat langsung dalam pengembangan iptek, (c) Pemerintah Belanda dan perusahaan-perusahaan yang berada di Indonesia untuk melakukan alih teknologi, (d) Minimnya industrialisasi, dan (e) Kurangnya inovasi teknologi yang berarti di dalam masyarakat Indonesia sendiri.

Setelah merdeka, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat di Indonesia, hal ini didorong dengan terbukanya akses-akses untuk

mendapatkan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Indonesia. Kemerdekaan menciptakan keadilan dan kemudahan dalam mengakses ilmu pengetahuan dan teknologi bagi masyarakat di Indonesia. Dengan bekal pengetahuan ini kemudian masyarakat Indonesia melakukan berbagai inovasi dan eksperimen ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan di Indonesia.

Dampak Teknologi

Teknologi adalah suatu cabang antropologi budaya yang berhubungan dengan studi terhadap kebudayaan materi. Hal ini lebih dimaksudkan sebagai proses-proses manusia dalam menangani dan mengendalikan lingkungan fisiknya. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sebagai bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi secara umum adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. (Kementerian Negara Riset dan Teknologi, 2006: 6). Jika dilihat pada saat sekarang ini perkembangan teknologi informasi terutama di Indonesia semakin berkembang. Dengan adanya teknologi informasi dan komunikasi dapat memudahkan kita untuk belajar dan mendapatkan informasi yang kita butuhkan dari mana saja, kapan saja, dan dari siapa saja. Dalam perekonomian suatu negara, teknologi informasi mulai dirasa mempunyai peran yang penting dalam perekonomian suatu negara karena dengan berkembangnya teknologi informasi, perekonomian suatu negara mulai memperlihatkan perubahan yang cukup signifikan.

Banyak hal yang dirasa berbeda dan berubah dibandingkan dengan cara yang berkembang sebelumnya. Saat sekarang ini jarak dan waktu bukanlah sebagai masalah yang berarti untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, berbagai aplikasi tercipta untuk memfasilitasinya. Perekonomian suatu negara dapat dilihat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di negara tersebut. Semakin tinggi perkembangan teknologi informasi maka semakin tinggi pula pertumbuhan ekonomi negara tersebut.

Namun perkembangan teknologi informasi ini juga memiliki sisi negatif, dimana banyak penyalahgunaan teknologi dalam melakukan tindak kriminal. Kemajuan teknologi adalah sesuatu hal yang tidak bisa dihindari dalam kehidupan ini, karena

kemajuan teknologi akan berjalan sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan. Setiap inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia. Memberikan banyak kemudahan, serta sebagai cara baru dalam melakukan aktivitas manusia. Khusus dalam bidang teknologi masyarakat sudah menikmati banyak manfaat yang dibawa oleh inovasi-inovasi yang telah dihasilkan dalam dekade terakhir ini. Namun demikian, walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif, di sisi lain juga memungkinkan digunakan untuk hal negatif dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia.

F. Daftar Pustaka

- Adrian. Vickers. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta. Penerbit Insan Madani
- Poedjiadi, A. 1987. *Sejarah dan Filsafat Sains*. Jakarta. Depdikbud
- Semiawan, C. dkk 1988. *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*. Bandung. Remadja Karya
- Setiawan, S. 1991. *Theory of Everything*. Yogyakarta. Andi Offset

KEPUSTAKAAN

- Abdurrahman, Dudung. 1999. *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu
- Adrian. Vickers. 2011. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta. Penerbit Insan Madani
- Afan Gaffar. 2001. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar
- Alisatroamidjojo, 1974, *Tonggak-tonggak di Perjalananku*, Jakarta, PT. Kinta
- April Carter. 1985. *Otoritas dan Demokrasi*, Terjemahan: Sahat Simamora. Jakarta. Rajawali Press
- Azra, Azyumardi. 1994. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII*. Jakarta: Mizan
- Brata Trisnu Nugroho. 2006. *Prahara Reformasi Mei 1998*. Semarang. UPT UNNES Press.
- Budi. Hardiman . 2011. *Pemikiran-pemikiran yang Membentuk Dunia Modern (Dari Machiavelli sampai Nietzsche)*. Jakarta. Erlangga
- Burke, Peter. 2001. *Sejarah dan Teori Ilmu Sosial*. Jakarta: YOI
- Chapman, Graham P. 2009. *The Geopolitics of South Asia*.
- Chaudhuri, K.N. 1989. *Trade and Civilisation in The Indian Ocean*. NY: Cambridge
- Davies, Norman. 1996. *Europe a History*. New York: Oxford University Press
- De Jong, L; 1987, *Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta, Kesaint Blanc
- Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2012. *ASEAN Selayang Pandang*.
- Djaja. Wahjudi. 2012. *Sejarah Eropa dari Eropa Kuno Hingga Eropa Modern*. Yogyakarta : Ombak
- Djokotertono. 1958. *Sejarah Perekonomian*. Jogjakarta: Gadjah Mada

- Emmerson, David P. 2005. *Security, Community, and Democracy in Southeast Asia: Analyzing ASEAN*, dalam Japanese Journal of Political Science 6 (2) 165–185. United Kingdom: Oxford University Press.
- Farchan. Bulkin. 1998. *Membedah Politik Orde Baru*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Gay, Peter. 1982. *Abad Pencerahan*. Jakarta: Pustaka Time Life
- Gentler, Meric S. 1998. The Limits to Flexibility: Comments on the post-Fordist Vision of Production and Its Geography dalam Transactions of the Institute of British Geographers, Vol. 13, No. 4, Hal.419-432
- Horowitz, Donald L. 2014. *Perubahan Konstitusi dan Demokrasi di Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Joseph L. Noguee and Robert H. Donaldson,(1981),” *Soviet Foreign Policy Since Word War II*”, New York, Pergamon Press
- Kartodirjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia
- Krauthammer, Charles. 1991. “*The Unipolar Moment Revisited*”, dalam *The National Interest*, Vol. 03, hlm. 5-7
- Kuntowijoyo. 1999. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Bentang
- Legge,John;1986, *Gelora Api Revolusi, Sukarno Si Tokoh Politik*, Jakarta, PT. Gramedia
- Locher-Scholten, Elsbeth. 1996. *Etika Yang Berkeping-keping. Lima Telaah Kajian Aliran Etis dalam Politik Kolonial 1877-1942*. Jakarta: Djambatan
- Lombard, Denys. 1996. *Nusa Jawa Silang Budaya Bagian II: Jaringan Asia*. Jakarta: Gramedia
- Marwati Djoened P & Nugroho N. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka
- Marwati Djoened P & Nugroho N. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia IV dan V*. Jakarta: Balai Pustaka

- Moh. Hatta; 1982, *Memoir*, Jakarta, PT. Tinta Mas
- Muis. A. 2000. *Titian Jalan Demokrasi: Peranan Kebebasan Pers untuk Budaya Komunikasi Politik*. Jakarta. Penerbit Kompas
- Mujanto,G;1974, *Sejarah Indonesia Bagian I.1900-1945*, jakarta, Kanisius
- Nagtegaal, Luc. 1996. *Riding The Dutch Tiger*. Leiden: KITLV
- Nainggolan,Poltak Partogi. 2004. “ *Konflik dan Perkembangan Kawasan paska Perang Dingin*”. Jakarta, Pusat Pengkajian dan Pelayanan Informasi,.
- Notosusanto, Nugroho. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia I*. Jakarta: Balai Pustaka
- _____. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Gramedia
- _____. 1984. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Gramedia
- _____. 1979, *Tentara Peta Pada Jaman Pendudukan Jepang di Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia
- Nyoman. Dekker. 1993. *Sejarah Pergerakan Nasional Indonesia Diawali Kebangkitan Nasional Pada Permulaan Abad XX*. Malang . IKIP MALANG
- Pant, Harsh V. 2011. *India's Relations with China*, dalam: Scott, D (ed.). *Handbook of India's International Relations*. London: Routledge.
- Parker, Geoffrey (ed). 1994. *Atlas World History 4th Edition*. London: Times Books
- Poedjiadi, A. 1987. *Sejarah dan Filsafat Sains*. Jakarta. Depdikbud
- Pringgodigdo, A.G;1978, *Perjuangan Bangsa Indonesia menegakkan Pancasila dalam Masa Penjajahan/Pendudukan Jepang dalam Santiaji Pancasila*, Surabaya, Usaha Nasional
- Purnomo, Wahyudi, 2014. *Geopolitik dan Geostrategi Asia Selatan*. Materi dibahas dan didiskusikan pada kuliah Geopolitik dan Geostrategi, Departemen Hubungan Internasional, Universitas Airlangga.
- R, Soekmono. 1987. *Pengantar Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Kanisius

R.P, Soejono dkk (red). 2010. *Sejarah Nasional Indonesia Zaman Prasejarah di Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka

Ricklef, M.C. 2004. *Sejarah Modern Indonesia 1200-2004*. Yogyakarta: Pusta Pelajar

Sartono Kartodirjo, 1987. *Pengantar Sejarah Indonesia Baru Jilid I dari Emporium ke Imperium*. Jakarta: Gramedia

Semiawan, C. dkk 1988. *Dimensi Kreatif dalam Filsafat Ilmu*. Bandung. Remadja Karya

Setiawan, S. 1991. *Theory of Everything*. Yogyakarta. Andi Offset

Soekarno, Ir. 1963. *"Dibawah Bendera Revolusi"* djilid satu. Djakarta: dibawah bendera revolusi

Soemardjo . *Sejarah Sosialisme di Eropa Dari Abad ke-19 Sampai 1914* . Jakarta . Harapan Masa

USIA. 1994. *An Outline of American History*. Washington: US Information Agen

Wardaya, F.X. Baskara Tulus.2006. *"Perang Dingin dan reinterpretasi Sejarah Indonesia"*,kumpulan karangan, Yogyakarta.

Yusuf. Winandi. 2014. *Menyibak Tabir Orde Baru (memoar politik Indonesia 1965-1998)*. Jakarta. Penerbit Kompas.

Zuhdi, Susanto. 2014. *Nasionalisme, Laut, dan Sejarah*. Jakarta: Komunitas Bambu

Belajar lebih lanjut:

[http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA WALUYA/PIS/Konsep Dasar Sejarah.pdf](http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR. PEND. GEOGRAFI/197210242001121-BAGJA WALUYA/PIS/Konsep_Dasar_Sejarah.pdf) (diakses 23 Juli 2016)

<http://www.docs-engine.com/pdf/1/kebudayaan-prasejarah-di-indonesia.html#> (diakses 23 Juli 2016)

<http://www.docs-engine.com/pdf/1/kebudayaan-prasejarah-di-indonesia.html#> (diakses 23 Juli 2016)

http://school.discoveryeducation.com/teachersguides/pdf/worldhistory/ul/the_grat_ag_e_of_exploration_1400_to_1550_tg.pdf (diakses 23 Juli 2016)

<http://www.wuhsd.org/cms/lib/CA01000258/Centricity/Domain/391/European%20Imperialism%20Around%20the%20World%20PDF.pdf> (diakses 23 Juli 2016)

<http://iwansyahril.blogspot.co.id/2012/05/indonesian-schools-during-dutch.html> (diakses 23 Juli 2016)

<https://www.indonesianhistory.info/pages/chapter-4.html> (diakses 23 Juli 2016)

<https://www.rijksmuseum.nl/en/rijksstudio/timeline-dutch-history/1820-1950-indonesia-and-decolonisation> (diakses 23 Juli 2016)

<http://sejarahakademika.blogspot.co.id/2013/11/peristiwa-mei-1998-sebagai-tonggak.html> (diakses 23 Juli 2016)

<https://www.youtube.com/watch?v=3sTQ2VTjA1Y> (diakses 23 Juli 2016)